

Dr. H. Khoirul Abror, M.H

HUKUM PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

BENING PUSTAKA
Yogyakarta

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. *Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).*
2. *Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

© Hak cipta pada pengarang

Dilarang mengutip sebagian atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun tanpa seizin penerbit, kecuali untuk kepentingan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

Judul Buku : HUKUM PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
Penulis : Dr. H. Khoirul Abror, M.H
Cetakan Pertama : September 2017
Cetakan Kedua : Februari 2020
Tata Letak : Wildan
Desain Cover : M. Bagus Subakti

Penerbit LADANG KATA

Kampung Jagangrejo, Banguntapan Bantul – Yogyakarta
0274-2841901 | ladangkata@gmail.com

Percetakan cv ARJASA PRATAMA

Jl. P. Tirtayasa Gg. Andalas Waykiri II No.1, Sukabumi-Bandar Lampung
0721-5640386 | 085231945055 | cvarjasapratapratama@gmail.com

ISBN : 978-602-6541-50-5

Isi diluar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

Buku berjudul “Hukum Perkawinan dan Perceraian” yang ada dihadapan pembaca ini ditulis atas berkat bantuan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karenanya kami sampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada para pihak yang tidak disebutkan satu persatu dalam pengantar singkat ini.

Kepada para Guru Besar kami dan para Doktor, yang telah banyak memberikan ilmunya kepada kami terutama kepada Bapak: Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A; Prof. Dr. H.M. Aqil Siraj, M.A; Prof. Dr. H.M. Atho’ Mudzhar, M.A; Prof. Dr. H. Amin Suma, MA; Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA; Prof. Dr. H. Nasruddin Harahap, S.U; Prof. Dr. H. Yudian Wahyudi, M.A; Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag;; Prof. Dr. H.M. Damrah Khair, MA; Prof. Dr. H. Suharto, SH, MA; Prof. Dr. H.M. Nasor, M.Si; Prof. Dr. H. A. Fauzie Nurdin, M.S; Prof.Dr. Hj. Enizar, M.A; Dr. Alamsyah, M.Ag; Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H; Dr. H. Yusuf Baihaki, MA; Husnul Fatarib, MA., Ph.D; Dr. Hasan Mukmin, M.Ag; adalah pihak yang tidak mungkin dilupakan atas jasanya dalam memberikan ilmunya kepada kami.

Ucapan yang sama kepada teman-teman mahasiswa yang pernah bersam-sama berkecimpung mengambil mata kuliah pada program S3 Hukum Keluarga bersama kami; sebab sejumlah ide dalam buku ini tidak terlepas dari hasil dan inspirasi dari diskusi dengan mereka.

Kepada pembaca yang telah memberikan masukan dan kritik yang bersifat membangun untuk perbaikan buku ini, diucapkan terimakasih yang tiada terhingga, semoga amal ibadahnya mendapat ganjaran dari Allah Swt. Seiring dengan itu, semoga beliau-beliau yang budiman tidak bosan memberikan masukan lain untuk masa yang akan datang.

Akhirnya, sekecil apapun diharapkan buku ini dapat berguna bagi siapa saja yang berminat. Tegur sapa dan masukan dari pembaca, dapat disampaikan ke alamat email: khoirulabror472@yahoo.com. Tegur spanya disampaikan ucapan terima kasih setinggi-tinginya, dan semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah, Amin yâ Rabbal ‘âlamîn.

Bandar lampung, Maret 2020
Penulis,

Dr. H. Khoirul Abror, MH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI.....	ii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	9
C. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
D. Signifikansi Tulisan	13
E. Kerangka Teori	13
 BAB II PERKAWINAN.....	 39
A. Pengertian Perkawinan	39
B. Dasar Hukum Perkawinan	47
C. Rukun dan Syarat Perkawinan	58
D. Prinsi-Prinsip Perkawinan.....	61
E. Tujuan Perkawinan	65
F. Hikmah Perkawinan.....	71
G. Larangan dan Batalnya Perkawinan.....	74
H. Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Huku Positif	99
I. Salinan PERMA No 5 Tahun 2019.....	126
 BAB III WALI DAN SAKSI DALAM PERKAWINAN	 141
A. Wali dalam Perkawinan	141
B. Nas Tentang Wali dan Saksi dalam Perkawinan .	143
C. Pandangan Ulama Madzhab tentang Wali	144
D. Konsep Perundang-undangan	147
E. Aspek Psikologis dan Sosiologis	148
F. Saksi Nikah.....	154
G. Kesimpulan	159
 BAB IV PERCERAIAN	 161

	A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian	161
	B. Rukun dan Syarat Perceraian	163
	C. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan.....	170
	D. Alasan Perceraian	206
BAB V	NIKAH <i>MUT'AH</i>	211
	A. Pengertian Nikah <i>Mut'ah</i>	211
	B. Disyari'atkannya Nikah <i>Mut'ah</i>	214
	C. Nikah <i>Mut'ah</i> antara Boleh dan Tidak	216
	D. Kajian Psikologis, Sosiologis dan Filosofis.....	225
	E. Dampak Negatif Nikah <i>Mut'ah</i> Ala Syi'ah	229
	F. Bentuk <i>Ijab Qabul</i> Nikah <i>Mut'ah</i>	232
	G. Mengabaikan Akar Masalah	236
	H. Kontroversi Risalah Amman	240
	I. Kesimpulan	242
BAB VI	PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT	243
	A. Pendahuluan.....	243
	B. Historis Pencatatan Akad Nikah	244
	C. Perkawinan yang Tidak Tercatat	249
	D. Manfaat Pencatatan Akad Nikah	257
	E. Mudarat Nikah Tidak Tercatat.....	258
	F. Faktor Penyebab Pernikahan Tidak Tercatat	261
	G. Kesimpulan	266
BAB VII	POLIGAMI.....	269
	A. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami.....	269
	B. Dampak Perkawinan Poligami.....	295
	C. Keharmonisan Rumah Tangga.....	297
	D. Tanggungjawab dalam Rumah Tangga	310

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk ketaatan manusia kepada Allah Swt adalah, bahwa dalam rangka penyaluran hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan haruslah didasarkan pada ikatan yang telah ditentukan-Nya, yaitu melalui lembaga perkawinan sebagai lembaga yang suci, sakral bagi umat Islam. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa,¹ dan terciptanya kerukunan dalam rumah tangga yang (*sakinah, mawaddah warahmah*) merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga; Bahkan al-Qur'an memproklamasikan perkawinan sebagai suatu perjanjian (ikatan) yang paling suci, paling kokoh antara suami isteri,² teguh dan kuat (*miṭṭaqan ghalīẓan*).³ Selain itu juga tujuan

¹ Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*

² Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Dina Utama Semarang, Cet. I, 1993, h. 130

³ QS. Al-Ahzâb (33) : 7; QS. An-Nisâ' (4): 21; QS. An-Nisâ' (4) : 154; Lihat, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2; dan Lihat juga, Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah menurut al-Qur'an dan al-Sunnah*, Cet.1, Akademika Presindo, Jakarta, 2000, h. 14

perkawinan, untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina, penerus keturunan (anak) dan juga bertujuan ibadah.⁴

Negara RI adalah negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dijamin oleh Pasal 29 Undang-undang Dasar Tahun 1945. Oleh karenanya setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Perkawinan dalam Islam dikenal dengan istilah nikah atau *tazwîj*,⁵ secara *harfiyah* adalah “bersenggama atau bercampur”. Lebih lanjut Jalaluddin Al-Mahalli⁶ dalam kitabnya mengungkapkan:

وشرعا : عقد يتضمن اباحة وطئ بلفظ انكاح او تزويج

Secara *syar'i* nikah adalah: “suatu akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan suami isteri (hubungan seksual) dengan menggunakan lafadz “*inkah*”(menikahkan), atau lafadz “*tazwîj*” (mengawinkan).

⁴ Taqiyyuddin Abi Bakr, *Kifayatul Akhyar fie Hilli Ghayah al-Ikhtishar*, Dar al-Kutub al-Islamy, tt, h. 48; Lihat, Khoiruddin nasution, *Hukum Perkawinan 1*, ACAdemia, & Tazzafa, Yogyakarta, 2005, h. 46-47.

⁵ Jalaluddin al-Mahalli, *Al-Mahalli*, juz III (Indonesia: Nur Asia, tt), h. 206.

⁶ Ibid, h. 206

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga⁷ serta Kompilasi Hukum Islam⁸ termasuk produk hukum negara Indonesia yang mayoritas Islam ini, wajib diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat. Dengan mengetahui dan memahami Undang-undang tersebut, seluruh masyarakat seyogyanya untuk semakin menyadari hak dan kewajibannya dalam perkawinan dan putusnya perkawinan serta akibatnya.

Menurut Khoiruddin Nasution, ada sejumlah ayat yang mengisyaratkan tujuan perkawinan, yang bila disimpulkan akan tampak minimal lima tujuan umum.⁹ Penetapan tujuan perkawinan didasarkan pada pemahaman sejumlah nas, ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. Sejumlah nas yang berbicara sekitar tujuan perkawinan itu:

1. Bertujuan untuk membangun keluarga *sakinah*;
2. Bertujuan untuk regenerasi dan/atau pengembangbiakan manusia (*reproduksi*), dan secara tidak langsung sebagai jaminan *eksistensi* agama Islam;
3. Bertujuan untuk pemenuhan *biologis* (seksual);
4. Bertujuan untuk menjaga kehormatan;

⁷Undang-undang No.23 tahun 2004 *tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*,.

⁸ Instruksi Presiden RI no. 1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Dirjen Binbaga Islam, Kemenag RI tahun 2001

⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, ACAdeMIA, Tazzafa, Yogyakarta, 2009, h. 223

5. Bertujuan ibadah, yang dapat dipahami secara *implisit* dari sejumlah ayat al-Quran dan secara *eksplisit* disebutkan dalam hadis.

Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*) berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh diantara suami isteri. Hal ini dipertegas dalam QS. Ar-Rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹⁰

Maksud dan tujuan dari ayat tersebut adalah, bahwa salah satu tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.¹¹ Dengan demikian, dari perkawinan

¹⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, PT. Tehazed, 2010, h. 572.

¹¹ Bab II Pasal 3, *Kompilasi Hukum Islam*.

itu, diharapkan dapat melestarikan proses historis keberadaan manusia dan peradabannya dalam kehidupan di dunia ini, yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit terkecil dari kehidupan sosial kemasyarakatan.¹²

Dibalik perkawinan yang diharapkan kekal dan abadi itu, tidaklah menutup kemungkinan apabila rumah tangga tersebut terjadi *disharmonis*, karenanya dimungkinkan terjadinya perselisihan, pertengkaran dan bahkan menjurus pada kekerasan diantara kedua pihak. Apabila perselisihan, pertengkaran dan kekerasan tidak dapat diatasi, maka kondisi rumah tangga akan mencapai puncaknya yang mengarah kepada perceraian dan atau bubarnya perkawinan semakin menjadi kenyataan; sebagai indikasi awal adanya persoalan hukum, diantaranya melihat kasus-kasus seperti:

1. Kasus yang terjadi pada Siti Aisyah (40) guru honorer di Babatan Kecamatan Ketibung Lampung Selatan, menjadi korban brutal suaminya sendiri Rafik (41 tahun), sehingga mengalami 11 luka tusukan (7 di punggung, 2 di perut dan 2 di paha kanan) lantaran berpisah rumah karena alasan ekonomi, hal ini terjadi pada Rabu 4 Januari 2012 pukul 08.00.¹³
2. Kasus kekerasan fisik: terjadi pada Mar (38) yang dipukuli suami sendiri dengan menggunakan linggis hingga babak belur. Akibat peristiwa itu, korban mengalami patah gigi, patah tulang dagu, memar di leher dan dada, dan

¹² Djamal Latiief, H.M, *Aneka Hukum Percerian di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, h. 12.

¹³ Harian *Lampung Post*, Kamis , 5 januari 2012, h. 22

pendarahan di gusi. Hal ini hanya dipicu karena isteri menolak disuruh minta uang kepada anaknya yang bekerja di Bogor.¹⁴

Fenomena yang terjadi di tengah masyarakat muslim di bumi Indonesia, angka perceraian semakin meningkat dikarenakan banyak faktor yang menyebabkannya. Diantara faktor penyebab terjadinya perceraian ini adalah:

1. Dikarenakan poligami yang tidak sehat;
2. Krisis akhlak;
3. Kawin paksa;
4. Cemburu karena suami berselingkuh;
5. Faktor ekonomi;
6. Akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri.

Satu hal yang lebih mengherankan, bila angka perceraian di Provinsi Lampung didominasi atas permintaan isteri, atau *khuluk*¹⁵ (cerai gugat).

Salah satu dampak yang timbul akibat perceraian ini, kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, *psikologis*, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁶

¹⁴ Harian *Lampung Post*, Kamis, 02 Mei 2013, h. 07.

¹⁵ *Khuluk*; adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri, dengan memberikan tebusan (*Iwaq*) kepada dan atas persetujuan suami.

¹⁶ Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Pasal 1 ayat (1)

Secara umum terjadinya kejahatan sangat merugikan masyarakat, khususnya korban kejahatan. Salah satu jenis kejahatan dalam rumah tangga adalah kekerasan terhadap isteri. Media yang terbit di Lampung, melalui pemberitaannya, untuk kasus tindak kekerasan terhadap perempuan, sangat membantu mengungkap kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Lampung, termasuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Contoh kasus perceraian di wilayah Lampung Barat dan Pesisir Barat pada 2012 meningkat dibanding 2011. Pada 2011 jumlah permohonan mencapai 363 kasus, 140 kasus di antaranya merupakan cerai gugat. Sementara pada tahun 2012, permohonan mencapai 401 kasus, dengan perincian: kasus cerai gugat (CG) yang sudah ditangani Pengadilan Agama Krui di Liwa berjumlah 144 kasus, dan cerai talak (CT) 58 kasus. Kasus perceraian yang lebih banyak ialah kasus cerai gugat, yaitu perempuan yang mengajukan cerai. Dari 401 permohonan cerai itu, selama 2012 yang berhasil divonis cerai mencapai 202 kasus, dengan perincian 144 cerai gugat dan 58 cerai talak..¹⁷

Contoh lain: di Pengadilan Agama Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur mencatat angka perceraian selama 2013 sebanyak 1.415 perkara. Dari jumlah itu sebanyak 300 perkara adalah perceraian dalam rumah tangga Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Panitera Muda Pengadilan Agama Kota Metro Ros Amanah Rabu (15/1), mengatakan jumlah perkara yang

¹⁷ <http://lampost.co/berita/angka-perceraian-di-lampung-barat-tinggi>, Akses 07 Januari 2014

ditangani selama 2013 sebanyak 1.415 sudah diputuskan sebanyak 1.400 perkara. Ros mengatakan angka perceraian di kalangan PNS cukup tinggi. “Pada bulan Desember 2013, ada 30 gugatan perceraian oleh PNS,”¹⁸

Di Pengadilan Agama Tanggamus, lebih mencengangkan, khusus di bulan Oktober 2014 saja terdapat 58 rekap perkara yang diterima: 43 diantaranya perkara Cerai Gugat, 10 perkara cerai talak, dan 5 perkara lainnya.¹⁹

Mencermati paparan fakta-fakta pada latar belakang masalah di atas, bahwa problem cerai gugat dipandang laik untuk dilakukan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada *fenomena* faktor-faktor penyebab Cerai Gugat yang dilakukan oleh isteri kepada suami di dalam keluarga yang berujung pada putusnya perkawinan di Provinsi Lampung, dan dampak serta solusinya terhadap suami, isteri, anak maupun harta bersama, melalui penulisan disertasi dengan judul: Faktor-faktor Penyebab Cerai Gugat,²⁰ dan Dampak serta Solusinya di Lampung.

¹⁸ [http:// lampost.co/ berita/pns-di-metro-dan-lamtim-banyak-yang-bercerai](http://lampost.co/berita/pns-di-metro-dan-lamtim-banyak-yang-bercerai), Akses 25 Oktober 2014

¹⁹ [http://www. pa-tanggamus. go.id/ index.php/rekap-perkara-diterima](http://www.pa-tanggamus.go.id/index.php/rekap-perkara-diterima), Akses 25 Oktober 2014

²⁰ Kata “Cerai Gugat” dengan mengutip istilah yang dikemukakan oleh Bhader Johan dan Sri Warjiyati, dalam bukunya *Hukum Perdata Islam*, Mandar Maju, Bandung, 1997, h. 33; Lihat Khoiruddin Nasution, dkk, dalam bukunya *Hukum Perkawinan & Warisan di Dunia Muslim Modern*, ACAdemia, Yogyakarta, 2012, h. 184; dan lihat: H.M.Damrah Khair dalam Laporan Hasil Penelitian Individu dengan judul *Cerai di Kota Bandar Lampung, Studi Tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klas IA Tanjungkarang 2008-2012*; Lihat juga, F.X. Suhardana, *Hukum Perdata I*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, h. 114 Lebih lanjut, UU no 1/74 serta PP No.9/ 1975 tidak menamakan hal ini “cerai gugat” tetapi mengatakan bahwa perceraian ini dengan suatu gugatan.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam tulisan ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan, karenanya buku ini dibatasi hanya pada persoalan-persoalan: (1) pengertian dan dasar hukum, (2) rukun dan syarat, (3) prinsip-prinsip perkawinan, (4) tujuan perkawinan, (4) hikmah perkawinan, (5) masalah larangan dan pembatalan perkawinan, (6) wali dan saksi dalam perkawinan, (7) masalah perceraian, (8) masalah perkawinan *muṭ'ah* dan dilengkapi *muṭ'ah* ala Syi'ah

C. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelusuran dari hasil beberapa penelitian yang ada, *relevansinya* dengan penelitian yang akan diteliti, ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya cerai gugat, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh DR.Charul Bariah, S.H., M.Hum bersama Dra. Zakiah, M.Pd dari Fakultas Hukum

Kata “Gugatan Perceraian” sebagaimana termaktub dalam Pasal 40 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 114 Inpres No. I Tahun 1991 tentang KHI, dimaksudkan adalah berlaku untuk suami atau isteri, hal ini dipertegas dalam Pasal 20 (1) PP No 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, bahwa “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat”. Pasal 114 KHI menegaskan, bahwa “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian, dapat terjadi karena ‘talak’ dan ‘gugatan perceraian’, namun di Peradilan, Gugatan Perceraian yang diajukan oleh suami dikenal dengan sebutan cerai talak, sementara Gugatan Perceraian yang diajukan oleh isteri lebih dikenal dengan istilah “Cerai Gugat”. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan istilah “cerai gugat”.

Universitas Sumatera Utara, dengan judul “Isteri Ramai-Ramai Gugat Cerai Suami di PA Stabat” telah mengambil sampel dalam penelitiannya di Pengadilan Agama Stabat. Dalam penelitian data-data didapat dari studi dokumen dan *interview*. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa: Setelah memperhatikan angka perceraian yang cukup tinggi dari 1071 perkara yang masuk tahun 2013, ternyata gugatan perceraian banyak atau sekitar 72,27 % dilakukan oleh isteri, karena tidak puas atas sikap dan perlakuan suaminya.²¹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lina Nurhayanti, dengan judul “faktor yang mempengaruhi cerai gugat di PA Yogyakarta”²². Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi cerai gugat, karena tidak adanya tanggung jawab, tidak ada keharmonisan antara suami isteri, gangguan pihak ketiga (perselingkuhan dengan WIL/ wanita idaman lain), dan dengan pergeseran pola pikir masyarakat dulu dengan sekarang dalam memahami perceraian.
3. Penelitian yang tidak kalah menariknya, oleh Drs. Daud Bahransyaf, MM, Peneliti Madya Bidang Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI²³. Ia menjelaskan bahwa:

²¹ [http:// www.pa- sungguminasa.go.id/ peraturan-dan-kebijakan/ 116-daftar-hasil-pene litian](http://www.pa-sungguminasa.go.id/peraturan-dan-kebijakan/116-daftar-hasil-penelitian), Akses 28 Okt 2014

²² Lina Nurhayanti, *Faktor yang Mempengaruhi Cerai Gugat di PA Yogyakarta*, Yogyakarta, 2010

²³ Daud Bahransyaf, *Cerai Gugat Mendominasi Perceraian di Indonesia*, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Volume 33 Nomor 1 Maret 2009, Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan

Banyak faktor yang mendominasi perceraian pasangan suami istri (Pasutri), diantaranya didominasi oleh faktor kesulitan ekonomi. Beberapa faktor lainnya seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), adanya pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangga dan lainnya.

4. Penelitian yang dilaksanakan oleh Anik Farida, dengan judul “menimbang dalil poligami” menegaskan bahwa dalam catatan dan atau laporan Pengadilan Agama (Pengadilan Tinggi Agama) di wilayah kota/kabupaten dan/atau daerah provinsi di bumi Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh Dirjen Bimas Islam (Bapak Nazaruddin Umar) ²⁴ bahwa kasus perceraian akibat poligami, mengalaalmi peningkatan yang signifikan dalam setiap tahunnya. Dapat dipahami bahwa poligami justru menjadi salah satu penyebab perceraian, bahkan lebih dari itu mengakibatkan isteri dan anak terlantar.²⁵
5. Penelitian yang dilaksanakan oleh Suyono dengan judul Faktor-faktor penyebab cerai gugat dan akibat hukumnya (Studi di Pengadilan Agama Metro Kelas I B) mengungkapkan, bahwa yang mempengaruhi cerai gugat di

Kesejahteraan Sosial (B2P3KS), Yogyakarta; dan Lihat: [http:// daud bahransyaf. blogspot.com/ 2009/08/ intisari-cerai-gugat-di-indonesia.html](http://daudbahransyaf.blogspot.com/2009/08/intisari-cerai-gugat-di-indonesia.html), Akses, 28 Okt 2014.

²⁴ Anik Farida, *Menimbang Dalil Poligami, antara teks, konteks, dan Praktek*, balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Kementerian Agama, jakarta, 2008, h.111.

²⁵ Lihat, Leli Nurrohmah, *Poligami Saatnya Melihat Realitas*, dalam Jurnal Perempuan no.31, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.

Kota Metro, sangat bervariasi, meskipun yang paling dominan adalah faktor ekonomi.²⁶

Berdasarkan telaah pustaka hasil penelitian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa faktor penyebab terjadinya cerai gugat di masing-masing daerah tempat penelitian, sangat beraneka ragam; oleh karenanya, terinspirasi dari pemaparan hasil penelitian tersebut, dipandang perlu untuk mengkaji dan meneliti faktor-faktor penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama kota/ kabupaten dalam wilayah Provinsi Lampung, sekaligus mengkaji dan menganalisis dampak yang timbul serta solusinya akibat cerai gugat tersebut, terhadap suami, isteri, anak maupun terhadap harta bersama.

Hasil penelitian dalam telaah pustaka tersebut, dimungkinkan untuk diambil sebagiannya, sebagai bahan *literature* dalam penelitian Disertasi ini. Disamping *literature* lain yang ada *relevansinya* dengan masalah yang diteliti, baik dari kitab-kitab fikih, Peraturan Perundang-undangan seperti UU NO. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, maupun yang lainnya; Oleh karenanya, Posisi penelitian ini diarahkan untuk membahas selain faktor-faktor penyebab cerai gugat di Lampung, juga akan diangkat bagaimana dampak yang timbul akibat perceraian tersebut, sekaligus bagaimana solusinya, baik terhadap suami, isteri, anak maupun terhadap harta bersama, selama membina rumah tangga bersama.

²⁶ Suyono, *Faktor-faktor Penyebab Cerai Gugat dan Akibat Hukumnya* (Studi pada Pengadilan Agama Metro Klas I B), Tesis, STAIN Metro, 2013, h. 186

D. Signifikansi Tulisan

Tulisan ini penting sebagai salah satu upaya menemukan konsep yang ada relevansinya dengan hubungan keluarga yang dibina oleh pasangan suami isteri dalam sebuah rumah tangga. Oleh karenanya, tulisan ini diharapkan dapat berguna untuk:

Menambah khazanah ilmiah dibidang hukum, baik yang berkaitan dengan hukum *meteriel* maupun hukum *formil*, lebih khusus lagi dalam hukum Islam; terutama dalam hal cerai gugat di Pengadilan Agama kota/ kabupaten di Provinsi Lampung;

Tulisan ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan bermanfaat serta menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi pembuat dan penegak hukum yang menjalankan undang-undang, serta para pihak yang berperkara, terutama bagi pasangan suami isteri yang berkehendak untuk bercerai.

E. Kerangka Teori

Teori merupakan salah satu bagian yang memegang peranan penting dalam suatu penelitian, karena teori yang digunakan dalam penelitian, dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan dan menganalisis permasalahan yang diteliti secara sistematis. Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian (cerai gugat), dampak dan solusinya.

Untuk mendapatkan gambaran dalam penelitian ini, ada beberapa teori yang dipandang layak ditetapkan sebagai *grand teori* yang digunakan, antara lain:

1. Teori *Maqâşid Syarî'ah*. Secara bahasa *Maqâşid Syarî'ah* terdiri dari dua kata yaitu *Maqâşid* dan *Syarî'ah*. *Maqâşid* berarti kesengajaan atau tujuan. *Maqâşid* merupakan bentuk jama' dari *maqşûd*, yang berasal dari suku kata *Qaşada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, *Maqâşid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.²⁷ Sedangkan *Syarî'ah* secara bahasa berarti *المواضع تحضر الى الماء*²⁸ artinya jalan menuju sumber air, dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.²⁹ Menurut istilah, Al-Syatibi menyatakan, "Sesungguhnya *syarî'ah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia ini dan akhirat"³⁰

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa, tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba dunia dan akhirat. Menurutny, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka

²⁷ Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2*, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), Cet, II), h. 170.

²⁸ Dikutip oleh Asafri Jaya dalam kitab *lisan al-'Arab* kepunyaan Ibnu Mansur al-Afriqi, (Bairut: Dar al-Sadr, t.th), VIII, h. 175

²⁹ Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa: Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1994), h. 140.

³⁰ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syarî'ah*. (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), jilid 2, h. 374.

hukum tersebut tidak dapat dinamakan Hukum Islam.³¹ Hal senada juga dikemukakan oleh al-Syatibi, yang menegaskan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan *taklif mâ lâ yustaḥiq* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan).³² Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat dunia dan akhirat itulah, maka para ulama Ushul Fiqh merumuskan tujuan hukum Islam tersebut dalam lima misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemaslahatan. Kelima misi (*Maqâṣid al-Syarī'ah/ Maqâṣid al-Khamsah*) dimaksud adalah memelihara *agama, jiwa, akal, keturunan dan harta*.³³

Dapat dipahami bahwa teori *Maqâṣid al-Syarī'ah*, dalam hukum Islam, sebagaimana disyari'atkan oleh Allah dengan tujuan utama: merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu

³¹ Ibn Qayyim, *I'lam al-Muaqī'in Rabb al- 'Alamin*, (Beirut: Dar al-Jayl, t.t.), Jilid III h. 3; lihat juga Izzuddin Ibn Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Bairut: Dar al-Jail, t.t), jilid II, h. 72; Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Jilid II, h. 1017.

³² Al- Syatiby, *al-Muafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, Op Cit, h. 150. lebih lanjut tentang tujuan hukum Islam dapat dilihat dalam *Fathi al-daraini, al-manahij al-Ushuliyyah fi Ijtihadi bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'*, (Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadist, 1975), h. 28; Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, 1958), h. 366; Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy*, (Islamabad; Islamic Research Institute, 1977), h. 223.

³³ Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 20

maupun masyarakat.³⁴ Seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan atau (*needs*).³⁵ Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam itu menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia, yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek,³⁶ yaitu:

a. *Daruriyyat (primer)*;

Jenis *maqâṣid* ini merupakan kemestian (mutlak), dan landasan dalam menegakan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat yang mencakup pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pengabaian terhadap kelima unsur pokok tersebut akan menimbulkan kerusakan di muka bumi serta kerugian yang nyata di akhirat kelak. Pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dapat dilakukan dengan cara memelihara *eksistensi* kelima unsur pokok tersebut dalam kehidupan manusia dan melindunginya dari berbagai hal yang dapat merusak. Sebagai contoh, menunaikan rukun Islam, pelaksanaan kehidupan manusiawi serta larangan mencuri, masing-masing merupakan salah satu bentuk pemeliharaan *eksistensi*

³⁴ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, cet.2, Penamadani, Jakarta, 2005, h. 19

³⁵ M. Fahim Khan, *Shatibi's Objectives of Shari'ah and Some Implications for Consumer Theory*, dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (ed), *Reading in Islamic Economic Thought*. h. 193.

³⁶ Al-Syatibi, *al-Muafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Musthafa Muhammad), jilid 2, h. 8

agama dan jiwa serta perlindungan terhadap *eksistensi* harta.

Daruriyyat (primer) ini mencakup semua hajat hidup yang bersifat pokok, kebutuhan dasar atau kebutuhan minimal yang harus dipenuhi manusia agar hidup layak. Jika tidak dipenuhi, kelangsungan hidup manusia akan terganggu; Kebutuhan primer yang paling utama terdiri dari 3, yaitu sandang, pangan, dan papan.³⁷

Seirama dengan kebutuhan *primer* tersebut, Abraham Maslow menyebutnya dengan tingkat kebutuhan yang bersifat *fisiologik* ³⁸. Kebutuhan-kebutuhan itu seperti kebutuhan akan makanan, minuman, tempat berteduh, seks, tidur dan oksigen. Kebutuhan ini dinamakan juga kebutuhan dasar (*basic needs*) yang jika tidak dipenuhi dalam keadaan yang sangat ekstrim (misalnya kelaparan) manusia bisa kehilangan kendali atas perilakunya sendiri, karena seluruh kapasitas manusia tersebut dikerahkan dan dipusatkan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.³⁹ Sebaliknya, jika kebutuhan dasar ini relatif sudah tercukupi, muncullah kebutuhan yang lebih tinggi yaitu kebutuhan akan rasa aman (*safety needs*). Selain itu, ada beberapa kebutuhan pokok yang harus

³⁷ James H. Donnelly, James L. Gibson dan John M. Ivancevich, *Fundamentals of Management*, (New York: Irwin McGraw-Hill, 1998), h.270-271.

³⁸ Abraham Maslow. 2006. *On Dominance, Self Esteem and Self Actualization*. Ann Kaplan: Maurice Basset. h. 168

³⁹ Abraham Maslow. (2006), *On Dominance, Self Esteem and Self Actualization*. Ann Kaplan: Maurice Basset, h. 153

dipenuhi seiring perkembangan zaman, seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan dll.

b. *Hajjiyyat (sekunder)*;

Jenis *maqâşid* ini dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia. Contoh jenis *maqâşid* ini antara lain mencakup kebolehan untuk melaksanakan akad *muḍârabah*, *muẓâra'ah* dan *ba'i salâm*, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan atau menghilangkan kesulitan manusia di dunia.

Kebutuhan *Sekunder*, disebut juga dengan kebutuhan *kultural*, artinya kebutuhan yang timbul sehubungan dengan meningkatnya peradaban manusia. Kebutuhan *sekunder* adalah kebutuhan yang diperlukan oleh manusia setelah kebutuhan *primer* terpenuhi dengan baik. Dan kebutuhan *sekunder* bersifat menunjang kebutuhan *primer*.

Contoh: pakaian yang baik, makanan dan minuman yang bergizi, tempat tinggal yang baik, dan sebagainya, yang pada prinsipnya kebutuhan ini tidak tergolong kebutuhan mewah (kebutuhan pelengkap).

c. *Tahsiniyyat (stabilitas sosial)*.

Aspek *tahsiniyyat*, maksudnya adalah melakukan sesuatu yang termasuk kebaikan dalam tradisi dan menjauhi perilaku buruk yang tercela menurut akal yang benar, contohnya terhimpun dalam

kategori akhlak terpuji.⁴⁰ Ibnu Asyur berkata, ”menurut saya ini adalah *kemaslahatan* yang memberi kesempurnaan dan keteraturan bagi kondisi manusia, sehingga mereka dapat hidup dengan aman, tentram serta tampak indah dalam pandangan orang lain”.⁴¹ Jadi, ini adalah *maṣlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *ḍarurî*, juga tidak sampai tingkat *hajjiyah*; namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.⁴² Apabila aspek ini terganggu, maka kehidupan akan kacau, bahkan pola kehidupan makhluk berbudaya-pun bisa menjadi musnah bila tanpa *stabilitas* sosial. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian lebih terhadap aspek *tahsiniyyat* ini. Di dalam aspek *tahsiniyyat* itu mencakup hak dan kewajiban asasi manusia untuk memelihara lima jagat kehidupan, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁴³ Untuk menjamin, melindungi dan menjaga kemaslahatan hukum-hukum tersebut, Islam menetapkan sejumlah aturan main, baik berupa perintah maupun larangan.

⁴⁰ Asy Syatibi, *Al Muwafaqat fi Uṣul Asy Syarî'ah*, (Beirut: Dâr Ibnu Affan, Cet 1, 1997 M/1417 H) Vol. 2. h. 22

⁴¹ Muhammad Bin Thohir Ibnu Asyur, *Maqasid Asy Syariah Al Islamiyah*, (Kairo: Darus Salam, 2006 M/1427 H), h. 81

⁴² Amir syarifudin, *Ushul Fikih*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, Cet 5, 2009 M) Vol. 2.. h. 350.

⁴³ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, cet.2, Penamadani, Jakarta, 2005, h. 20

2. Teori *Maṣlahah Mursalah*; dalam perspektif *linguistik*, *maṣlahah* bermakna *diḍul mafsadat*, berlawanan dengan kerusakan, dalam arti menertibkan pekerjaan dan menghantarkan kepada kebaikan.⁴⁴ Jadi, yang dimaksud dengan *maṣlahah* adalah segala sesuatu yang menjadi hajat hidup, dibutuhkan dan menjadi kepentingan yang berguna dan mendatangkan kebaikan bagi seseorang manusia.⁴⁵

Al Buthi mengatakan bahwa kata *maṣlahah* sama dengan kata manfaat dari sisi *wazan* (timbangan) dan makna. Dan setiap apapun yang mengandung manfaat, berupa mendatangkan faedah dan kenikmatan atau berupa perlindungan seperti menjauhkan dari bahaya atau rasa sakit, semua itu pantas disebut dengan *maṣlahah*⁴⁶

Yusuf Hamid mengatakan bahwa kata *maṣlahah* mutlak kembali kepada 2 hal:⁴⁷

- a. Makna *hakiki*; Sebagaimana Al Buthi bahwa kata *maṣlahah* sama dengan kata manfaat (dalam bahasa arab), dari sisi *wazan* (timbangan) dan makna, ini adalah makna *hakiki*;
- b. Makna *Majâzi*; Secara *majazi*, berarti perbuatan yang mengandung kebaikan dan manfaat, maksudnya dalam

⁴⁴ Lihat Sayyid al-Khuri al-Syarnubi al-Banani, *Aqrab al-Mawarid*, Juz 1, Beirut: al-Suyu'iyah, t.t, h. 565

⁴⁵ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, dari Sosial Ungkungan Asuransi Sehingga Ukhuwah, Bandung: Mizan, Juni 1994, h. 148.

⁴⁶ Muhammad Said Romdhon Al Buthi, *Dhowabitul Maslahah fis Syariah Al Islamiyah*, (Muassasah Risalah), h. 23; Lihat juga, Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab*, (Kairo: Darul Ma'arif), h. 2479-2480

⁴⁷ Lihat, Yusuf Hamid Alim, *Al Maqosid Al 'Ammah Lissyariah Al Islamiyah*, (Riyadh: Ma'had Ali Al Fikri Al Islami, Cet-2, 1994 M/1415 H), h. 133-134

konteks *kausalitas*. Seperti halnya perniagaan yang mengandung manfaat materi dan menuntut ilmu yang mengandung manfaat maknawi.

Kemaslahatan inilah, dalam pandangan al-Syatibi, menjadi *Maqâsid al-Syari'ah*. Dengan kata lain, penetapan *syari'at*, baik secara keseluruhan (*jumlatan*) maupun secara rinci (*tafşilan*), didasarkan pada suatu *'illat* (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan *kemaslahatan* hamba.⁴⁸

Menurut *syara'*, para *Ushuliyyun* membagi *maşlahah mursalah* (dilihat dari segi kandungannya) menjadi dua pengertian:

- a. *Maşlahah 'Ammah*; *Maslahat* ini mengacu kepada tujuan pensyari'atan, yakni untuk *kemaslahatan* (bersifat umum), yang dimaksud disini adalah sesuatu yang membawa kenikmatan atau yang mengarah kepada kenikmatan (jiwa dan raga, duniawi dan *ukhrawi*), dalam hal ini lawan katanya adalah kerusakan (*mafsadat*);
- b. *Maşlahat Khaşşah*; yakni *kemaslahatan* yang bersifat khusus (bersifat pribadi), dan ini sangat jarang sekali, seperti *kemaslahatan* bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasakh* karena suaminya dinyatakan hilang. Menurut Kamaluddin Imam, sifat

⁴⁸Muhammad 'Iz ad-Din Abdul Aziz bin Abd as-Salam, *Qawa'id al-Ahkamfi Mashalih al-Anam*, Juz 1, t.t.p.,: al-Istiqomah, t.t., h. 12, didalam kitab ini dijelaskan pembagian *mashalah* kepada hakiki dan majazi, hakiki bermakna kelezatan/kenikmatan sementara majazi bermakna sebab-sebab adanya kenikmatan/kelezatan tersebut. Lihat pula Abd. Rahman bin Ahmad al-lji, *Syarah al-'Adhl ala Mukhtashar al-Muntaha*, Juz 2, ttp.,: al-Amiriyah, tt, h. 239

kekhususan dalam *maṣlahah* ini bergantung kepada prakteknya, hakikatnya *fasakh* nikah dalam kondisi seperti ini adalah umum diantara istri yang suaminya hilang.⁴⁹

Pengertian pertama ini tidak jauh berbeda dengan pengertian *maṣlahah* dari segi bahasa. Bila distmpulkan, mengandung arti sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.⁵⁰ Meskipun diakui bahwa *Maṣlahah* atau *istiṣlah* merupakan salah satu dari tertib sumber hukum yang *kehujahannya* masih diperselisihkan oleh ulama fiqh. Kalangan Zahiriyah, sebagian dari kalangan Syafi'iyah⁵¹ dan Hanafiah tidak mengakui *maṣlahah mursalah* sebagai landasan pembentukan hukum.⁵²

⁴⁹ Muhammad Kamaluddin Imam, *Ushulul Fiqh Al Islamy*, (Iskandariyah: Darul Matnu'at Al Jami'ah, h. 201-202

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Ushui Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2011, h. 325. Bandingkan M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Buian Bintang, 1967, h. 186

⁵¹ Moh. Mukri dalam bukunya *Benarkah Imam Syafi'l Menolak Maslahah?* Memberikan bukti bahwa meskipun kalangan ulama yang secara teoritis menolak konsep masalahah, ternyata pemikiran fikihnya membuktikan hal yang sebaliknya, yaitu menggunakan pertimbangan-pertimbangan masalahah dalam bidang ijtihad mereka. Ulama Syafi'iyah misalnya memandang boleh membedah perut seorang ibu yang sudah meninggal dengan tujuan mengeluarkan janin yang ada di dalamnya, apabila diduga kuat bahwa janin itu akan keluar dalam keadaan hidup, meskipun menurut *syara'* terdapat larangan mengganggu mayat. Bahkan ada ulama Syafi'iyah, sebagaimana beliau mengutip pendapat Yusuf Qardawi, yang memandang wajib melakukan pembedahan mayat dalam keadaan demikian karena hal itu merupakan upaya menyelamatkan orang hidup dengan menghilangkan bagian dari mayat seseorang. Li hat Moh.

Menurut hukum Islam, bahwa tujuan *syari'at* Islam (*maqâsid syarî'ah*) adalah mendatangkan *maṣlahah* dan menghindarkan bahaya, karena perceraian sangat dimungkinkan menimbulkan *muḍarat* kepada suami, istri, anak, dan harta bersama (gono gini), maka perceraian, oleh pemerintah dapat dipandang sebagai masalah *ḍarurat* karena tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Al-Hadiś. Hukum yang diterapkan berdasarkan *ijtihad* ini dapat berubah sesuai kondisi, selama perubahan hukum itu untuk *kemaslahatan* dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadiś, atau *maqâsid al-syarî'ah* berdasarkan *kaidah fiqhiyah*:⁵³

تغير الاحكام بتغير الاحوال والأزمنة

“Hukum dapat berubah disebabkan perubahan keadaan dan zaman”⁵⁴.

Diantara kaidah fikih yang juga bisa dijadikan dasar adalah:

Mukri, *Benarkah Imam Syafi'i Menolak Masalahah?*, Yogyakarta: Pesantren Nawaesea Press, 2010, h. 9-10

⁵² Satria Effendi, M. Zein, *Ushul fiqh*, Jakarta: Kecana, 2009, h. 150-151. Lihat pula Chaerul Umam, *Ushul Fiqih 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, h. 141

⁵³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Perkawinan Yang Tidak Dicatat Pemerintah: Pandangan Hukum Islam*, Jakarta GT2 dan GG Pas, h. 22.

⁵⁴ Menurut Syamsul Anwar, mengemukakan bahwa ada 4 (empat) syarat hukum dapat berubah: 1) Bila ada tuntutan untuk berubah; 2) Tidak menyangkut ibadah mahḍah (ibadah pokok); 3) Hukum itu tidak bersifat Qaṭ'i tapi bersifat ḍanni; 4) ada landasan syar'inya.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

“Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maṣlahah*)”.⁵⁵

Menurut Abdul Manan,⁵⁶ ada beberapa faktor yang menjadi alat atau faktor pengubah hukum, yaitu faktor arus *globalisasi*, faktor sosial budaya, faktor politik, faktor ekonomi, faktor iptek, pendidikan, hukum, dan supremasi hukum.

Ada pula yang menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai landasan berpendapat. Teori ini mengajarkan bahwa: “Apa yang tidak diperintahkan secara *eksplisit* dalam Al-Qur’an dan Al Hadiś dapat dibuat aturan yang mengharuskan berdasarkan *kemaslahatan* dan sekaligus menghindari *muḍarat*. Berdasarkan cara berfikir ini, pencatatan perkawinan dapat diwajibkan demi menjaga *kemaslahatan* suami, istri, dan anak-anaknya,”⁵⁷ karena dinilai bahwa perkawinan yang tidak tercatat lebih banyak mendatangkan *muḍarat* daripada manfaatnya.

3. Teori kebutuhan sebagaimana yang diungkap oleh Abraham Maslow. Menurut Maslow, kebutuhan

⁵⁵ Jalaluddin as-Suyūṭi, *al-Asybah wa an-Nazāir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), h. 176.

⁵⁶ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2005, h. 57.

⁵⁷ Fathurrahman Djamil, *Perkawinan Bawah Tangan dan Konsekuennya Terhadap Anak dan Harta*, Jakarta, GT2 dan GG Pas, Mei 2007, h. 38.

digambarkan sebagai sebuah *hierarki* atau tangga yang menggambarkan tingkat kebutuhan.⁵⁸ Kebutuhan-kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow tersebut dapat diaplikasikan kepada lima tingkat kebutuhan, sebagai berikut:⁵⁹

- a. Pemenuhan kebutuhan “*fisiologis*” antara lain dapat diaplikasikan dalam hal pemberian upah atau gaji yang adil dan lingkungan kerja yang nyaman;
- b. Pemenuhan kebutuhan “*rasa aman*” antara lain dapat diaplikasikan dalam hal pemberian tunjangan, keamanan kerja dan lingkungan kerja yang aman;
- c. Pemenuhan kebutuhan “*rasa memiliki dan kasih sayang*” antara lain dapat diaplikasikan dalam hal dorongan terhadap kerja sama, *stabilitas* kelompok dan kesempatan *berinteraksi social*;
- d. Pemenuhan kebutuhan akan “*penghargaan*”, dapat diaplikasikan dalam hal penghormatan terhadap jenis pekerjaan, *signifikansi aktivitas* pekerjaan dan pengakuan *public* terhadap *performance* yang baik;
- e. Pemenuhan kebutuhan “*aktualisasi diri*” antara lain dapat diaplikasikan dalam hal pilihan dalam *berkreativitas* dan tantangan pekerjaan.

Maslow memberi *hipotesis* bahwa setelah *individu* memuaskan kebutuhan pada tingkat paling bawah, *individu* akan memuaskan kebutuhan pada tingkat yang berikutnya.

⁵⁸ Jess; Gregory J. Feist (2010). *Teori Kepribadian: Theories of Personality*. Salemba Humanika. h. 331.

⁵⁹ James H. Donnelly, James L. Gibson dan John M. Ivancevich, *Fundamentals of Management*, (New York: Irwin McGraw-Hill, 1998). h. 274

Jika pada tingkat tertinggi tetapi kebutuhan dasar tidak terpuaskan, maka *individu* dapat kembali pada tingkat kebutuhan yang sebelumnya. Kebutuhan yang belum terpenuhi merupakan kunci utama dalam suatu proses *motivasi*, seorang *individu* akan terdorong untuk berperilaku bila terdapat suatu kekurangan dalam dirinya, baik secara *psikis*, maupun *psikologis*. *Motivasi* itu sendiri meliputi usaha, ketekunan dan tujuan.⁶⁰

Bila ditelaah lebih dalam, berbagai tingkat kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow di atas, sepenuhnya telah terakomodasi dalam konsep *maqâsid al-syarî'ah*. Bahkan, konsep yang telah dikemukakan oleh Al-Syatibi mempunyai keunggulan *komparatif* yang sangat *signifikan*, yakni menempatkan agama sebagai faktor utama dalam *elemen* kebutuhan dasar manusia; satu hal yang luput dari perhatian Maslow, seperti yang telah dimaklumi bersama, agama merupakan *fitrah* manusia dan menjadi faktor penentu dalam mengarahkan kehidupan umat manusia di dunia ini.

Dalam *perspektif* Islam, berpijak pada *doktrin* keagamaan yang menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup manusia dalam rangka memperoleh *kemaslahatan* di dunia dan di akhirat merupakan bagian dari kewajiban agama, manusia akan *termotivasi* untuk selalu *berkreasi* dan bekerja keras. Hal ini, pada akhirnya, tentu akan meningkatkan *produktivitas* kerja dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

⁶⁰ James H. Donnelly, James L. Gibson dan John M. Ivancevich, *Fundamentals of Management*, (New York: Irwin McGraw-Hill, 1998). h. 268

4. Teori Kebijakan Penegakan Hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief⁶¹ Bahwa nilai kepercayaan merupakan salah satu nilai atau kepentingan masyarakat yang perlu selalu dipelihara, ditegakkan dan dilindungi. Masyarakat yang aman, tertib dan damai diharapkan dapat dicapai apabila ada “saling kepercayaan” dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai kepercayaan inilah yang justeru menjalin hubungan harmonis kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebaliknya akan timbul kekacauan, ketidaktenteraman dan ketidakdamaian apabila nilai kepercayaan telah hilang, atau mengalami *erosi* dalam kehidupan bermasyarakat.

Dapat dibayangkan, betapa kacau dan tidak tenteramnya kehidupan bermasyarakat, yang apabila masyarakat tidak lagi mempercayakan penyelesaian masalah-masalah mereka kepada aparat-aparat/ badan-badan penegak hukum, tetapi justeru mencari penyelesaian lain kepada orang-orang atau pihak ‘di luar hukum’ yang mereka percayai atau bahkan ‘main hakim sendiri’.⁶² Oleh karenanya masalah cerai gugat bagi yang beragama (Islam) hanya dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama.⁶³

5. Teori UU No.1 Tahun 1974

Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum

⁶¹Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 6

⁶²Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 6

⁶³Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI,

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁶⁴ Artinya kita harus melihat secara menyeluruh dari isi pasal tersebut, dengan kesatu-paduan pasal tersebut harus dilaksanakan secara pasti, guna mendapatkan kepastian hukum.

Ketika suatu perkawinan hanya dilaksanakan sampai kepada batas Pasal 2 ayat (1) saja, maka akibat hukumnya adalah ketika terjadi persengketaan antara suami istri maka pasangan tersebut tidak bisa minta perlindungan secara konkrit kepada Negara, dalam hal ini minta putusan kepada Pengadilan. Hal ini terjadi karena perkawinan yang bersangkutan tidak tercatat secara resmi didalam administrasi Negara. Oleh karenanya maka segala *konsekuensi* hukum apapun yang terjadi selama dalam perkawinan bagi negara dianggap tidak pernah ada, bila tidak tercatat.

a. Perceraian

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak,⁶⁵ semakna dengan kata talak itu, adalah *al-irsâl* atau *tarku*, yang berarti melepaskan dan meninggalkan.⁶⁶ yaitu melepaskan tali perkawinan mengakhiri hubungan suami isteri. Talak bukanlah

⁶⁴ UU No. 1 Tahun 1974, *tentang Perkawinan*, Pasal 2 ayat (1) dan (2)

⁶⁵ QS.At-Talaq (65): 1-7; QS. Al-Baqarah (2): 229; QS. An-Nisa' (4):

⁶⁶ Said Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Pustaka Al-Husna, Jakarta, 1994, h.2; Lihat Zurinal & Aminuddin, *Ciputat*, Lembaga penelitian UIN, Jakarta, 2008

sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi; Sebagaimana HR. Abu Daud dari Ibnu Umar:

عن ابن عمر قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إن أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق . (رواه أبو داود)⁶⁷

“Dari Ibnu Umar, Rasulullah Saw bersabda: Talak, adalah merupakan perkara halal yang paling dibenci oleh Allah". (HR Abu Daud, dan dinyatakan sah oleh al-Hakim).

Secara yuridis, perceraian telah diatur dalam UU tentang perkawinan. Didalamnya dijelaskan bahwa “putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan”.⁶⁸

Kenyataan di atas, dapat dipahami bahwa putusnya perkawinan karena perceraian (cerai talak), adalah berbeda halnya dengan putusnya perkawinan karena (cerai gugat) atau karena kematian. Ditegaskan dalam Pasal 39 UU Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.⁶⁹ Dan

⁶⁷ Abu Al-Farij Ibn al-Jauzi, *al-'Ilalu al-Mutanâhiyah*, al-Mausû'ah, Arabiah, Juz 3, h.637; lihat; Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, h.158

⁶⁸ Pasal 38 UU No 1 tahun 1974 *tentang Perkawinan*

⁶⁹ Lihat Pasal 39 UU no. 1 tahun 1974 *tentang Perkawinan*

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menggunakan istilah cerai talak dan cerai gugat, hal ini dimaksudkan agar dapat membedakan pengertian yang dimaksud oleh huruf c pada Pasal 38 undang-undang tersebut.

b. Cerai Gugat dan Bentuknya

Cerai gugat, sebagaimana dikemukakan Sayyid Sabiq dalam bukunya: Fikih Sunnah mengungkapkan, bahwa dalam pelaksanaan-nya ada yang dengan tebusan atau *iwâd* dan ada juga tidak, ada yang karena pelanggaran *ta'lik* talak, juga karena percekcohan yang terus menerus, dan ada juga karena hal yang lain. Oleh karena itu, bentuk-bentuk perceraian ini dibagi kepada:

1) *Khulu'*

Khulu' merupakan suatu bentuk dari putusnya perkawinan, namun *khulu'* berbeda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan karena talak. Hukum Islam telah memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *khulu'* sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.⁷⁰ Dalam *khulu'* terdapat uang tebusan atau ganti rugi atau *'iwad* dan perceraian tersebut diminta oleh isteri kepada suami. Kata *Khulu'* diambil dari ungkapan خلع الثوب yang artinya, melepas baju. Karena secara kiasan, istri adalah

⁷⁰ Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Grup. 2003) h. 220

pakaian suami. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah (2): 187

...هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ ...

...“Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka...” (QS. Al-Baqarah (2): 187)

Definisi *khulu'* menurut syari'at adalah: berpisahanya suami dengan istrinya dengan tebusan harta (sebagai *iwâd*) yang diberikan oleh istri kepada suaminya.⁷¹ Definisi lain yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq adalah: Terjadinya perpisahan antara sepasang suami isteri dengan kerelaan dari keduanya dan dengan bayaran yang diserahkan isteri kepada suaminya.⁷² Sebagaimana disyari'atkan dalam firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 229

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا
 افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
 اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

⁷¹ Lihat, *Fiqhus Sunnah* (II/253), *Manaarus Sabiil* (II/226), *Fat-hul Baari* (IX/395), *Panduan Keluarga Sakinah* (hal. 297), *Terj. Al-Wajiz* (hal. 637), dan *Ensiklopedi Fiqh Wanita* (II/422).

⁷² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 3, h. 340

“jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya; itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”.

Ayat Inilah yang menjadi dasar hukum disyari’atkannya *khulu'* dan penerimaan *'iwâd*. Maksudnya, adalah permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut *'iwâd*.

2) *Fasakh*

Fasakh berarti putus atau batal,⁷³ hal ini terjadi dikarenakan sebab yang dikenakan dengan akad nikah (sah atau tidak sah) atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad. Dapat dipahami bahwa *fasakh* adalah rusak atau putusnya perkawinan melalui pengadilan yang hakikatnya hak suami-istri di- sebabkan sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung.⁷⁴ misalnya suatu penyakit yang muncul setelah akad yang menyebabkan pihak lain tidak dapat merasakan arti dan hakikat sebuah

⁷³ H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, Raja Grafindo, 2009, h. 195; lihat juga, Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 2*, Pustaka Setia, Bandung, h. 73

⁷⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 105

perkawinan. *Fasakh* disyari'atkan dalam rangka menolak kemudaratan dan diperbolehkan bagi seorang istri yang sudah *mukallaf* atau *baligh* dan berakal.

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsungnya akad nikah atau hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan,⁷⁵

Fasakh (batalnya perkawinan) karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah, misalnya:

- a). Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami;
- b) Suami istri masih kecil, dan diadakan akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa dia berhak meneruskan ikatan perkawinannya yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut *khiyar baligh*. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut *fasakh baligh*.

Fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad, misalnya:

- a) Bila dari salah satu suami istri *murtad* atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadannya belakangan;

⁷⁵ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003)
h. 142-143

b) *Fasakh* nikah diperbolehkan bagi seorang istri yang *mukallaf* (*baligh* dan berakal) kepada suaminya yang kesulitan harta atau pekerjaan yang halal, sebesar nafkah wajib ukuran minimal yaitu satu *mud* atau kesulitan memberikan pakaian wajib ukuran minimal yaitu pakaian utama yang harus dimiliki. Oleh karena itu *fasakh* tidak bisa dilakukan lantaran suami tidak bisa membelikan lauk pauk, meskipun makan tidak terasa enak.⁷⁶

3) *Syiqâq*

Syiqâq adalah perselisihan atau permusuhan yang berkepanjangan terjadi antara suami isteri, sehingga antara keduanya sering terjadi pertengkaran yang menjadikan keduanya tidak dapat dipertemukan (diselesaikan), dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya. Penyebab datangnya percekocokan dalam rumah tangga dapat berasal dari pihak laki-laki (suami),⁷⁷ juga dapat berasal dari pihak perempuan (isteri),⁷⁸ atau bisa juga berasal atau muncul dari kedua belah pihak.⁷⁹ Jika tidak segera diatasi, akibat yang lebih buruk dan fatal dapat mengakibatkan tali perkawinan menjadi putus dan keluarga berantakan, tidak

⁷⁶ Satria Effendi, *Problematisa Hukum Keluarga Islam dan Kontemporer*, (Kencana, Jakarta. 2004) h. 152

⁷⁷ Periksa QS an-Nisa' (4) ayat 128.

⁷⁸ Lihat QS an-Nisa' (4) ayat 34.

⁷⁹ Lihat QS an-Nisa' (4) ayat 35.

terkecuali anak-anak jika pasangan itu telah dikaruniai anak. Istilah *Syiqaq* dipahami dari al-Qur'an yang terdapat dalam (QS an-Nisâ' (4): 35)

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا
مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai (wali hakim) dari keluarga laki-laki, dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha teliti.”⁸⁰

QS. an-Nisâ' Ayat 35 tersebut merupakan kelanjutan dari ayat 34 yang menerangkan cara-cara suami memberi pelajaran kepada istri yang melalaikan kewajibannya. Apabila cara dalam ayat 34 telah dilakukan, namun perselisihan terus memuncak, maka suami hendaknya tidak tergesa-gesa menjatuhkan talak, melainkan mengangkat dua orang *hakam* yang bertindak sebagai juru pendamai.

⁸⁰ Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, 109

Pengertian di atas menunjukkan bahwa *syiqaq* terjadi apabila antara suami isteri tidak dapat lagi mencukupi kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin, sehingga dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan yang tiada akhir.

Menurut Imam Abu Hanifah, *hakam* adalah wakil, yakni orang yang mewakili pihak yang berselisih, baik dari pihak suami ataupun pihak istri. *Hakam* disini hanya bertugas mewakili pihak terkait untuk menyampaikan keinginan-keinginannya jika suami berkeinginan bercerai, *hakam* yang akan menyampaikannya. Demikian pula, jika *hakam* dari pihak istri berkeinginan berdamai, keinginan damai akan disampaikan kepada *hakam* pihak suami.

Secara *etimologis*, *al-hukmu* berarti *al-man'u* (yang mencegah) yakni yang mencegah dari kezaliman.⁸¹ Sedang Ibrahim Anis sebagaimana disebutkan oleh Ali Trigiyatno, menjelaskan bahwa *hakam* sebagai orang yang dipilih untuk memutuskan perkara diantara dua orang yang berperkara.⁸² Sedangkan *at-tahkim* berarti menjatuhkan hukum. Ar-Raghib menerangkan *hakam* pada asalnya berarti mencegah dengan sebenar-benarnya untuk memperbaiki.

⁸¹ Ibnu Faris, *Al-Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*, Cet. I, (Bairut: Dar al-Fikr, 1415/ 1994), h. 277

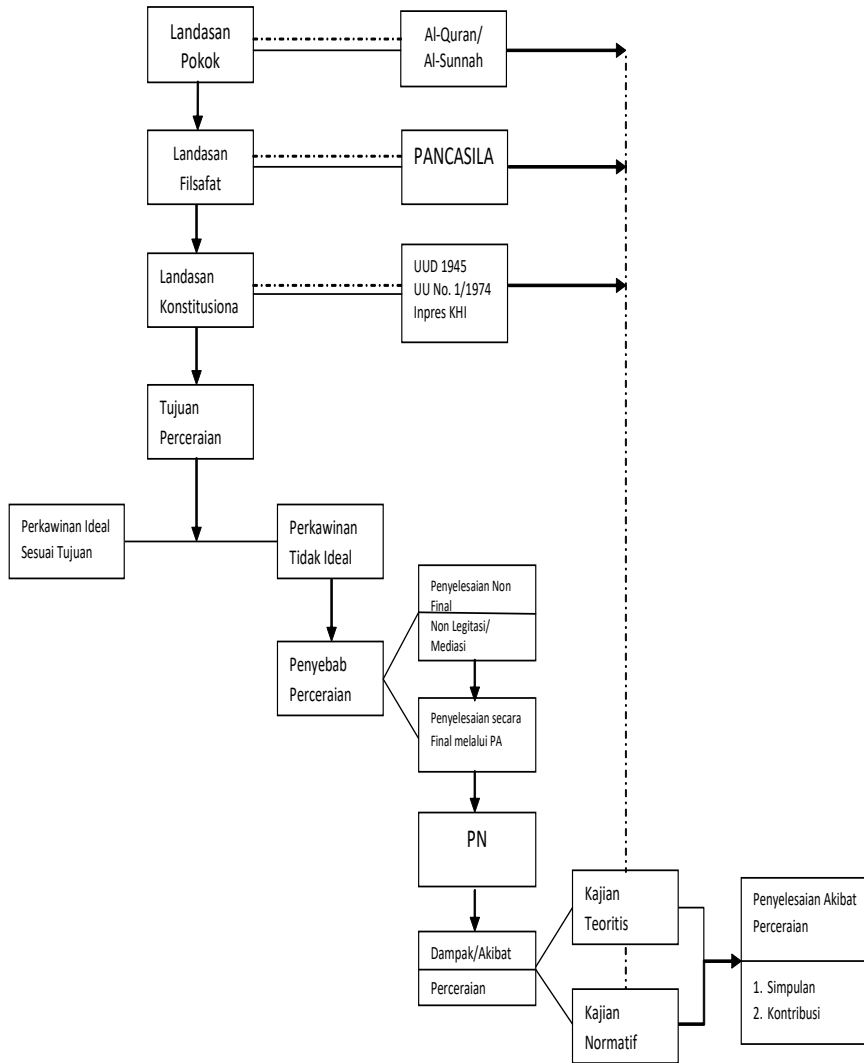
⁸² Ibrahim Anis dkk., *Al-Mu'jam al-Wasith*, Cet. II, (T.Tp.: T.Np, 1972), Juz I, hlm. 190; Lihat Ali Trigiyatno, *Penyelesaian problema Syiqaq Menurut Hukum Islam*, [http://ali3g.blogspot.com/2010/10/ penyelesaian-problematika-syiqaq.html](http://ali3g.blogspot.com/2010/10/penyelesaian-problematika-syiqaq.html), Akses 19 Nop 2014

Hakam bisa disebut kuasa hukum atau pengacara atau *advokat*. Kuasa hukum adalah orang yang menerima tugas dari pihak yang berperkara untuk melakukan berbagai tindakan hukum, baik dengan cara kekeluargaan maupun melibatkan pihak kepolisian dan pengadilan.

Mencermati pendapat yang dikemukakan tersebut, dapat diperoleh gambaran betapa banyak faktor penyebab terjadinya perceraian, dan besarnya penderitaan yang dialami seseorang atau kelompok orang yang menjadi korban sebagai dampak akibat terjadinya perceraian; terutama sekali yang dirasakan oleh pihak perempuan terutama isteri dari pihak pelaku, karena selain penderitaan *fisik*, mereka juga mengalami penderitaan *psikis* yang amat berat.

4) Tata cara Cerai Gugat

Sebagai gambaran sebab perceraian dan tata cara untuk mengajukan perceraian dalam lingkup Pengadilan Agama Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung, dapat diasumsikan lewat bagan/ *konstruksi* hukum penyelesaian gugatan perceraian sebagai berikut:



BAB II PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dan atau sering disebut pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Namun itu adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹ Menurut bahasa, nikah berarti peng-gabungan dan percampuran; bisa juga berarti menghimpun dan mengumpulkan.² Sedangkan menurut istilah *syara'*, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal;³ dan bisa juga diartikan menurut *syara'* ialah:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ نِكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ، وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ مَجَازٌ
فِي الْوُطْءِ عَلَى لَصِّحِيحٍ

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013, h. 6

² Hafizh Dasuki, “dkk”, *Ensiklopedi Islam*, Cetakan Pertama, Jilid 4, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1993, h. 32

³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, penerjmh. M. Abdul Ghoffar, E.M, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2004, h. 3; Lihat, M. Quraissy Syihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i, atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet.k6, Mizan, Bandung, 1997, h. 191

“Akad yang menjadi perantara diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan kata nikah, atau *tazwīj*, sedangkan nikah adalah makna hakikat didalam akad dan bermakna *majazi* dalam *waṭ’î*, hal ini menurut *qaul* yang *ṣahih*”.⁴

Sayyid Sabiq dalam bukunya “*Fiqh Sunnah*” mendefinisikan nikah sebagai berikut:

الرَّوْجِيَّةُ سُنَّةٌ مِنْ سُنَّةِ اللَّهِ فِي الْخَلْقِ وَالتَّكْوِينِ وَهِيَ عَامَةٌ مُطَرَّدَةٌ لَا يَسُدُّ عَنْهَا
عَالَمُ الْإِنْسَانِ أَوْ عَالَمُ الْحَيَوَانِ أَوْ عَالَمُ النَّبَاتِ

"Perkawinan adalah salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan".⁵

Keterangan tersebut, diperjelas dalam firman Allah QS. Az-Zâriyât, (51): 49 yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذَّارِيَّاتُ: ٤٩)

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah)”. (QS. Ad-Dzariyat (51): 49)

⁴.Fathul Mu'in Bisarkhi *Qurrotul 'Ain*, Bilma'na 'Ala Fesanteren, h. 97-98

⁵.Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, Dar Al-Fikr, Beirut Lebanon, h. 1

Kata nikah dalam al-Qur'an terkadang digunakan untuk menyebut akad nikah, tetapi terkadang juga dipakai untuk menyebut suatu hubungan seksual. Contoh menikah yang artinya akad nikah adalah firman Allah, QS. An-Nisâ' (4): 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا (النِّسَاءُ: ٣)

“Maka lakukanlah akad nikah dengan wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An-Nisa' (4): 3)

Contoh lain adalah firman Allah QS. An-Nisâ' (4): 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ
كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ (النِّسَاءُ: ٢٢)

“Dan janganlah kamu lakukan akad nikah dengan wanita-wanita yang telah melakukan akad nikah dengan ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.

Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh.”(QS. An-Nisâ’ (4): 22)

Kedua ayat di atas dipahami untuk mengurai dan mengartikan semata-mata untuk melaksanakan akad nikah (menikah), bukan berarti *al-waṭ-u* atau *al-jimâ’u* (melakukan hubungan seksual). Sedangkan contoh menikah yang artinya melakukan hubungan seksual ⁶ (*al-waṭ-u* atau *al-jimâ’u*) adalah sebagaimana difirmankan Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 230)

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾ (الْبَقَرَةُ: ٢٣٠)

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia melakukan hubungan seksual dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-

⁶ M. Quraisy Syihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i, atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet.k6, Mizan, Bandung, 1997, h. 191

hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” (QS. Al-Baqarah (2): 230)

Arti nikah pada ayat ini dapat dipahami maksudnya sebagai *al-waṭ-ʿu* atau *al-jimāʿu* (melakukan hubungan seksual), bukan dimaksudkan sebagai akad nikah. Seorang istri yang telah diceraikan suaminya yang pertama sebanyak tiga kali, dan sudah menikah dengan suami yang kedua, maka dia harus melakukan nikah (hubungan seksual) dengan suaminya yang kedua tersebut, kemudian diceraikannya, sebelum kembali kepada suaminya yang pertama. Jadi, senada dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad Bagir,⁷ bahwa melakukan nikah dengan suami yang kedua itu, tidak lain maksudnya adalah melakukan hubungan seksual.

Kedua makna nikah tersebut di atas, para Ulama berbeda pendapat dalam memahami makna yang *hakiki* dan makna yang *majāzi*. sbb:

Pendapat pertama (Mazhab Syafi'iyah) yang disahihkan oleh Abu Thayib, Mutawali dan Qaḍi Husain: bahwa nikah pada hakikatnya digunakan untuk menyebut akad nikah, dan terkadang dipakai secara *majāzi* untuk menyebutkan hubungan seksual. Ini adalah pendapat *ṣahih* dari mazhab Syafi'iyah,⁸

Pendapat kedua (Mazhab Hanafiyah): mengemukakan bahwa nikah pada hakikatnya dipakai untuk menyebut hubungan

⁷ Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqh Praktis Menurut Al-qur'an , As-sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Mizan, Bandung, Cetakan Pertama, 2002, h. 210

⁸ Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, h. 460

seksual. Tetapi kadang dipakai secara *majâzi* untuk menyebut akad nikah.⁹

Terkadang kata pernikahan disebut dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama; Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *kabul* (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.¹⁰

Nikah (اِنْكَاحٌ) berarti menghimpun atau mengumpulkan. Yaitu salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi.¹¹

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama mazhab Syafi'i

⁹Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Ala Madzahibi Al-Arba'ah*, Darul Hadis Al-Qahira, Juz 4, h. 7

¹⁰Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013, h. 7

¹¹Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* Jilid 4, Pustaka Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, h. 1329

mendefinisikannya dengan “akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu”. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan “akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan *syara*”.¹²

Menurut Muhammad Abu Zahrah nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong-menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.¹³

Ibnu Qudamah -*rahimahullaahu ta'ala*- mengatakan bahwa nikah menurut istilah *syar'i* adalah suatu akad perkawinan dan lafaz nikah secara mutlak mengandung pengertian tersebut selama tidak ada dalil yang merubahnya. Al-Qadhi berkata tentang adanya keserupaan dalam hakekat secara menyeluruh antara akad dan hubungan intim,¹⁴ sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah QS An-Nisâ' (4): 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ
كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

“dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya

¹² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, Ibid*, h. 1329

¹³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, Ibid*, h. 1329

¹⁴ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, (Kairo: Daar al-Hadis, 1425 H/2004 M), juz IX, h. 113.

perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)".¹⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miisâqan ghalîẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.¹⁶ Jadi, perkawinan dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Perkawinan dalam arti sempit yaitu akad yang menghalalkan hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan. Sedangkan perkawinan dalam arti luas yaitu akad atau ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

Pengertian Perkawinan menurut hukum adat, pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan berarti sebagai "perikatan perdata" tetapi juga merupakan "perikatan adat" dan sekaligus merupakan "perikatan kekerabatan dan ketetanggaan". Menurut Hilman, tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami

¹⁵ Dirjen Bimas Islam, Direktorat Uraisi dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, h. 105

¹⁶ Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 3.

isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri maupun pihak suami.¹⁷ Jadi, terjadinya perikatan perkawinan bukan saja semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan dengan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan sesama manusia (*mu'amalah*) dalam pergaulan hidup agar selamat dunia dan akhirat.

B. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut.

Al-Qur'an telah mensinyalir, bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk didalamnya adalah manusia. Pengaturan manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1977, h. 70

yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan tersendiri. Sebagaimana firman Allah Swt. QS. An-Nisâ' (4): 1

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia!, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan (*silaturrahim*). Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”¹⁸

Ditegaskan juga dalam QS. Ar-Rûm (30): 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,

¹⁸ Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, h. 99

supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rūm (30): 21)

Menurut para sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari *oksigen* dan *hydrogen*), listrik (positif dan negatif) dan sebagainya. Apa yang dinyatakan oleh para sarjana ilmu Alam tersebut sesuai dengan pernyataan Allah Swt sebagaimana difirmankan dalam Al-Qur'an. QS. Az-Zâriyât (51): 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
(الذَّٰرِيَّاتِ: ٤٩).

”Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah)”.

Dasar hukum perkawinan ini disusun berdasarkan sumber hukum Islam, yakni:

1. Menurut Al-Qur'an:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ

يَكُونُوا أَفْقَرًا ۗ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٦﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (masih membujang) ¹⁹ diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nūr (24): 32

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعِمَتِ اللَّهُ هُمْ
يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang *batil* dan mengingkari nikmat Allah?”. QS. An-Nahl (16): 72

¹⁹ Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin

2. Menurut Hadis:

Hadis Rasulullah Saw dari Abdillah, yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَحْدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ: مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.²⁰ (رواه البخاري)

”Dari ‘Abdillah bin Mas’ud berkata: Di zaman Rasulullah Saw, kami adalah pemuda-pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Rasulullah Saw berkata kepada kami, ‘Hai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah! Perkawinan itu melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup kawin, berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya’.” (H.R. Bukhari)²¹

²⁰ Mushtofa Muhammad Imarah, *Jawahiru Al-Bukhari*, Al-Hidayah, Surabaya, 1371, h. 422.

²¹ Zainuddin Hamidy, dkk, *Shahih Bukhari, Terjemahan Hadis Shahih Bukhari*, Jilid IV, Widjaya, Jakarta, h. 8

Sebuah hadis yang menunjukkan bahwa *Ijab* itu hak perempuan dan *Qabul* kewajiban laki-laki:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ
لَا وَلِيَ لَهُ²²

“Wanita manapun yang tidak dinikahkan oleh walinya maka pernikahannya tidak sah, beliau mengucapkannya tiga kali. Jika telah melakukan hubungan badan, maka wanita itu tetap berhak menerima mahar (maskawin) karena hubungan badannya itu. Jika mereka berselisih maka pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.” (H.R. Ahmad)

Berdasarkan keterangan naş di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan dalam hukum Islam diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis. Perkawinan yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung kepada tingkat maslahatnya. Meskipun perkawinan itu asalnya *mubah*, namun dapat berubah menurut kondisi dan keadaannya, sbb:

²² Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Bab La Nikah Illa Biwaliy, Juz V, Aplikasi Maktabah Syamilah, h. 486

a. Wajib

Yaitu pernikahan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) juga memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir dirinya melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan. Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib. Dan satu-satunya sarana untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina itu adalah menikah, menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan nikah, maka menikah menjadi wajib bagi orang yang seperti ini.

b. *Sunnah* (dianjurkan/ *az-zawaj al-mustahab*)

Yaitu pernikahan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis, tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina; memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu syahwat (tidak impoten), maka dia tetap dianjurkan supaya menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatan dirinya dan kemungkinan melakukan pelanggaran seksual, khususnya zina. dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena

membujang tidak diajarkan oleh Islam. Sebab, Islam pada dasarnya tidak menyukai pemeluknya yang membujang semur hidup;

Sebagaimana didasarkan pada hadis Nabi Saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.
(اخرجه مسلم في كتاب النكاح)²³

“Dari Abdillah berkata: Rasulullah Saw bersabda kepada kami, “hai para pemuda barang siapa diri kalian mampu untuk menikah, maka nikahlah, sesungguhnya nikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga farji (memelihara kehormatan/kemaluan); sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan ibadah puasa, sebab puasa dapat menjadi penawar nafsu sahwat”. (diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Nikah).

c. Haram

Yaitu pernikahan yang dilakukan bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan

²³ Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ṣaḥih Muslim*, (Beirut: Darul Kutub al-Alamiyah, tth), h. 593

kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri, serta nafsunya pun tidak mendesak, sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat untuk mencapai yang haram secara pasti, sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikah menjadi haram untuknya.

²⁴

Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah disyari'atkan dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan, dan penganiayaan; sebagaimana firman Allah dalam QS.Al-Baqarah (2): 195

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ...^{*}

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...”

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Khitbah, Nikah, dan Talak), (Jakarta: Amzah, 2009) h. 45

Selain keharaman tersebut di atas, Zakiah Daradjat²⁵ menambahkan haram pula hukumnya suatu pernikahan, apabila seseorang menikah dengan maksud untuk menelantarkan perempuannya, wanita yang dinikahi itu tidak diurus, hanya bermaksud agar wanita itu tidak dapat menikah dengan laki-laki lain.

d. *Makruh*

Yaitu jenis pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup memberi belanja isteri, meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis (lemah *syahwat*) meskipun memiliki kemampuan ekonomi (kaya), walaupun ketidakmampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan (merugikan) salah satu pihak khususnya istri. Jika kondisi seseorang seperti itu tetapi dia tetap melakukan pernikahan, maka pernikahannya (tidak disukai) karena pernikahan yang dilakukannya besar kemungkinan menimbulkan hal-hal yang kurang disukai oleh salah satu pihak.

e. *Mubah (ibâhah)*

Yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Pernikahan *ibâhah* inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan

²⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* Jilid II, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 47

oleh kebanyakan ulama' dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.²⁶

Menurut Sayyid Sabiq, bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.²⁷

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan bagi orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan, bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum *mubah* ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan pengahambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan nikah, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.²⁸

Uraian di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

²⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 91-93

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, PT. Alma'arif, Bandung, 1980, h. 22-25.

²⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010) h. 21

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun, merupakan sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti membasuh untuk wuḍu dan *takbîratu al-ihram* untuk ṣalat,²⁹ atau adanya calon pengantin laki-laki, dan calon pengantin perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat dalam ṣalat, atau menurut Islam, calon mempelai laki-laki/ perempuan itu harus beragama Islam. Sah adalah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.³⁰

Baik rukun maupun syarat, sebagaimana ditegaskan oleh khoiruddin Nasution, memang tidak seorangpun fuqaha konvensional yang secara tegas memberikan definisi rukun dan syarat perkawinan, bahkan fuqaha konvensional tidak menyebutkan mana syarat dan mana rukun.³¹ Namun diakuinya bahwa memang ada beberapa fuqaha yang menyebutkan unsur mana yang menjadi syarat dan unsur mana yang menjadi rukun perkawinan.

²⁹ Abdul hamid Hakim, *Mabâdi' Awwaliyah*, juz I, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, h. 9.; Lihat Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 45-46

³⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 46

³¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, ACAdemia, Yogyakarta, 2005, h. 29

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan;
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
3. Adanya dua orang saksi
4. *Sighat* akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat: Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

1. Wali dari pihak perempuan
2. Mahar (maskawin)
3. Calon pengantin laki-laki
4. Calon pengantin perempuan
5. *Sighat* akad nikah³²

Imam Syafi'i yang dikemukakan oleh al-Nawawi berpendapat bahwa, rukun nikah itu ada empat macam, yaitu:

1. Calon pengantin (laki-laki dan perempuan);
2. Wali (dua orang yang melakukan akad; yaitu wali/ wakil dan calon suami);
3. Dua orang saksi;
4. *Sighat* akad nikah (Ijab dan qabul).³³

³² Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy al-Maliki, *Qawânin al-Ahkâm al-Syar'iyah*, Beirut, Dâr al-'ilm li al-Malâyîn, 1974, h. 219

³³ Abi Zakariya Yahya al-Nawawi, edisi Syaikh 'Adil Ahmad Abd al-Maujud, *Rauḍah at-Tâlibîn*, cat.I, Beirut, Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1412/1992, h. 382-400; lihat, Zainuddin bin 'Abd al-'Aziz al-Malibâri, *Fathu al-Mu'in bi Syarh Qurratu al-'Ain* (Cirebon, al-Maktabah al-Miṣrîyah, t.t, h. 99

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya *ijab* dan *qabul* saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, sebagaimana terlihat di bawah ini:

1. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan;
2. Adanya wali;
3. Adanya saksi; dan
4. Dilakukan dengan sighat tertentu.³⁴

Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali, sama sekali tidak menyebut secara tegas tentang syarat dan rukun perkawinan. Pembahasan yang ada hanya statemen-statemen yang mengarah kepada rukun dan syarat perkawinan, seperti menyebutkan perkawinan sah bila ada wali dan saksi. Dasar hukum adanya keharusan wali dan saksi dalam perkawinan menurut Qudamah, adalah sabda Nabi yang mengatakan: “tidak ada perkawinan kecuali harus dengan wali”³⁵.

Jadi, yang dimaksud dengan syarat perkawinan disini ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan *ijab qabul*.

³⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 48-49

³⁵ Abi Muhammad bin Ahmad bin Qudamah. *Al-Mughni*, cet.1, Beirut, Dâr al-Fikr, 1404/1984, VII, h. 337-342

D. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Asas-asas dan/atau prinsip-prinsip perkawinan yang dimaksud disini adalah dasar-dasar atau norma-norma umum yang seharusnya dipegangi dan sekaligus diamalkan oleh pasangan dalam menempuh bahtera rumah tangga menurut hukum Islam.

Ada beberapa ayat al-quran yang berbicara sekitar prinsip-prinsip perkawinan, diantaranya: QS Al-Baqarah (2): 187, 228 dan 233; QS. An-Nisâ' (4): 9, 19, 32 dan 58; An-Nahl (16): 90; at-Talak (65): 7.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, Khoiruddin Nasution mengungkapkan, minimal ada 5 prinsip perkawinan:³⁶

1. Prinsip musyawarah dan demokrasi;
2. Prinsip menciptakan rasa aman, nyaman dan tenteram dalam kehidupan keluarga;
3. Prinsip menghindari dari kekerasan;
4. Prinsip bahwa hubungan suami dan isteri adalah sebagai partner;
5. Prinsip keadilan.

Selain 5 prinsip tersebut di atas, masih ada prinsip lain, diantaranya:

1. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya adalah diadakan *khitbah* (peminangan) terlebih dahulu untuk mengetahui

³⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, ACAdeMIA, Yogyakarta, 2005, h. 56

apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak;

2. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan;
3. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri;
4. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga tenteram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya;
5. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan, sebagaimana termaktub didalam penjelasan umumnya, sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.³⁷
2. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan

³⁷ Penjelasan Umum UU no 1 tahun 1974, butir 4.a

disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.³⁸

3. Undang-undang ini menganut asas monogamy. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.³⁹
4. Undang-Undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Sebab

³⁸ Ibid, butir 4.b.

³⁹ Ibid, , butir 4.c

batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.⁴⁰

5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.⁴¹ Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah N. 9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan non Islam.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.⁴²

Kalau kita bandingkan prinsip-prinsip dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan, maka dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsipil atau mendasar.

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari alqur'an dan alhadis, yang kemudian dituangkan dalam garis-

⁴⁰ Ibid, butir 4.d

⁴¹ Ibid, butir 4.e

⁴² Ibid, butir 4.f

garis hukum melalui undang-undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 mengandung 7 asas kaidah hukum yaitu sebagai berikut:

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
2. Asas keabsahan perkawinan di dasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus di catat oleh petugas yang berwenang;
3. Asas monogami terbuka;
4. Asas calon suami dan isteri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat sehingga tidak berfikir kepada perceraian;
5. Asas mempersulit terjadinya perceraian;
6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan isteri baik dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan masyarakat;
7. Asas pencatatan perkawinan.

E. Tujuan Perkawinan

Istilah yang dipakai para ahli dalam menyebutkan tujuan perkawinan, ada yang memakai **istilah tujuan**, ada juga yang memakai **istilah manfaat**, dan ada juga yang memakai **istilah faedah** serta ada pula yang menyebutnya dengan **hikmah perkawinan**. Demikian juga para ahli tidak sama dalam menyebutkan banyaknya tujuan perkawinan serta urut-urutannya. Dalam pembahasan ini dipakai istilah tujuan.

Menurut Khoiruddin Nasution, ada sejumlah ayat yang mengisyaratkan tujuan perkawinan, yang bila disimpulkan

akan tampak minimal lima tujuan umum.⁴³ Penetapan tujuan perkawinan didasarkan pada pemahaman sejumlah nas, ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw.

Sejumlah nas yang berbicara sekitar tujuan perkawinan itu:

1. Bertujuan untuk membangun keluarga *sakinah*;
2. Bertujuan untuk regenerasi dan/atau pengembangbiakan manusia (*reproduksi*), dan secara tidak langsung sebagai jaminan *eksistensi* agama Islam;
3. Bertujuan untuk pemenuhan *biologis* (seksual);
4. Bertujuan untuk menjaga kehormatan;
5. Bertujuan ibadah, yang dapat dipahami secara *implisit* dari sejumlah ayat al-Quran dan secara *eksplisit* disebutkan dalam hadis.⁴⁴

Disebutkan dalam QS. ar-Rūm (30): 21,⁴⁵ dalam hal ini tujuan perkawinan dimaksudkan agar terciptanya kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Begitu juga,

⁴³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, ACAdeMIA, Tazaza, Yogyakarta, 2009, h. 223

⁴⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan ...*, *Ibid*, h. 223-228

⁴⁵ Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. Lihat, Dirjen Bimas Islam, Direktorat Uraian dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, h. 573

disebutkan dalam QS. an-Nahl (16): 72,⁴⁶ QS.an-Nisâ' (4): 1, untuk tujuan regenerasi dan/atau penegembangbiakan manusia (*reproduksi*).⁴⁷ Dengan tercapainya tujuan reproduksi, maka tujuan memenuhi kebutuhan biologis, sebagaimana difirmankan dalam QS.al-Ma'arij (70): 29-31, Al-Baqarah (2): 187, 223 dan QS. an-Nûr (24): 33, akan dengan sendirinya tercapai, sekaligus terciptanya ketenangan dan cinta kasih dalam kehidupan keluarga.

Lebih lanjut tujuan perkawinan, adalah menjaga kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga, sebagaimana ditegaskan dalam QS.al-Ma'arij (70): 29-31, QS. al-Mu'minûn (23): 5-7, QS. an-Nûr (24): 33. Tujuan yang tidak dapat ditinggalkan dalam perkawinan dapat dipahami secara implisit dalam al-quran, bahwa salah satu tujuan hidup manusia adalah ibadah. Hal ini dapat dipahami dalam QS. al-Mu' minûn (23): 115,⁴⁸ QS. Az-Zâriyât (51): 56.⁴⁹

⁴⁶ Dan Allah menjadikan bagi kamu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah ?". Lihat, Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, h. 374

⁴⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia*, Op. Cit, h. 226; Lihat juga: Khoiruddin Nasution, *Hukum perkawinan 1*, ACAdemia, Tazzafa, Yogyakarta, 2004, h. 40.

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٦﴾

“Maka Apakah kamu mengira, bahwa Sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?” (QS. al-Mu'minum (23): 115).

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥١﴾

Sementara sunnah Nabi Muhammad Saw yang berbicara tentang tujuan perkawinan ialah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (أخرجه مسلم في كتاب النكاح) ⁵⁰

“Dari Abdillah berkata: Rasulullah Saw bersabda kepada kami, “hai para pemuda barang siapa diri kalian mampu untuk menikah, maka nikahlah, sesungguhnya nikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga farji (memelihara kehormatan/kemaluan); sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan ibadah puasa, sebab puasa dapat menjadi penawar nafsu sawat”. (diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Nikah).

ولكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأزفد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني .» (أخرجه البخاري ومسلم). ⁵¹

“ dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.

⁵⁰ Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ṣaḥih Muslim*, (Beirut: Darul Kutub al-Alamiyah, tth), h. 593

⁵¹ Abu as-Sa’ādât ibn Aśir, *Jâmi’u al-Uṣul min Ahâdîs ar-Rasûl*, Juz I, Multaqa ahlu al- hadis, h. 84; Lihat, Jalaluddin as-Suyutî, *Jamî’u al-Hadis*, al-Mausu’ah al-arabiyah,

“Aku sendiri berpuasa, berbuka, shalat dan tidur, dan menikahi wanita, seraya mengatakan, siapa yang benci sunnahku, maka orang tersebut tidak termasuk umatku”.

Beberapa hadis tersebut mempertegas dan memperjelas tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam al-Quran, yang menyatu dan terpadu (*integral* dan *induktif*), yang harus diletakan menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan, baik yang berhubungan dengan suruhan untuk menikah bagi pemuda-pemudi yang sanggup/ mampu, merupakan perintah dan anjuran dari agama yang sebagai bagian dari ibadah, juga terdapat unsur sosial kemasyarakatannya,

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan tidak dirumuskan dalam pasal tersendiri tetapi disebutkan dalam rumusan perkawinan, yaitu dalam Pasal 1 bahwa tujuan tersebut ialah “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵²

Dalam KHI, tujuan perkawinan disebutkan dalam Pasal 3 yaitu “untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”.⁵³ Tujuan ini ditarik dari firman Allah dalam QS. ar-Rūm (30) ayat 21.⁵⁴ Sekalipun secara

⁵² UU No. 1 Tahun 1974, *tentang Perkawinan*, Pasal 1.

⁵³ Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 *tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 3.

⁵⁴ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

redaksi berbeda, tetapi tujuan perkawinan menurut UU No. 1/1974 dengan KHI esensinya tidaklah berbeda, yaitu membentuk keluarga yang bahagia (*sakinah*) dengan dilandasi oleh *mawaddah wa rahmah*.

Secara eksplisit, ada sisi perbedaan tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. Dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan ialah: “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Berdasarkan UU Perkawinan tersebut, dapat diartikan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mencapai bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan definisi Sayuti Thalib yaitu: perkawinan adalah perjanjian kokoh dan suci antara seorang perempuan dan laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kasih mengasihi, tenteram dan kekal. Sedangkan definisi kekal itu diambil dari ajaran Katolik Roma, yang mengartikan perkawinan itu adalah sehidup semati. Namun bisa juga diartikan bahwa perkawinan itu harus ada kesetiaan antara pasangan suami dan istri.

Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Artinya perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam, Kristen, Budha, Hindu adalah sah menurut UU Perkawinan. Berbeda halnya menurut Pasal 4 KHI yaitu “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”. Artinya KHI lebih menekankan perkawinan dalam konsep hukum Islam, namun tetap didasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 1974.

F. Hikmah Perkawinan

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke-generasi seterusnya. Juga menjadi penyalur nafsu birahi yang halal, melalui hubungan suami istri yang sah, serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling tolong-menolong dalam wilayah kasih sayang, dan berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan.⁵⁵ Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi,⁵⁶ sebagaimana dikutip Abdul Rahman Ghazali, bahwa diantara hikmah-hikmah dari pernikahan adalah:

1. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses pemakmuran bumi yang dikerjakan bersama-sama akan berjalan dengan mudah;
2. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangganya tertib dan teratur;

⁵⁵ Syaikh Kamil Muhammad 'uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta:pustaka al-kaustar, 1998) h. 378

⁵⁶ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam)*, Penerjemah: Hadi Mulyo dan Sobahus Surur, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), h. 256-258; Lihat, Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 65-68.

3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan;
4. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan duka, penolong dalam mengatur kehidupan. Sebagaimana yang dikehendaki dalam firman Allah (QS. Al-A'râf (7): 189)

... وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ...

“...Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang (tenang) kepadanya...”

5. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak diharamkan untuknya;
6. Pernikahan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Didalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan;
7. Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik yang sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak;
8. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendo'akannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak.

Adapun hikmah yang lain dalam pernikahan, yaitu: ⁵⁷

1. Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan, serta memelihara nasab dengan baik yang memang sepenuhnya diperhatikan oleh Islam;
2. Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan (perbuatan maksiat) ;
3. Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara duduk-duduk dan bercengkrama antar suami isteri, saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak; menumbuhkan tali kekeluargaan dan mempererat hubungan; ⁵⁸
4. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaannya yang diciptakan, adanya pembagian tugas dan menimbulkan rasa tanggung jawab dalam mencukupi keluarga;
5. Dalam salah satu pernyataan PBB yang diberitakan oleh harian “National” terbitan Sabtu 6 Juni 1959, sebagaimana dikutip oleh Bukhori, mengatakan: ⁵⁹ “Bahwa orang yang bersuami istri umurnya lebih panjang umurnya, daripada

⁵⁷ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya:Gita Media Press, 2006) h. 10-12

⁵⁸ Slamet Abidin, dan H. Aminudin : *Fiqh Munakahat I*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999)

⁵⁹ M. Bukhori, *Hubungan Seks Menurut Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara,1994), h. 7-10

orang-orang yang tidak bersuami istri, baik karena menjanda, bercerai atau sengaja membujang.

G. Larangan dan Batalnya Perkawinan

1. Perkawinan yang dilarang

Larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan; yakni perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Secara garis besar larangan perkawinan antara seorang pria dan wanita, karena:

a. Larangan Perkawinan Karena Pertalian *Nasab*;

Larangan perkawinan ini, sebagaimana ditunjukkan dalam firman Allah (QS. An-Nisâ (4): 23):

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ
وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ
فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ

أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٧﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan ⁶⁰ ; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuanmu sesusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah

⁶⁰Yang dimaksud dengan ibu di awal ayat ini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak-anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke-bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut Jumhur Ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya. Lihat, Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, h. 106

terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Berdasarkan ayat di atas, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (halangan abadi) karena pertalian *nasab* adalah:

- 1) Ibu; yang dimaksud adalah perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan ke-atas, yaitu; ibu, nenek (baik dari pihak garis keturunan ayah maupun ibu, dan seterusnya ke-atas);
 - 2) Anak perempuan; yang dimaksud adalah perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke-bawah, yaitu: anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke-bawah;
 - 3) Saudara perempuan (adik/ kakak); baik se-ayah se-ibu, se-ayah saja, atau se-ibu saja;
 - 4) Saudara perempuan ayah atau ibu (bibi dari pihak ayah atau bibi dari pihak ibu); baik saudara sekandung ayah atau seibu;
 - 5) Anak perempuan dari saudara laki-laki atau anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan).⁶¹
- Sebagaimana difirmankan Allah (QS. An-Nisâ (4): 23), yaitu:

⁶¹ Zakiah Daradjat (*et al*), *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995, jilid 2, h. 65; Lihat, Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 105; lihat pula, Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid*, Beirut, Dâr al- Fikr, tt, juz.2, h. 24; Sayyid sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut, Dâr al-Fikr, 1983), cet.4, jilid 2, h. 62.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, ⁶² saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan...

b. Larangan Perkawinan karena hubungan Pertalian Kerabat (Semenda)

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan perkawinan (semenda) ⁶³ adalah sebagai berikut:

- 1) Ibu isterimu (mertua perempuan); termasuk juga nenek perempuan isteri, baik dari garis ibu atau ayah;
- 2) Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri (anak tiri)

⁶² Maksud ibu di awal ayat ini ialah, ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak-anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut Jumhur Ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya. Lhat, Dirjen Bimas Islam, Direktorat Uraisi dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, 106

⁶³ Pasal 39 ayat (2) *Kompilasi Hukum Islam*

- 3) Isteri-isteri anak kandungmu (menantu); termasuk juga isteri cucu;
- 4) Perempuan yang telah dinikahi oleh ayah (ibu tiri); tanpa disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ayah dan ibu.

Keharaman ini disebutkan dalam (QS. An-Nisâ (4): 23), dan QS An-Nisâ' (4): 22, yaitu:

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّنْ
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ
أَصْلَابِكُمْ ...

“Dan (diharamkan) atas kamu (mengawini) ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)...” (QS. An-Nisâ (4): 23)

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ...

“dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu...” QS An-Nisâ’ (4): 22.

c. Larangan Perkawinan Karena Hubungan Sesusuan

Hubungan sesusuan menjadikan orang mempunyai hubungan kekeluargaan yang sedemikian dekatnya. Mereka yang sesusuan itu telah menjadi saudara dalam pengertian hukum perkawinan ini, sehingga disebut saudara sesusuan; tetapi pendekatan ke-dalam saudara sesusuan, tidak menjadikan hubungan persaudaraan sedarah untuk terjadinya saling mewarisi.⁶⁴

Larangan perkawinan karena hubungan sesusuan ini berdasarkan firman Allah yang terdapat dalam kelanjutan (QS. An-Nisâ (4): 23), yaitu:

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ

“Dan (diharamkan) atas kamu (mengawini) ibu-ibumu yang menyusui kamu; dan saudara perempuan sepersusuan”.

⁶⁴ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974), h. 53.

Hadis yang terkait:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَاهُ فُلَانًا (لَعَمَّ حَفْصَةَ مِنَ الرِّضَاعَةِ) فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ ، قَالَتْ : فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرَاهُ فُلَانًا" (لَعَمَّ حَفْصَةَ مِنَ الرِّضَاعَةِ) فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا (لَعَمَّهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ) دَخَلَ عَلَيَّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَعَمْ" أَنَّ الرِّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ"

“Pada suatu hari Rasulullah berada di kamar Aisyah dan Aisyah mendengar suara seorang laki-laki meminta izin masuk di rumah Hafshah. Aisyah berkata: Ya Rasulullah, saya pikir si fulan (seorang paman susuan Hafshah). Kemudian Aisyah berkata: Ya Rasulullah, dia meminta izin masuk kerumahmu, kata Aisyah; maka Rasulullah menjawab: saya pikir yang meminta izin itu si fulan (seorang paman susuan Hafshah). Aisyah berkata: sekiranya si-fulan itu masih hidup (seorang paman susuan Aisyah, tentu juga dia boleh masuk tempatku)? Rasulullah menjawab: benar, sesungguhnya

susuan itu mengharamkan apa yang diharamkan lantaran hubungan keluarga.”⁶⁵

- d. Larangan pernikahan untuk sementara waktu (*Mahram Ghairu Muabbad*)

Mahram ghairu muabbad, yaitu larangan perkawinan yang berlaku hanya untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu; bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi. Larangan kawin untuk sementara itu berlaku dalam hal-hal seperti berikut:

- 1) Mengawini (menghimpun) dua orang bersaudara dalam satu masa

Keharaman mengumpulkan (menghimpun) dua orang wanita bersaudara dalam satu masa perkawinan itu, disebutkan dalam lanjutan firman Allah QS. An-Nisâ’ (4): 23

... وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ..

"

...dan diharamkan bagimu mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau...”

⁶⁵ Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadis 5*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2003), h.73; Lihat, Al Bukhary 52, h.7; Muslim 17, h. 1; Al Lu-lu-u wal Marjân 2, h.114; Ahmad Multazam, *Batalnya Perkawinan dan Larangan Pernikahan*, Blogspot.Com/2013/12/Batalnya-Perkawinan-Dan-Larangan.Html, Akses, 06 Feb 2015

Hadis yang terkait:

عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزٍ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَسَلَمْتُ وَ تَحْتِي أُخْتَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَلَّقْ أَيْتَهُمَا شِئْتَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارُ قُطَيْبِيُّ ، وَأَعْلَهُ الْبُخَارِيُّ

“Dari Ad-Dahhâk bin Fairuz Ad-Dailami, dari ayahnya r.a berkata, “Aku berkata, “Wahai Rasulullah, aku telah masuk Islam sedang aku mempunyai dua istri kakak beradik, maka Rasulullah Saw bersabda: “Ceraikanlah salah seorang dari keduanya yang kamu kehendaki.” (HR. Ahmad dan Al-Arba’ah, kecuali An-Nasâ’i. Hadis Şahih menurut Ibnu Hibban, Ad-Daraqutni, dan ma’lul menurut al-Bukhari)”⁶⁶

2) Poligami di luar batas (lebih dari 4 orang)

Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak menikahi empat orang, dan tidak boleh lebih dari itu, kecuali bila salah seorang dari istrinya yang berempat itu telah diceraikannya, dan habis pula masa iddahnya. Dengan begitu perempuan kelima itu haram dinikahnya dalam

⁶⁶ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam - Syarah Bulughul Marâm*, (Jakarta: Dârus Sunnah Press, 2013), h. 992.

masa tertentu, yaitu selama salah seorang di antara istrinya yang empat itu belum diceraikan.

3) Larangan karena Ikatan Perkawinan

Seorang perempuan yang sedang terikat dalam tali perkawinan, haram dikawini oleh siapapun. Keharaman itu berlaku selama suaminya masih hidup atau belum diceraikan oleh suaminya. Setelah suami mati atau ia diceraikan oleh suaminya dan selesai masa iddahnya, barulah ia boleh dikawini oleh siapa saja,⁶⁷ sepanjang tidak ada larangan lain yang menentukannya.

Keharaman mengawini perempuan bersuami itu, sebagaimana diungkap-kan dalam QS. An-Nisâ' (4): 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ ...

“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan,⁶⁸ (tawanan perang) yang kamu miliki. (Allah telah menetapkan

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 125-128

⁶⁸ Hamba sahaya dan perbudakan yang dimiliki dalam pengertian ini, yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya, seiring dengan perkembangan zaman, pada saat sekarang ini sudah tidak ada.

hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu”.

4) Larangan karena Talak Tiga (*bâ'in kubro*)

Perempuan yang ditalak tiga, haram menikah lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau wanita itu sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin, juga telah diceraikan oleh suami terakhir itu, serta telah habis masa 'iddahnya. Hadis Rasulullah yang terkait dengan ini, sebagai berikut:

وَرَأَى ابْنُ مَرْجٍ فِي رِوَايَتِهِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ:
لَا حَدِيثَهُمْ أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ، فَإِنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا ، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا
فَقَدْ حُرِّمْتُ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا
أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ. قَالَ مُسْلِمٌ : جَوَّدَ اللَّيْثُ فِي قَوْلِهِ :
تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً .⁶⁹

“Ibnu Ruhm menambahkan dalam riwayatnya: apabila Abdullah di tanya tentang hal itu (seorang suami yang menceraikan istrinya yang sedang *haid*), maka dia mengatakan kepada salah seorang

⁶⁹ Imam An-Nawâwi, *Ṣaḥih Muslim bi Syarh An-Nawawī*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 176

dari mereka (yang bertanya), “jika kamu menceraikan istrimu dengan talak satu atau talak dua, maka sesungguhnya Rasulullah Saw memerintahkan hal ini kepadaku; tetapi jika kamu menceraikan istrimu dengan talak tiga, maka mantan istrimu itu telah haram bagimu sampai dia menikahi lelaki selain kamu, dan engkau telah bermaksiat kepada Allah terkait dengan apa yang di perintahkan-Nya kepadamu dalam hal menceraikan istrimu.”

5) Larangan karena *Ihram*

Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram *umrah* maupun *haji*, tidak boleh dinikahi. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Usman bin Affan:

سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْكِحُ الْمَحْرَمُ وَلَا يَنْكِحَ وَلَا يَخْطُبُ . رواه مسلم⁷⁰

“Saya mendengar Uṣman bin Affan berkata: Rasulullah Saw bersabda: Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula

⁷⁰ Imam An-Nawâwi, *Ṣaḥih Muslim bi Syarh An-Nawawī*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 544

meminang” (Diriwayatkan Muslim dari Ustman bin Affan).”

6) Larangan Karena *Musyrik* (Beda Agama)

Yang dimaksud dengan beda agama disini adalah, perempuan muslimah dengan laki-laki *non* muslim dan sebaliknya. Dalam istilah fiqh disebut kawin dengan orang kafir.⁷¹ Keharaman laki-laki muslim kawin dengan perempuan musyrik atau perempuan muslimah kawin dengan laki-laki musyrik terdapat dalam QS. al-Baqarah (2): 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009) , h. 133

sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu". (QS. al-Baqarah (2): 221)

Ayat 221 QS. al-Baqarah tersebut, tidak menyebutkan beda agama, melainkan menyebut perempuan dan laki-laki musyrik. Sedangkan yang dimaksud perempuan musyrik menurut Abdul Rahman Ghozali,⁷² adalah “yang menyembah selain Allah”. Karena itu wanita *ahlu al-kitab* (wanita Nasrani dan wanita Yahudi) boleh dinikahi, berdasarkan Firman Allah dalam QS.al-Mâidah (5): 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang Ahli al Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal (pula) bagi mereka.

⁷² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 114

Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan ⁷³ diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya perempuan piaraan (gundik)”.

Hadis Terkait dengan larangan menikah beda agama, adalah:

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال عن النبي صلى الله عليه و سلم
قال : تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ , لِمَا لَهَا , وَلِنَسَبِهَا , وَلِجَمَلِهَا ,
وَلِدِينِهَا فَاطْفُرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبُّتٌ يَدَاكَ (رواه البخاري في كتاب
النكاح) .

“Dari Abi Hurairah r.a berkata, Rasulullah s.a.w bersabda: "wanita itu boleh dinikahi karena empat hal: 1) karena hartanya; 2) karena asal-usul (keturunan) nya; 3) karena kecantikannya; 4) karena agamanya. Maka

⁷³ Ada yang mengatakan perempuan-perempuan yang merdeka; Lihat, Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, 143

hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama Islam, (jika tidak), akan binasalah kedua tangan-mu (HR. Bukhari, dalam ‘Kitab an-Nikah’)

7) Larangan karena waktu *Iddah*

Perempuan yang sedang dalam waktu iddah, baik ‘iddah cerai maupun. ‘iddah ditinggal mati, berdasarkan firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 228 dan 234.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ...

“Dan para isteri yang diceraikan (wajib) menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.⁷⁴ Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka (merujuknya) dalam (masa) menanti itu, jika

⁷⁴ *Quru'* adalah jama' dari qar'u, yang berarti suci atau haid

mereka (para suami) menghendaki islah/perbaikan....” (QS. Al-Baqarah (2): 228 dan 234).⁷⁵

8) Istri yang putus perkawinan karena *li'an*

Menurut bahasa *li'an* diambil dari kata *la'ana* artinya laknat (kutukan). Maksudnya adalah laknat atau kutukan Allah kepada suami-istri yang saling bermula'ana^h atau saling kutuk yang lima kali mengucapkan kesediaan dilaknat oleh Allah.⁷⁶ Bisa juga berarti menjauhkan atau *al-ṭardu min al-khair* yang berarti pengusiran dari kebaikan atau dikeluarkan dari kebaikan, bisa juga isminya adalah *al-la'nah*, maka jama'nya adalah *li'ān, li'ānāt*.⁷⁷

Menurut istilah syara' *li'an* berarti sumpah seorang suami dimuka hakim bahwa ia berkata benar tentang sesuatu yang dituduhkan kepada istrinya perihal perbuatan zina, dengan tidak mengemukakan saksi, kemudian keduanya bersumpah atas tuduhan tersebut.⁷⁸ Atau dengan kata lain suami menuduh istrinya berzina, dengan

⁷⁵ Lihat, QS. An-Nisā (4): 34

⁷⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, h. 182

⁷⁷ Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufaṣṣal fī ahkāmī al-mar'ah wa al-bait al-muslim fī al-Syari'ah al-islamiyyah*, Jilid VIII: Muassasah Risalah Beirut, h. 320-321

⁷⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, h. 182; Lihat, Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 238-239

empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian yang kelima disertai persyaratan bahwa sang suami bersedia untuk menerima laknat Allah apabila ia berdusta atas tuduhannya.⁷⁹ Dalam redaksi yang berbeda, *li'an* ialah sumpah dengan redaksi tertentu yang diucapkan suami bahwa isterinya telah berzina atau ia menolak bayi yang lahir dari isterinya sebagai anak kandungnya, dan kemudian sang isteri pun bersumpah bahwa tuduhan suaminya yang dialamatkan kepada dirinya itu bohong.⁸⁰

Mencermati, arti *li'an* di atas, dapat dipahami bahwa, *li'an* adalah suami isteri yang saling menyatakan bersedia dilaknati oleh Allah setelah masing-masing suami isteri mengucapkan persaksian empat kali oleh diri sendiri yang dikuatkan dengan sumpah masing-masingnya, karena salah satu pihak bersikeras menuduh pihak yang lain melakukan zina, atau suami tidak mengakui anak yang dikandung/dilahirkan oleh isterinya sebagai anaknya sendiri, dan pihak isteri bersikeras pula menolak tuduhan suami sedang mereka tidak memiliki alat bukti yang diajukan kepada hakim.

⁷⁹ [http:// mbainayah.blogspot.com /2014/11/ fasakh-lian-ila- dan-dzihar.html](http://mbainayah.blogspot.com/2014/11/fasakh-lian-ila-dan-dzihar.html), Akses 18 feb 2015

⁸⁰ Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufaṣṣal fī ahkām al-mar'ah wa al-bait al-muslim fī al-Syari'ah al-islamiyyah*, Jilid VIII: Muassasah Risalah Beirut, h. 320-321

Dasar hukum pengaturan Li'an ini termaktub pada firman Allah QS. An-Nūr (24): 6-7

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ
فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
الصَّادِقِينَ

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar”. (QS. An-Nūr (24): 6)

وَالْخَمْسَةُ أَنْ لَعْنَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

“Dan (sumpah) yang kelima, bahwa laknat Allah akan menimpanya, jika dia termasuk orang yang berdusta” (QS. An-Nūr (24): 7).

81

⁸¹ Dimaksud dengan ayat 6 -7 QS. An-Nūr tersebut ialah: orang yang menuduh berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi, haruslah bersumpah dengan nama Allah empat kali, bahwa dia adalah benar dalam tuduhannya itu. Kemudian dia bersumpah sekali lagi, bahwa dia akan kena laknat Allah jika dia berdusta. Masalah ini dalam fiqh dikenal dengan li'an.

Terhadap tuduhan suami tersebut, istri dapat menyangkalnya dengan sumpah kesaksian sebanyak empat kali bahwa suami itu berdusta dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian yang kelima disertai pernyataan bahwa istri bersedia untuk menerima laknat/marah dari Allah jika suaminya memang benar dalam tuduhannya.⁸² Dengan terjadinya sumpah li'an ini maka terjadilah suatu perceraian antara suami istri tersebut dan keduanya tidak boleh terjadi perkawinan kembali untuk selama-lamanya.⁸³

2. Batalnya Perkawinan

Pada dasarnya suatu perkawinan dikatakan batal (dibatalkan) apabila perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat sesudah diajukan kepengadilan. Dalam memutuskan permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mempelai. Jika menurut agamanya perkawinan itu sah maka pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan.⁸⁴

Didalam Pasal 85 KUHPerdara berlaku asas pokok, bahwa tiada suatu perkawinan menjadi batal karena hukum. Pernyataan batal suatu perkawinan yang bertentangan dengan undang-undang disyaratkan adanya keputusan

⁸² Lihat, (QS. An-Nūr (24): 8-9)

⁸³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 238-240

⁸⁴ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), h. 83

pengadilan, keputusan yang demikian hanya boleh dijatuhkan dalam hal-hal yang diatur oleh undang-undang dan atas gugatan orang-orang yang dinyatakan berwenang untuk itu.⁸⁵

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan perkawinan, karena adanya syarat-syarat yang tidak dipenuhi menurut Pasal 22 Undang-undang perkawinan: yang menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan, bila para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan, namun bila rukun yang tidak terpenuhi berarti pernikahannya yang tidak sah.⁸⁶ Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak dapat memenuhi syarat-syarat perkawinan. Perkawinan dapat dibatalkan baik berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 atau berdasarkan KHI

Perkawinan dapat dibatalkan berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 Pasal 22, 24, 26 dan 27, serta berdasarkan KHI pasal 70 dan 71 sebagai berikut:

- a. Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 22);
- b. Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak

⁸⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta, Kencana: 2010), cet.ke-2, h.123

⁸⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 40

mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 24);

- c. Ayat (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri (Pasal 26 ayat (1));

Ayat (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah (Pasal 26 ayat (2));

- d. Ayat (1): Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 27 ayat (1));

Ayat (2): Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri (Pasal 27 ayat (2));

Ayat (3): Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan

haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur (Pasal 27 ayat (2));

Dalam Perspektif KHI, ditegaskan pada Pasal 70 KHI: bahwa Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'I;
- b. Seseorang yang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya;
- c. Seseorang menikahi istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian cerai lagi *ba'da dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Paal 8 UU No.1/1974, yaitu:
 - 1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
 - 2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - 3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/ayah tiri;

- 4) berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi/paman sesusuan;
- 5) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Ditegaskan juga pada Pasal 71 KHI bahwa, Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- 2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*;⁸⁷
- 3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lainnya;
- 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1/1974;⁸⁸
- 5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- 6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

⁸⁷ *Mafqud*; dimaksud dengan *mafqud* disini adalah suami yang menghilang tanpa kabar berita apakah dia masih hidup atau sudah meninggal.

⁸⁸ Pasal 7 UU no 1 tahun 1974, ayat (1) menetapkan bahwa: perkawinan hanya diizinkan, jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun; ayat (2): dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut Pasal 23 UU No. 1 /1974 dan Pasal 73 KHI, yaitu:

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Selain permohonan pembatalan perkawinan itu, Pasal 74 KHI juga mengatur tatacara beracara dalam permohonan pembatalan perkawinan, dan mengatur awal waktu keberlakuan pembatalan perkawinan dimaksud.

Pasal 74 KHI:

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan;
- (2) Batasnya suatu perkawinan setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang

tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan;

Walaupun sudah terjadi pembatalan perkawinan, mengenai anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut telah diatur dalam Pasal 28 ayat 2 UU perkawinan dan dalam Pasal 75 dan 76 KHI, yaitu:

Pasal 75 KHI

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- 1) Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad;
- 2) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- 3) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76 KHI;

Batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya.

H. Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

a. Perspektif Hukum Islam

Islam telah mengatur sedemikian rupa secara lengkap tentang masalah kehidupan manusia. Aturan-aturan tentang kehidupan manusia tersebut mengacu pada al-Qur'an sebagai aturan yang Allah SWT turunkan atau berikan

kepada manusia melalui rasul-Nya. Kemudian nabi saw memberikan penjelasan dan tafsiran mengenai ayat-ayat al-Qur'an tersebut secara lebih detail dan jelas, karena nabi saw adalah utusan Allah SWT. Segala bentuk perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh beliau saw menjadi sandaran hukum. Sehingga sumber utama kaum muslimin dalam menjalankan kehidupan ini yang utama adalah kedua hal tersebut (al-Qur'an dan sunnah).

Setiap masalah dan silang interaksi dengan manusia telah diatur di dalam kedua sumber hukum utama tersebut, termasuk di dalamnya adalah hukum tentang perkawinan. Amir Syarifudin (2007)⁸⁹ menjelaskan, hukum Islam yang mengatur tentang perkawinan atau pernikahan disebut dengan fiqh munakahat. Mengamalkan hukum yang diatur dalam fiqh munakahat merupakan bentuk ibadah karena diambil dari sumber hukum Islam Al Qur'an dan hadits. Melanggar hukum ini berarti melanggar pedoman yang ditetapkan Allah SWT.

Ketataan dan ketundukan umat Islam terhadap syariat Islam adalah mutlak hukumnya. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan rasul-Nya, menjalankan syariat dalam Islam juga bernilai pahala sementara yang meninggalkan atau mengabaikannya berarti dosa. Umat Islam percaya bahwa hanya dengan menjalankan seluruh perintah Allah SWT dan rasul-Nya tersebut, mereka akan mendapatkan ridho Allah, mendapatkan pahala dan

⁸⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* Cet. 2 (Jakarta: Kencana; 2007), hlm. 5.

terhindar dari dosa. Sehingga konsep ketaatan dan ketundukan tentang segala bentuk aturan hidup mengacu kepada hal yang paling utama dan pertama yaitu syariat. Sementara aturan-aturan atau konsep-konsep yang mengatur kehidupannya selain dari itu dianggap sebagai peraturan yang tidak sepenuhnya wajib ditaati. Artinya, mereka menganggap bahwa agama adalah hukum pertama yang harus dijunjung tinggi daripada peraturan perundang-undangan yang hanya dibuat oleh manusia.

Inilah masalah yang sering dihadapi di Indonesia dengan penduduk yang mayoritas muslim. Sebagai umat Islam, ketundukan dan kepatuhan terhadap hukum-hukum Allah SWT dan Rasul-Nya adalah sebuah kemutlakan. Di sisi lain, mereka juga harus tunduk terhadap aturan-aturan Negara yang mengatur terutama tentang masalah-masalah peribadatan mengingat perkawinan sejatinya juga merupakan ibadah dalam Islam. Ketaatan kepada syariat sebagai sesuatu yang mutlak dan memiliki konsekuensi khusus: terhindar dari dosa dan mendapatkan pahala bagi pelakunya. Sehingga apabila agama menyatakan keabsahan suatu tindakan hukum, maka masyarakat tidak perlu mempermasalahkannya karena tidak terikat dengan dosa. Sementara aturan-aturan Negara hanya memiliki konsekuensi sosial dan administratif bagi masyarakat yang tidak melakukannya. Atas kondisi ini, tak heran bila Khoirul Hidayah kemudian menyatakan bahwa terdapat

dualisme hukum di tengah masyarakat Indonesia⁹⁰. Di sinilah pentingnya KHI untuk mengakomodir kedua permasalahan hukum yang seolah-olah tidak menemukan titik temu tersebut.

Dualisme hukum ini tidak hanya berkaitan dengan keabsahan perkawinan, namun juga tentang syarat usia perkawinan. Di dalam Islam, tidak terdapat aturan yang jelas pada usia berapa seseorang dapat menikah. Jadi, meskipun masih di usia anak-anak bahkan balita sekalipun, akad perkawinan tetap sah. Para ahli fiqih sepakat bahwa seorang bapak berhak menikahkan anaknya, baik laki-laki maupun perempuan yang masih kecil⁹¹. Pendapat ini juga sejalan dengan Imam Abu Hanifah. Menurutnya, pernikahan anak yang masih kecil atas izin walinya adalah sah⁹².

Orang tua boleh menikahkan anaknya yang masih kecil dan hukumnya sah. Akan tetapi, bila sudah dewasa perempuan memilikihak untuk menolak, melanjutkan atau memutuskan ikatan per- kawinan tersebut. Hal ini merupakan salah satu hak-hak perempuan dalam Islam. Sebagaimana disebutkan oleh Asghar Ali bahwa pada saat menginjak usia dewasa (baligh), sang anak berhak untuk melanjutkan atau

⁹⁰ Khoirul Hidayah, *Dualisme Hukum Perkawinan di Indonesia* (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktek Nikah Sirri. Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 8, No. 1, Mei 2008, hlm. 89.

⁹¹ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al Qurthuby al Andalusy, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid Juz II* (Surabaya: Hidayah; TT), hlm. 5.

⁹² Abu Abdillah Muhammad bin Abdurrahman al Dimasyqi al Utsmani al Syafi'i, *Rahmah al Ummah fi Ikhtilaf al Aimmah* (Surabaya: Hidayah; TT), hlm. 27.

memutuskan ikatan perkawinan tersebut. Hal ini bersifat mutlak dan tidak ada seorang pun yang dapat mencampuri keputusannya itu, bahkan orang tua atau kerabat yang lainnya⁹³. Khoiruddin Nasution menambahkan bahwa hak untuk menentukan meneruskan perkawinan atau tidak tersebut selama belum terjadi hubungan seksual antara keduanya⁹⁴.

Di sini Islam menunjukkan bahwa kedewasaan itu sangat diperhatikan. Dalam Islam, ukuran kedewasaan itu adalah baligh. Baligh adalah kondisi seseorang yang sudah cakap untuk dipikulkan kewajiban hukum kepadanya karena sudah mengerti mana yang baik dan buruk untuknya. Terkait perkawinan, Islam memberikan hak penuh kepada anak yang sudah baligh untuk melanjutkan atau memutuskan perkawinannya. Dalam Islam, seseorang yang belum dewasa tidak dianggap cakap untuk berbuat hukum. Sebaliknya, anak yang sudah dewasa sudah mampu mengerti kebaikan dan keburukan sehingga cakap untuk berbuat hukum. Jadi, kedewasaan berkaitan pula dengan kemampuan, yaitu kemampuan untuk memposisikan diri berdasarkan perannya dengan melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan.

Mengenai kemampuan ini, Rasulullah SAW bersabda terkait perkawinan:

⁹³ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. diterjemahkan oleh Farid Wajidi dan Cici Farikha Assegaf, Cet 1 (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya; 1994), hlm. 94.

⁹⁴ Khoiruddin Nasution, Fazlur Rahman tentang Wanita (Yogyakarta: Tazaza; 2002), hlm. 229.

“Dari Abdullah bin Mas‘ud r.a.: sungguh telah berkata Rasulullah SAW kepada kami: „wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu yang telah mampu melakukan jima“, maka menikahlah. Barangsiapa yang tidak mampu menikah hendaknya berpuasa, karena puasa dapat mengekang hawa nafsunya” (HR. Bukhari).

Dalam hadist tersebut ada kata ‘al ba’ah’ sebagai kata penting yang berkaitan dengan pembahasan ini. Menurut pendapat yang pertama, kata tersebut memiliki makna etimologi, yaitu jima’ (maksudnya memiliki kemampuan berhubungan seksual). Sedangkan pendapat yang kedua mengartikan “al ba’ah” sebagai kemampuan ekonomi. Akan tetapi Imam Nawawi memiliki pendapat yang lebih masuk akal. Beliau berpendapat dengan menggabungkan dua pendapat di atas, yaitu bahwa seseorang yang telah mampu melakukan jima dan telah siap secara ekonomi, maka dia dianjurkan untuk menikah⁹⁵.

Menurut Ahmad Kosasih, hadits di atas menganjurkan para pemuda untuk menikah, yaitu bagi mereka yang telah sanggup melakukannya. Demikian ini adalah untuk menjaga mereka dari perlakuan seksual yang menyimpang. Dengan menjaga kesucian diri dengan menikah, mereka akan mendapatkan ketenangan jiwa yang sesungguhnya⁹⁶. Kalau melihat pendapat Ahmad Kosasih tersebut,

⁹⁵ Ahmad bin Ali bin Hajar al Asqalani, Fathul Bari bi Syarhi Shahih al Bukhary Juz 9 (Beirut: Dar al Ma‘rifah: TT), hlm. 108.

⁹⁶ Ahmad Kosasih, HAM dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat (Jakarta: Salemba diniyah; 2003), hlm. 88.

tampaknya kemampuan atau al ba'ah di atas artinya lebih dominan pada kemampuan melakukan hubungan secara seksual karena arahnya adalah untuk menjaga dari perilaku menyimpang atau maksiat.

Anjuran menikah bagi mereka yang sudah mampu dalam hadits di atas juga menjadi perdebatan di kalangan ahli fikih, apakah mereka yang sudah mampu secara seksual atau mampu secara ekonomi, meskipun banyak yang sependapat dengan Imam Nawawi bahwa artinya mampu kedua-duanya. Mengenai kapan waktu pelaksanaannya pernikahan, Asghar Ali (1994) menegaskan bahwa di dalam al-Qur'an sendiri sebenarnya tidak terdapat konsep perkawinan anak-anak. Al-Qur'an hanya menekankan bahwa perkawinan merupakan penyatuan laki-laki dan perempuan sebagai prokreasi dan hiburan di antara keduanya. Di sana tidak disebutkan perkawinan harus dilaksanakan dengan siapa dan kapan waktu pelaksanaannya⁹⁷. Artinya, tidak ada patokan usia perkawinan yang menjadi dasar larangan anak-anak untuk dinikahkan.

Perkawinan untuk anak-anak atau usia yang masih kecil ini didasarkan pada kisah perkawinannya Siti Aisyah r.a dengan Rasulullah saw yang menurut pemahaman kita terjadi pada usia enam tahun. Padahal menurut Maulana Umar tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pernikahan Rasulullah dengan Siti Aisyah terjadi pada saat Siti Aisyah berusia enam tahun. Maka dari itu, ia berusaha

⁹⁷ 44 Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam..., hlm.

membuktikan pernikahan Siti Aisyah terjadi pada usianya yang menginjak 16 atau 17 tahun⁹⁸. Meskipun, Muhammad al Amin mengutip pendapat Ibnu Syabramah, yaitu bahwa perkawinan Siti Aisyah r.a. di usia enam tahun tersebut tidak dapat dijadikan sandaran hukum karena dikhususkan bagi Rasulullah SAW, sebagaimana beliau boleh menikahi perempuan lebih dari 4 orang⁹⁹. Artinya, bila itu disandarkan kepada Rasulullah saw, ada hal-hal yang boleh dijadikan sandaran dan tidak dapat dijadikan ukuran.

Dalam kajian dan perkembangan hukum tentang pernikahan, usia menjadi pertimbangan penting dalam pembentukan keluarga yang kekal dan bahagia. Orang dewasa memiliki kematangan untuk dapat memikul tanggungjawab sebagai suami dan istri, baik secara biologis untuk keperluan melahirkan keturunan maupun secara psikis-sosial untuk hubungan rumah tangga suami-istri dan kemasyarakatan. Masalahnya adalah belum ada kejelasan definisi dewasa yang dianggap mampu mewakili sekian indikator karakteristik individual untuk menjalani masa berkeluarga. Secara biologis, seseorang dikatakan dewasa jika sudah mimpi bagi laki-laki, dan telah haid bagi perempuan. Namun, tanda-tanda dewasa atau baligh tersebut tidak menjamin adanya kemampuan seseorang dalam berpikir dan bersikap dewasa.

⁹⁸ 45 Maulana Ahmad Usmani, *Fiqh Al Qur‘an* Jilid I (Karachi: 1980), hlm. 533.

⁹⁹ 46 Muhammad al Amin bin Abdullah al Harary al Syafi‘i, *al Kaukab al Wahhaj wa Raudh al Bahhaj fi Syarhi Shahihi Muslim bin al Hajjaj*, Jilid 15 (Jeddah: Dar al Minhaj; 2009), hlm. 260.

Masalah kedewasaan ini tidak disinggung secara jelas dalam Islam, sehingga dalam perkembangannya banyak yang kemudian menjadikan faktor kedewasaan sebagai salah satu aspek penting dalam perkawinan. Ramulyo¹⁰⁰ misalnya, secara tegas mensyaratkan calon mempelai haruslah berakal dan baligh, yaitu mampu mempertanggungjawabkan suatu perbuatan dan mampu memerankan dirinya sebagai suami atau istri. Menurutnya, seorang laki-laki sudah dikatakan dewasa pada usia 25 tahun, sedangkan perempuan usia 20 tahun, atau minimal 18 tahun. Namun, usia nikah ini bukanlah batasan yang mutlak karena kedewasaan seseorang itu tergantung dari individu masing-masing dengan melihat pada kondisi fisik dan psikisnya.

Sulitnya menentukan ukuran dan batasan kedewasaan sebagai syarat penting dalam pernikahan tampaknya menjadikan Islam tidak sepenuhnya secara jelas mengatur masalah tersebut. Islam hanya menandakan seorang dikatakan dewasa bila sudah baligh, dengan ketentuan mimpi basah untuk laki-laki dan haid untuk perempuan. Akan tetapi, indikator tersebut tidak menjamin seseorang sudah dewasa secara psikis sehingga cakap dan mampu memikul tanggung-jawab suami-istri. Meski demikian, Soemiyati¹⁰¹ mengatakan bahwa umur tetap menjadi penentu kedewasaan seseorang. Menurutnya, untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, suami istri harus sudah matang jiwa dan raganya.

¹⁰⁰ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 51.

¹⁰¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 30.

Jika mengacu pada pendapat Soemiyati tersebut, kematangan jiwa dan raga menjadi aspek penting dalam perkawinan. Meskipun ukuran standar berapa usia yang cakap untuk dapat dikatakan dewasa masih dalam perdebatan, usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki dalam ketentuan UU No. Tahun 1974 belum dapat dikatakan memiliki kematangan jiwa dan raganya. Kalaupun ada anak di usia tersebut sudah mampu berpikir dewasa karena faktor lingkungan, dalam arti mampu dari aspek kejiwaan, tetapi secara biologis (jasmani), dia tetap anak-anak. Hal ini sangat berbahaya bagi perempuan, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksinya. Melerai perdebatan tersebut, kita dapat kembali mengacu pada hadits Nabi saw di atas, mengingat hadits adalah tafsir pertama tentang al-Qur'an yang kebenarannya langsung dari Nabi saw sebagai utusan Allah SWT. Dalam hadits tersebut 'al ba'ah' berarti adalah kemampuan untuk menikah, sehingga pendapat Imam Nawawi yang paling rasional dan diterima di sini, yaitu mampu secara biologis dan mampu secara psikis atau mampu jiwa dan raga. Sehingga umur tidak lagi menjadi bahan yang diperdebatkan sebagai patokannya, melainkan kemampuan jiwa dan raganya. Islam menjadikan patokan itu menjadi lebih luas dan dapat diterima dengan mudah.

b. Perspektif Hukum Positif

Dalam hukum positif, peraturan mengenai usia perkawinan akan terkait dan mempertimbangkan beberapa undang-undang atau aturan dalam pemerintah. Karena

menikah terkait dengan tanggung-jawab yang harus diemban oleh masing-masing pasangan. Di dalam pernikahan, ada hak tanggungjawab di antara keduanya, karena itu penentuan usia perkawinan menyinggung beberapa ketentuan sebagai pertimbangan.

1. UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sumber pertama dalam hukum positif adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia yang menetapkan bahwa seseorang hanya boleh menikah pada usia 21 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang ini, yaitu:

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua¹⁰².

Kemudian pada Pasal 6 ayat (2) UU ini mengindikasikan adanya peluang bagi calon mempelai yang hendak menikah di bawah umur 21 tahun, tetapi harus dengan izin orang tua. Selain syarat perizinan dari orang tua, Undang-undang Perkawinan membatasi usia minimal perkawinan, yaitu 16 tahun (DPR sudah merevisi menjadi 19 tahun) bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 berikut:

¹⁰² Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1.

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun¹⁰³.

UU tersebut memberikan batas minimum usia pernikahan yang harus dilalui oleh pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan. Namun, bagi mereka yang hendak melangsungkan pernikahan di bawah batasan minimal usia nikah tersebut, maka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Selanjutnya Pengadilan akan memproses permohonan tersebut dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangannya. Sejumlah alasan menjadi bahan pertimbangan penting pengadilan dalam mengambil keputusannya mengingat mereka yang hendak menikah masih terlalu dini dan belum ada kesiapan fisik dan psikis. Terkait dispensasi perkawinan ini, selanjutnya juga diatur dalam Pasal 7 ayat (2), berbunyi:

Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita¹⁰⁴.

Dari paparan di atas, kita melihat perbedaan yang begitu tajam antara hukum Islam (fikih) dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hukum Islam sebagai hukum

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

yang datangnya dari Tuhan lebih ditaati oleh masyarakat daripada hukum Negara. Hal ini karena hukum Islam memiliki efek di dunia dan lebih-lebih di akhirat sebagai konsekuensinya. Saat terjadi pelanggaran terhadap hukum Islam, pelaku akan dikenakan hukuman di dunia berupa ketidakberkahan dan akan disiksa di akhirat. Sedangkan hukum Negara sifatnya hanya keduniawian saja, sehingga masyarakat menganggapnya sebagai aturan yang konsekuensinya tidak terlalu berat.

Perbedaan aturan mengenai batasan minimal usia perkawinan antara hukum Islam dan hukum Negara ini tidak lantas membuat keduanya terlibat konflik di masyarakat. Amir Syarifudin berpendapat bahwa perbedaan kedua hukum yang sama-sama diakui di Indonesia tersebut tidak lantas menjadikan salah satu dari keduanya pincang. Akan tetapi, UU Perkawinan sebagai peraturan yang baru dilahirkan daripada fiqh munakahat, tidak pernah menyimpang dari hukum Islam. Apabila terdapat ketidaksamaan aturan, yaitu UU Perkawinan mengatur sesuatu yang tidak diatur di dalam fiqh, maka itu tidak lain ialah untuk kemashlahatan bersama. Contoh dalam hal ini ialah masalah batasan minimal usia perkawinan¹⁰⁵. Usia perkawinan dalam UU memang dibatasi dan dalam Islam tidak ada batasan, namun ada dispensasi pernikahan yang dapat ditempuh bila ada yang ingin menikah dibawah usia minimal tersebut.

¹⁰⁵ 52 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia... hlm.

2. Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Batasan usia dalam perkawinan juga disinggung dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang intinya juga tidak berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Batasan usia perkawinan ini dijelaskan dalam KHI pasal 15 sebagai berikut:

(Ayat 1) Untuk keselamatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

(Ayat 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974¹⁰⁶.

Dalam KHI, usia perkawinan dibatasi karena untuk menjaga keselamatan keluarga dan rumah tangga agar terwujud keluarga yang kekal dan bahagia. Menurut KHI, laki-laki di bawah umur 19 tahun dan perempuan di bawah umur 16 tahun dinilai belum cakap dalam membina kehidupan berumah tangga. Hal ini mengingat, membina mahligai rumah tangga membutuhkan kedewasaan, kecakapan dan kemampuan secara fisik

¹⁰⁶ 53 Instruksi Presiden Tahun 1991 Nomor 1

maupun piskis untuk menerima tanggungjawab sebagai suami istri.

Hal ini juga disinggung oleh Hilman Hadikusuma (2007)¹⁰⁷, menurutnya usia perkawinan perlu dibatasi dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih asyik dengan dunia bermainnya. Jadi, agar dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, maka calon mempelai laki-laki dan perempuan harus benar-benar telah siap jiwa dan raganya, serta mampu berpikir dan bersikap dewasa. Membatasi usia perkawinan ini juga untuk menghindari terjadinya perceraian dini, supaya melahirkan keturunan yang baik dan sehat, dan tidak mempercepat pertambahan penduduk.

Melihat sejumlah alasan mengapa usia perkawinan perlu dibatasi di atas, tampaknya melihat efek sosial-biologis dari seorang bila dilakukan tanpa melihat kecakapan dan kedewasaan usia. Secara sosial, batasan usia perkawinan untuk menghindari kurang dewasanya berpikir sehingga rentan terjadi perceraian dan pertambahan penduduk yang begitu cepat. Secara biologis, batasan usia perkawinan menjadikan seseorang terhindar dari lahirnya keturunan yang tidak sehat karena belum matang secara biologis dan kesehatan reproduksi.

3. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

¹⁰⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju; 2007), hlm. 48.

Perkawinan melahirkan sebuah keluarga baru dalam ikatan yang suci dan diakui oleh Negara. Di dalam keluarga, lahir pulalah tanggungjawab masing-masing suami dan istri menurut agama maupun Negara. Di dalam tanggungjawab itu, ada hak dan kewajiban di antaranya keduanya. Oleh karena itu, saat seseorang melakukan perkawinan, lebih-lebih di bawah usia yang telah ditetapkan, maka seseorang akan bersinggungan dengan hak asasinya yang diatur dalam undang-undang. Menurut Muladi (2005)¹⁰⁸, pada prinsipnya hak adalah sesuatu yang dapat dituntut secara sah oleh pemegang hak apabila tidak dipenuhi atau diingkari.

Definisi hak asasi manusia secara lengkap terdapat di dalam Ketentuan Umum UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, di antaranya ialah:

Pasal 1

Ayat 1

Hak asasi manusia dalam perspektif UU No. 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

¹⁰⁸ Muladi, Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat Cet. 1 (Bandung: Refika Aditama; 2005), hlm. 228.

Pasal 1

Ayat 3

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembelaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Pasal 1

Ayat 5

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pasal 1

Ayat 6

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk

aparatus Negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pada dasarnya, menikah adalah kebutuhan dasar setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagai kebutuhan dasar, maka orang lain tidak dapat menghalangi kehendak menikah seseorang, selama tidak terdapat pelanggaran-pelanggaran hukum. Terkait hal tersebut, pada Pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan:

Ayat 1

Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Ayat 2

Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami atau calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sinilah pentingnya menyinggung UU tentang HAM ini dalam perkawinan karena perempuan dan anak-anak seringkali menjadi korban pelanggaran HAM. Banyak kasus pelanggaran yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak sebagai kaum yang lemah seperti pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi sampai pada trafiking. Karena itulah, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia kemudian mengatur secara tersendiri hak asasi wanita dan hak asasi anak, yaitu yang dicantumkan pada bagian kesembilan untuk hak wanita dan bagian kesepuluh untuk hak anak. Bidang pendidikan, kesehatan reproduksi wanita dan pernikahan diatur dalam Pasal 48 dan 49 sebagai berikut:

Pasal 48

Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 49

Ayat 2

Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam

keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi repro- duksi wanita.

Ayat 3

Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Quraish Shihab (1992)¹⁰⁹, menambahkan bahwa untuk hak- hak yang setara antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam tiga bidang, yaitu dalam bidang politik, pemilihan profesi, serta hak dan kewajiban dalam belajar. Dalam kaitannya tentang batas minimal usia perkawinan di dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka menjadikan hak dan kewajiban perempuan untuk belajar mengarungi rumah tangga. Di dalam UU tersebut disebutkan bahwa batas minimal bagi perempuan untuk menikah ialah umur 16, sebagai batasan seorang anak menempuh jenjang pendidikan Sembilan tahun atau pendidikan tingkat menengah. Adapun anak laki-laki dalam hal pelaksanaan perkawinan masih mendapatkan peluang belajar sampai usia 19 tahun atau jenjang pendidikan tingkat atas.

Melihat perbedaan mengenai batasan tersebut, maka dalam perspektif HAM menyayangkan perempuan memiliki hak yang lebih sedikit dalam belajar daripada

¹⁰⁹ 56 M. Quraishy Syihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan; 1992), hlm. 275-279.

laki-laki. Dalam rumah tangga, laki-laki memang memiliki tanggungjawab besar untuk dapat memberi nafkah istri dan anak-anaknya, sehingga membutuhkan masa dan jenjang pendidikan yang lebih lama daripada perempuan. Pendidikan yang lebih lama akan membuat seorang lebih banyak memiliki peluang dan kemampuan untuk dapat mengemban tanggungjawab tersebut. Akan tetapi, istri adalah calon ibu bagi anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Ibu adalah sekolah non formal pertama bagi anak-anaknya. Ia memiliki peranan besar bagi pembentukan generasi dan sumber daya manusia yang berkualitas.

Secara simbolis, ibu mengacu pada pemeliharaan dan perlin- dungan sehingga anak-anak yang dikandung dan dilahirkan menjadi penegak agama Allah ¹¹⁰ . Pertanyaannya, bagaimana mungkin simbol ibu tersebut dapat dijalankan dengan baik apabila seorang ibu memiliki pengetahuan yang rendah daripada suami?. Oleh karena itu, Khoiruddin Nasution (2002) ¹¹¹ mengatakan bahwa untuk menguatkan dasar perubahan sosial, maka harus melakukan pembaharuan-pembaharuan dengan dasarnya ialah pendidikan dan kesempatan bekerja bagi kaum perempuan.

¹¹⁰ Lynn Wilcox, "Women and the Holy Quran: A Sufi Perspective", diterjemahkan DICTIA, Wanita dan Al Qur'an dalam Perspektif Sufi (Bandung: Pustaka Hidayah; 2001), hlm 139.

¹¹¹ Khoiruddin Nasution, Fazlur Rahman tentang Wanita (Yogyakarta: Tazzafa; 2002), hlm. 230.

Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anak generasi sebuah keluarga untuk menciptakan suatu perubahan sosial. Dengan pendidikan yang diberikan seorang ibu di dalam rumah tangga, anak-anak dapat dididik menjadi pribadi yang memiliki karakter-karakter yang diperlukan untuk melakukan perubahan sosial. Ibu yang mampu memainkan peran sebagai sekolah pertama bagi anak-anaknya adalah ibu yang sadar dan mengerti tentang pentingnya sebuah pendidikan bagi anak-anaknya. Tentu ibu seperti ini adalah mereka yang memiliki pengetahuan lebih tentang pendidikan atau setidaknya memiliki pendidikan lebih baik. Karenanya, perempuan sebagai seorang calon ibu dalam perkawinannya semestinya minimal memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam konteks batasan usia perkawinan.

Dalam batasan minimum usia perkawinan, perempuan memiliki hak-hak sebagai seorang anak, di antaranya ialah hak mendapatkan perawatan, pembimbingan, pendidikan, perlindungan, menikmati masa kanak-kanaknya secara wajar dan sebagainya. Hak-hak tersebut di antaranya disebutkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal-pasal berikut ini:

Pasal 55

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitasnya dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

Pasal 57

Setiap anak berhak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Ayat 1

Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.

Ayat 2

Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 61

Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebayanya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Pasal 64

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Dalam Islam, hak-hak asasi manusia juga dimuliakan dengan prinsip dasar bahwa manusia mempunyai hak-hak. Hak-hak dasar dalam Islam seringkali dalam beberapa hal mensyaratkan pemenuhan kewajiban terlebih dahulu sehingga lahirlah hak. Misalnya, dalam kebutuhan dasar, tubuh manusia memiliki hak-hak untuk dipenuhi seperti makan, pakaian dan tempat untuk tinggal sehingga ia wajib melakukan usaha untuk memenuhi hak-hak tersebut. Hanya saja, terkait pemenuhan hak-hak ini, Islam tampaknya berhati-hati dalam pemenuhannya. Artinya, hak-hak tersebut memiliki batasan-batasan dengan hak-hak orang lain juga. Pemenuhan atas hak kebutuhan hidupnya misalnya, terbatas oleh kepentingan-kepentingan orang lain. Karena itulah, dalam Islam terdapat ikatan-ikatan sosial yang berhubungan dengan hak dan kewajiban pribadi

terhadap orang lain dengan ibadah sosial. Misalnya, kerja sama, tolong menolong, dan ibadah-ibadah lainnya yang bersifat sosial.

Menurut Sidney Hook dkk, Hak Asasi Manusia dalam Islam (1987)¹¹², prinsip hukum Islam semacam ini lebih memilih kerugian yang kecil untuk mendapatkan keberuntungan yang lebih besar, serta mengorbankan sedikit keberuntungan untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Lebih lanjut, Hook menilai bahwa dalam hukum Islam dikenal dua hal yang berkaitan erat dengan aspek kehidupan, yaitu hak dan kewajiban. Pada umumnya, hukum Islam mengajarkan empat macam hak dan kewajiban bagi setiap manusia, yaitu¹¹³:

- Hak Tuhan yang wajib dipenuhi manusia. Hak-hak Tuhan yang wajib dipenuhi oleh manusia ialah diimani sebagai Tuhan Yang Esa, diikuti petunjuk-petunjukNya, ditaati dengan sesungguhnya dan disembah dengan penuh keyakinan.
- Hak manusia atas dirinya sendiri. Seorang manusia mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh dirinya sendiri. Hak-hak pribadi seseorang ini erat kaitannya dengan keadilan terhadap diri sendiri. Makna adil dalam hal ini ialah menjaga diri dari berbuat dzalim terhadap diri sendiri. Apa saja yang

¹¹² Sidney Hook dkk, Hak Asasi Manusia dalam Islam Cet. 1, diterjemahkan Harun Nasution dan Bahtiar Effendy (Jakarta: Pustaka Firdaus; 1987), hlm. 171.

¹¹³ Ibid, hlm. 173-190.

menjadi larangan syara“ pasti mengandung bahaya yang tidak baik bagi diri seseorang tersebut. Sebaliknya, perintah-perintah syara“ pasti mengandung manfaat bagi pelakunya.

- Hak orang lain atas diri seseorang. Setiap orang mempunyai kepentingan sendiri-sendiri dan berbedabeda. Harus ada keseimbangan antara hak individu dengan hak orang lain. Adapun yang menjadi cita-cita syari“at ialah terbentuknya masyarakat yang saling menghargai, tolong menolong, dan bekerja sama dalam membangun hubungan sosial demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Tidak ada sikap individualistik dalam hal ini.
- Hak semua makhluk. Segala sesuatu yang diciptakan Allah untuk manusia di dunia ini bebas untuk dimanfaatkan. Akan tetapi, kebebasan tersebut tetap ada batasannya, yaitu terbatas pada hak-hak fasilitas-fasilitas tersebut yang harus dihargai dan dipenuhi oleh manusia yang memanfaatkannya. Di antara hak-hak itu ialah tidak disia-siakan untuk hal-hal yang tidak perlu, tidak disakiti atau dirusak, atau dibiarkan dalam keadaan terancam.

Sedangkan K. Brohi menggolongkan hak-hak asasi manusia menjadi beberapa bagian, yaitu¹¹⁴:

- Hak hidup dan hak milik

¹¹⁴ 61 Ibid, hlm. 65-69.

- Hak berpendapat dan mengeluarkan pernyataan
- Hak untuk menegakkan amar ma“ruf nahi munkar
- Hak berkeyakinan dan berag ama
- Hak persamaan

Terkait menikah dan berkuarga, Kosasih kemudian memasukkan hak asasi tersebut ke dalam hak hidup dan hak milik. Menurutnya, kedua hal tersebut adalah naluri setiap manusia yang normal. Menikah bukan hanya sebagai wadah pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga wadah untuk mendapatkan ketenangan batin. Oleh sebab itu, setiap orang berhak mendapatkan ketenangan tersebut¹¹⁵. Artinya, ketenangan hidup merupakan hak setiap orang. Hal-hal yang berkaitan dengan cara mendapatkan ketenangan hidup mesti menjadi hak asasi manusia yang harus dihargai dan dipenuhi. Dalam hal ini, ketenangan hidup dapat diraih salah satunya dengan melakukan perkawinan dan membentuk keluarga yang bahagia.

¹¹⁵ 62 Ahmad Kosasih, HAM dalam Perspektif Islam, hlm. 86-87.

I. Salinan PERMA Nomor 5 Tahun 2019



SALINAN

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang;
- b. bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) menegaskan semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak;
- c. bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia, namun dalam keadaan tertentu Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan maka Mahkamah Agung dapat

mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59);
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1084);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan.
2. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan/atau ayah dan/atau ibu kandung dari calon suami/isteri.
3. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
4. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

5. Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.
6. Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
7. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mendampingi anak dengan tujuan agar anak merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan dan memahami akibat serta tanggungjawab dalam perkawinan.
8. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak.
9. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak.
10. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
11. Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Hakim mengadili permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan asas:

- a. kepentingan terbaik bagi anak;
- b. hak hidup dan tumbuh kembang anak;
- c. penghargaan atas pendapat anak;
- d. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- e. non-diskriminasi;
- f. kesetaraan gender;
- g. persamaan di depan hukum;
- h. keadilan;
- i. kemanfaatan; dan
- j. kepastian hukum.

Pasal 3

Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin bertujuan untuk:

- a. menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak Anak;
- c. meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan Perkawinan Anak;
- d. mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin; dan
- e. mewujudkan standardisasi proses mengadili permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 4

Peraturan ini berlaku terhadap permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perkawinan.

Bagian Kedua
Persyaratan Administrasi

Pasal 5

- (1) Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah:
 - a. surat permohonan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua/Wali;
 - c. fotokopi Kartu Keluarga;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran Anak;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
 - f. fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak.
- (2) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang

identitas dan status pendidikan Anak dan identitas Orang Tua/Wali.

BAB IV

PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PEMERIKSAAN PERKARA

Bagian Kesatu

Pengajuan Permohonan

Pasal 6

- (1) Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua.
- (2) Dalam hal Orang Tua telah bercerai, permohonan Dispensasi Kawin tetap diajukan oleh kedua Orang Tua, atau oleh salah satu Orang Tua yang memiliki kuasa asuh terhadap Anak berdasarkan putusan Pengadilan.
- (3) Dalam hal salah satu Orang Tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh salah satu Orang Tua.
- (4) Dalam hal kedua Orang Tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Wali Anak.
- (5) Dalam hal Orang Tua/Wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari Orang Tua/Wali sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 7

Dalam hal terdapat perbedaan agama antara Anak dan Orang Tua/Wali, permohonan Dispensasi Kawin diajukan pada Pengadilan sesuai dengan agama Anak.

Pasal 8

Dalam hal calon suami dan isteri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan Dispensasi Kawin untuk masing-masing calon suami dan calon isteri diajukan ke pengadilan

yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua/Wali calon suami atau isteri.

Pasal 9

- (1) Permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang.
- (2) Panitera melakukan pemeriksaan syarat administrasi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.
- (3) Dalam hal permohonan Dispensasi Kawin tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka panitera mengembalikan permohonan Dispensasi Kawin kepada pemohon untuk dilengkapi.
- (4) Dalam hal permohonan Dispensasi Kawin telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka permohonan Dispensasi Kawin didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara.
- (5) Pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan Dispensasi Kawin secara cuma-cuma (*prodeo*).

Bagian Kedua

Pemeriksaan Perkara

Pasal 10

- (1) Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan:
 - a. Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin.
 - b. Calon suami/isteri.
 - c. Orang Tua/Wali calon suami/isteri.
- (2) Dalam hal Pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah.
- (3) Dalam hal Pemohon tidak hadir pada hari sidang kedua, permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan gugur.
- (4) Dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari

sidang pertama, Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut.

- (5) Dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang kedua, Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut.
- (6) Dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang ketiga, permohonan Dispensasi Kawin tidak dapat diterima.
- (7) Kehadiran pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus pada hari sidang yang sama.

Pasal 11

- (1) Hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak.
- (2) Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan.

Pasal 12

- (1) Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri.
- (2) Nasihat yang disampaikan oleh Hakim, untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan:
 - a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
 - b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
 - c. belum siapnya organ reproduksi anak;
 - d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
 dan

- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.
- (3) Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan.
- (4) Dalam hal Hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

Pasal 13

- (1) Hakim harus mendengar keterangan:
 - a. Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin;
 - b. calon suami/isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin;
 - c. Orang Tua/Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin; dan
 - d. Orang Tua/Wali calon suami/isteri.
- (2) Hakim harus mempertimbangkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penetapan.
- (3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

Pasal 14

Dalam pemeriksaan di persidangan, hakim mengidentifikasi:

- a. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
- b. kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan Anak untuk melaksanakan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan
- c. paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan Anak.

Pasal 15

Dalam memeriksa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Hakim dapat:

- a. mendengar keterangan Anak tanpa kehadiran Orang Tua;

- b. mendengar keterangan Anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain;
- c. menyarankan agar Anak didampingi Pendamping;
- d. meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); dan
- e. menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan Anak, dalam hal dibutuhkan.

Pasal 16

Dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dengan:

- a. mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;
- b. memeriksa kedudukan hukum pemohon;
- c. menggali latar belakang dan alasan perkawinan Anak;
- d. menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan;
- e. menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan Anak untuk dikawinkan;
- f. memperhatikan perbedaan usia antara Anak dan calon suami/isteri;
- g. mendengar keterangan pemohon, Anak, calon suami/isteri, dan Orang Tua/Wali calon suami/isteri;
- h. mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);
- i. mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; dan

- j. memastikan komitmen Orang Tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak.

Pasal 17

Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan:

- a. perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan
- b. konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Pasal 18

Hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan ini.

BAB V

UPAYA HUKUM

Pasal 19

Terhadap penetapan Dispensasi Kawin hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.

BAB VI

KLASIFIKASI HAKIM

Pasal 20

Hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin adalah:

- a. Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

- b. Jika tidak ada Hakim sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2019

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1489

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH

BAB III

WALI DAN SAKSI DALAM PERKAWINAN

A. Wali Dalam Perkawinan

Perwalian adalah berasal dari bahasa Arab *Walâyah* atau *wilâyah* yaitu hak yang diberikan oleh syari'at yang membuat si wali mengambil dan melakukan sesuatu, kalau perlu secara paksa diluar kerelaan dan persetujuan dari orang yang diperwalikan.¹

Menurut Amin Summa, perwalian dalam literatur fiqh Islam disebut dengan *Al-walâyah* atau *al-wilâyah* seperti kata *addalâlah* yang juga disebut *addilâlah*. Secara etimologis mengandung beberapa arti yaitu cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-naşrah*) atau bisa juga berarti kekuasaan atau otoritas. Seperti dalam ungkapan al-wali yakni orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengurus sesuatu.²

Kamal Muchtar mengemukakan bahwa, yang dimaksud perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.³ Dalam Fiqh Sunnah dijelaskan bahwa wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya, wali ada yang khusus dan ada yang umum. Wali khusus adalah yang berkaitan

¹ Muhammad Bagir al-Habsy, *Fiqh Praktis*: (Bandung: Mizan, 2002), h. 56.

² Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo 2004), h. 134.

³ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 89.

dengan manusia dan harta bendanya.⁴ Menurut Syarifuddin yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.⁵ Sementara Abdur Rahman juga mengungkapkan tentang wali, yaitu pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah, dan yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.⁶ Sedangkan Muhammad Jawad mengungkapkan bahwa perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang Syar'ī atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri.⁷

Menurut Abdullah Kelib, wali dalam perkawinan adalah orang yang bertanggung jawab atas perkawinan yang dilaksanakan dibawah perwaliannya, sehingga perkawinan tidak dianggap sah apabila tidak terdapat wali yang menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria.⁸ Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ijab didalam perkawinan menurut Hukum Islam adalah wewenang wali semata-mata. Sehingga karena peranan wali yang mempunyai arti penting akan tetap dipertahankan apabila wanita itu tidak mempunyai wali nasab bisa digantikan kedudukannya oleh wali hakim.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7 (Bandung: Al-ma'arif, 1997), h. 11.

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 90.

⁶ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 165.

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Iqbal, 2001), h. 345.

⁸ Abdullah Kelib, *Hukum Islam*, Penerbit PT Tugu Muda Indonesia, Semarang, 1990, h. 11

Berpijak dari uraian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud wali nikah adalah orang yang mewakili perempuan dalam hal melakukan akad pernikahan, karena ada anggapan bahwa perempuan tersebut tidak mampu melaksanakan akadnya sendiri karena dipandang kurang cakap dalam mengungkapkan keinginannya sehingga dibutuhkan seorang wali untuk melakukan akad nikah dalam pernikahan.

B. Naş Tentang Wali dan Saksi dalam Perkawinan

Ada sejumlah naş Al-Qurân dan Sunnah dalam perkawinan. Naş Al-Qurân adalah QS. Al-Baqarah (2): 230, 231, 232, 235, 240, Ali ‘Imrân (3): 159, An-Nisâ’ (4): 25, 34, At-Ṭalâq (65): 2; Sementara sunnah Nabi Muhammad saw, diantaranya: hadiś yang termaktub dalam *Sunan Addâruqtñî*, bab ”Nikah” dengan redaksi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادٍ
النَّسَائِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « لَا نِكَاحَ إِلَّا
بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ »⁹

“ Abu Zâr Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr bercerita kepadaku dari Ahmad bin Husain bin ‘Abbad an-Nasâiy dari Muhammad bin Yazîd bin Sinân dari ayahnya dari Hisyâm bin ‘Urwaḥ dari ayahnya dari

⁹ Al-Imâm Sahnûn, bin Sâ‘id, al-Tanûkhî, *Al-Mudawwanah al-Kubrâ*, (Beirût, Dâr Şâdr, 1323.H), III, h. 178. Lihat juga al-Maktabah Asy-Syâmilah, *Sunan Addâruqtñî*, no 3580

‘Āisyah: ‘Āisyah berkata bahwa Rasūlullah saw bersabda “ Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil”.

Hadiś Rasulullah saw:¹⁰

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Hadiś ini menekankan adanya wali dalam pernikahan. Meskipun dalam al-Mudawwanah tidak menegaskan keharusan wali dalam perkawinan; antara kehadirannya dalam akad nikah atau cukup izinnya. Disatu sisi Imam Malik, menurut catatan Sahnūn menyuruh memisahkan perkawinan tanpa wali, sebagaimana ditulis oleh khoiruddin Nasution¹¹

C. Pandangan Ulama Mazhab tentang Wali

Hanafi mengatakan bahwa wali adalah sunnah hukumnya, olehkarenanya perkawinan tanpa wali (menikahkan diri sendiri), atau meminta orang lain di luar wali nasab untuk menikahkan gadis atau janda, sekufu atau tidak adalah **boleh**,¹² Dasar hukum Hanafi membolehkan perkawinan tanpa wali

¹⁰ Syamsyū Addin As-Sarakhsī, *Al- Mabsūt*, (Beirūt: Dār al-Ma‘rūfah, 1409/1989), V, h.149, lihat Abū Dāūd, “*Kitāb an-Nikāh*”, hadīś no. 1784, nat-Tirmīzī, “*Kitāb an-Nikāh*”, hadīś no. 1021

¹¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer, edisi revisi, ACAdemia, TAZZAFA, Yogyakarta, 2005, h. 70

¹² *Ibid*, h. 76-77.

adalah: QS. Al-Baqarah (2): 230,¹³ QS. Al-Baqarah (2): 232,¹⁴ QS. Al-Baqarah (2): 240.¹⁵ Akad dalam ayat ini disandarkan kepada wanita (*hunna*), yang berarti akad tersebut menjadi hak atau kekuasaan mereka. Olehkarennya akad nikah yang dilakukan oleh wanita dan segala sesuatu yang dikerjakannya tanpa menggantungkannya kepada wali atau izinnya **adalah sah**. Dengan kata lain Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan dirinya dengan meniadakan campur tangan orang lain, dalam hal ini adalah campur tangan seorang wali berkenaan dengan masalah perkawinan. Pertimbangan rasional logis inilah yang membuat Hanafi mengatakan **tidak wajibnya wali** nikah bagi wanita yang hendak menikah.¹⁶

Menurut mazhab Syafi'i wali merupakan masalah penting sekali dalam pembahasan nikah karena tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat bagi sahnya suatu nikah; dan pendapat mazhab Syafi'i inilah yang umumnya dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Lebih tegas lagi menurut **Syafi'i, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah**

¹³ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.....

“kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya, hingga Dia kawin dengan suami yang lain....”

¹⁴ ... فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ...

“..., Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya..”

¹⁵ ... فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْتُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ مَعْرُوفٍ ...

“..., Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka...”

¹⁶ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, h. 218-220.

perkawinan tidak sah.¹⁷ Dasar keharusan wali, dan sekaligus larangan wali mempersulit menurut **Syafi'ī**, adalah QS. Al-Baqarah (2): 232, QS. An-Nisâ' (4): 25¹⁸ Adapun dasar hadiś yang mengharuskan wali dalam perkawinan, sekaligus larangan wanita menikahkan dirinya sendiri, adalah hadiś Nabi riwayat Turmużi dari 'Aisyah yang menyatakan bahwa "Perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal (sampai tiga kali Nabi mengatakan nikahnya batal)".¹⁹ Selain itu ijab menurut lazimnya dalam suatu akad nikah diucapkan oleh wanita, jadi mempelai wanitalah yang menawarkan dirinya untuk dinikahkan dengan seorang pria. Oleh karena wanita fitrahnya adalah pemalu, maka ia harus diwakili oleh orang tuanya atau wakilnya yang bertindak sebagai wali nikahnya.

Menurut **maẓhab Hanbalī**, dalam al-Mughni, Ibnu Qudāmah dari maẓhab Hanbalī menyatakan, **wali harus ada dalam perkawinan** (rukun nikah), yakni harus hadir ketika melakukan akad nikah. Keharusan ini berdasarkan hadis nabi, bahwa dalam perkawinan harus ada wali.²⁰ Terhadap hadis yang dipegangi sejumlah ilmuwan, bahwa yang dipentingkan dalam perkawinan adalah izin wali, bukan kehadirannya. Oleh Ibnu Qudāmah menepis dengan mengatakan, bahwa hadis yang mengharuskan adanya wali bersifat umum yang berarti berlaku untuk semua, sementara hadis yang menyebut hanya butuh izin adalah yang bersifat khusus. Alasan tambahan, larangan nikah tanpa wali (perintah harus ada wali), bertujuan menghindari adanya kecenderungan dan keinginan wanita kepada pria yang kadang kurang pertimbangan yang matang, maka kehadiran wali

¹⁷ Muhammad Idris Asy- Syafi'ī, *al-Um*, edisi al-Muznī, (ttp, tt), V, h. 11, juga, h. 19

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ¹⁸

"... karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka...", "

¹⁹ Syamsy Addin As-Sarakhsī, *Al- Mabsūt*, V, Ibid, h.149,

²⁰ Abi Muhammad 'Abdīllah bin Ahmad bin Qudāmah, *Al-Mughni asy-Syarh al-Kabīr*, edisi I (Beirūt, Dār Al-Fikr, 1404/1984), VII, h.338

diharapkan dapat menghindari kecenderungan tersebut, demikian menurut Qudamah yang dikutip oleh khoiruddin Nasution.²¹

D. Konsep Perundang-undangan

Dalam perundang-undangan Perkawinan Indonesia, wali nikah menjadi salah satu rukun nikah, tanpa wali perkawinan tidak sah.²² Dalam KHI diringkaskan hanya menjadi empat persyaratan bagi wali, sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, Aqil dan baligh”. Sejalan dengan keharusan adanya wali, pada prinsipnya wali nikah dalam perundang-undangan adalah wali nasab. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu posisi wali nikah dapat digantikan wali hakim (lihat Pasal 22 KHI). Hal tersebut dimungkinkan bilamana:

- 1) Tidak ada wali nasab;
- 2) Tidak mungkin menghadirkan wali nasab (karena tidak ada di tempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat);
- 3) Tidak diketahui tempat tinggal wali nasab;
- 4) Wali nasab Gaib (Seperti: sedang berihram haji atau umrah);
- 5) Wali nasab menolak (adhal/ enggan menikahkannya);²³

²¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I, Op Cit*, h. 91

²² KHI Pasal 14 “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a) Calon Suami; b) Calon Istri; c) Wali nikah; d) Dua orang saksi dan; e) Ijab dan Kabul. Kemudian dipertegas lagi dalam KHI Pasal 19: “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Karen kedudukannya yang sangat penting dan menentukan, maka tidak sembarangan orang dapat menjadi wali nikah.

²³ KHI Pasal 23 ayat (1). Dalam hal wali *adhal* atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama (PA) tentang wali tersebut (Pasal 23 ayat (2)).

E. Aspek Psikologis dan Sosiologis

Bila disorot dari sudut pandang **Sosiologis dan psikologis**, wanita mempunyai kedudukan yang sama dengan pria, demikian juga dimata hukum. Namun kerendahan serta kekurangan wanita itu sendiri membuat mereka terbatas dalam bertindak, seperti halnya dalam perkawinan menurut agama Islam. Oleh sebab itu untuk mengetahui dan mengerti kedudukan wanita, selain mempelajari hukum dan peraturan yang berlaku kita juga harus mempelajari tentang kedudukan wanita dalam masyarakat dan keluarga.²⁴

Selain perbedaan dari segi fisik maupun psikis antara mereka, wanita oleh keluarganya dimisalkan sebagai perhiasan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya, yang nilainya sangat berharga, lebih berharga dari perhiasan dunia yang berbentuk harta benda. Oleh karena itu untuk melepaskan seorang anak perempuannya menuju suatu perkawinan, orang tua dalam hal ini adalah ayah ataupun wali lainnya yang berhak merasa berkepentingan untuk menyerahkan anak perempuannya tersebut dengan cara menjadi wali yang akan melakukan ijab dengan calon mempelai pria. Pentingnya wali bagi wanita dalam akad nikah, selain karena merupakan perintah agama juga disebabkan karena wanita adalah makhluk yang mulia, makhluk yang memiliki beberapa hak yang telah disyariatkan oleh sang pencipta dan mempunyai satu kedudukan yang dapat menjaga martabat, kemanusiaan dan kesuciannya, serta merupakan wujud cinta kasih seorang ayah atau keluarganya kepada anak perempuannya yang akan membina suatu rumah tangga. Bertitik tolak dari Firman Allah swt, Hadis Rasulullah dan realita yang ada dalam masyarakat

²⁴ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1989, h. 52.

seperti yang disebutkan di atas maka disimpulkan bahwa kedudukan dan tugas wali nikah adalah sangat penting artinya sekaligus mempunyai sifat menentukan didalam sah atau tidaknya suatu akad nikah.

Akan halnya dapat dipetik dari hak ijbarnya wali mujbir, yang berhak memaksa (ijbar) gadis dibawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki tanpa izin dari gadis yang bersangkutan, yang tentunya dengan pertimbangan dan syarat tertentu. Wali mujbir hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang paling besar rasa kasih sayangnya kepada perempuan dibawah perwaliannya. Keberadaan wali mujbir didalam hukum perkawinan Islam ialah atas pertimbangan guna kebaikan gadis yang akan dikawinkan, karena seringkali perempuan tidak pandai memilih jodohnya dengan tepat. Jika gadis dilepas untuk memilih jodohnya sendiri, dirasakan akan mendatangkan kerugian pada gadis di kemudian hari. Misalnya dari segi pemeliharaan jiwa keagamaanya dan lain sebagainya. Oleh karena itu wali mujbir yang mengawinkan perempuan gadis di bawah perwalian tanpa izin dari gadis yang bersangkutan disyaratkan:

1. Laki-laki pilihan wali harus kufu (seimbang) dengan gadis yang dikawinkan;
2. Antara wali mujbir dan gadis tidak ada permusuhan;
3. Antara gadis dan laki-laki calon, suami harus tidak ada permusuhan;
4. Calon suami harus sanggup membayar mas kawin dengan tunai;
5. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istri dengan baik dan tidak terbayang akan berbuat yang mengakibatkan kesengsaraan istri.

Syarat-syarat tersebut harus diperhatikan bilamana wali mujbir akan menggunakan hak ijbamya sehingga prinsip suka rela para pihak dalam melangsungkan perkawinan tidak terlanggar. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka gadis yang telah dikawinkan oleh walinya tanpa persetujuan dirinya terlebih dahulu maka ia dapat meminta fasakh, minta dirusakkan nikahnya kepada hakim.

Di dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi seseorang yang beragama Islam disebutkan bahwa, akad nikah dilakukan oleh wali atau diwakilkan kepada PPN atau Pembantu PPN atau orang lain yang menurut PPN atau Pembantu PPN dianggap memenuhi syarat.²⁵ Dalam Pasal 23 disebutkan bahwa waktu akad nikah, calon suami atau wali nikah wajib menghadap PPN atau Pembantu PPN, dan dalam keadaan memaksa kehadirannya dapat diwakilkan oleh orang lain yang dikuatkan dengan surat kuasa yang disahkan PPN atau kepala perwakilan Republik Indonesia bila berada di luar negeri.

Dengan adanya pasal-pasal tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 melalui PMA No.2 Tahun 1990 telah memberikan ketentuan tentang perlunya wali nikah bagi calon mempelai wanita. Hal ini menjadi sangat penting karena dengan secara tegas di dalam pasal tersebut di atas telah disebutkan bahwa wali sendiri atau wakilnya (dalam keadaan memaksa) yang melaksanakan akad nikah bagi mempelai wanita.

Kesemuannya itu menunjukkan suatu persamaan dengan ketentuan yang terdapat dalam Hukum Islam, yaitu bahwa wali adalah melaksanakan akad nikah bagi seorang wanita. Persamaan dan peraturan perundangan ini dengan

²⁵ Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1990

ketentuan yang ada dalam Hukum Islam lebih jauh lagi ditunjukkan dari ketentuan mengenai perwakilan bagi wali nikah, meskipun untuk mengakad nikahkan mempelai wanita pada dasarnya wali nikah sendiri harus hadir, namun apabila dalam keadaan memaksa hal tersebut dapat dimungkinkan untuk diwakili oleh orang lain. Maka dengan demikian perwakilan dalam wali nikah juga didapati dalam peraturan ini. Sehubungan dengan hal tersebut, maka terdapat peraturan lain sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan masalah wali nikah, yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 antara lain dalam Pasal 11 disebutkan bahwa setelah perkawinan usai, maka kedua mempelai menandatangani akta nikah yang kemudian juga ditanda tangani oleh PPN dan wali nikahnya atau yang mewakilnya. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, maka Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1952 tentang Wali Hakim dan Peraturan Menteri Agama No.4 Tahun 1952 tentang Wali Hakim untuk Luar Jawa Madura dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Di dalam Pasal 2 PMA No.2 Tahun 1987:

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim.;
2. Untuk menyatakan adhalnya Wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita;
3. Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya Wali dengan acara singkat atas permohonan calon

mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita.²⁶

Pasal 4 PMA No.2 Tahun 1987 menyebutkan:

- (1) Kepala KUA kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya masing-masing untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan ini;
- (2) Apabila di wilayah kecamatan, Kepala KUA kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen (baca: Kementerian) Agama Kabupaten/ Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk wakil/Pembantu PPN untuk sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya. Dengan demikian menurut PMA No.2 tahun 1987 apabila wali nasab tidak ada, tidak diketahui tempat tinggalnya, sedang menjalankan hukumannya, gâib, enggan untuk menikahkan, maka yang ditunjuk sebagai wali hakim yaitu semua Kepala KUA Kecamatan masing-masing diwilayahnya. Hal-hal tersebut di atas merupakan beberapa peraturan perundang-undangan dari Undang-Undang Perkawinan yang berkenaan dengan wali yang memberikan izin untuk melangsungkan suatu perkawinan sekaligus menikahkan mempelai menurut ajaran agama Islam.

Kedudukan wali sangat penting ini dapat dipahami karena sejak anak dalam kandungan hingga dilahirkan dan dibesarkan sampai ia menjadi dewasa, adalah menjadi tugas dan tanggungjawab bagi orang tua dan seorang anak banyak memerlukan pengorbanan dari orang tuanya, karena anak adalah merupakan amanah dan titipan dari Allah. Sehingga

²⁶ Pasal 2 Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim

sudah sepatutnyalah apabila seorang anak yang sudah dewasa dan hendak memasuki pintu gerbang kehidupan berumah tangga, haruslah mendapatkan izin dan restu dari orang tuanya dan tidak begitu saja meninggalkan orang tuanya, oleh karena itu pernyataan penyerahan mempelai wanita kepada mempelai pria, yang diucapkan oleh ayah dalam kedudukannya sebagai wali nikah didalam pelaksanaan acara ijab qabul, dapat dilambangkan sebagai akhir tugas yang berhasil dari orang tuanya, untuk memenuhi kebutuhan materiil dan spirituail anak gadisnya hingga menjadi dewasa dan siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga sendiri. Dan dengan selesainya ijab qabul tersebut maka saat itu jugalah tugas orang tua sudah beralih kepada suaminya. Jika kita dapat memahami keadaan tersebut di atas, maka kita dapat pula menyimpulkan bahwa dengan dipenuhinya terlebih dahulu syarat-syarat dan rukun perkawinan, sebelum perkawinan itu dilaksanakan, yaitu khusus dalam hal adanya izin, adanya doa restu dan adanya kesediaan wali calon mempelai wanita untuk melaksanakan ijab didalam akad nikahnya.

Kesemuanya itu membawa dampak **pengaruh psikologis** yang berat untuk berlangsungnya kebahagiaan didalam kehidupan rumah tangga yang bersangkutan. Karena seperti yang kita ketahui semua bahwa sebelum manusia memasuki pergaulan hidup dalam masyarakat luas, maka ia berada dalam lingkungan keluarga, dimana kemudian terjadilah pertumbuhan dari masa kanak-kanak hingga menjadi dewasa, didalam pertumbuhan tersebut baik anak laki-laki maupun anak perempuan, didalam dirinya berkembang pada hubungan batin dengan keluarganya yang makin lama makin menebal, sehingga dapat dikatakan bahwa seorang anak adalah merupakan pencerminan dari orang tua. Maka bagi gadis yang akan menikah membentuk rumah tangga dengan calon suaminya, ia tidak melepaskan diri dari ikatan batin dengan

orang tuanya, ia membutuhkan dorongan batin untuk memulai kehidupan baru bagi suami isteri, ia merasa memperoleh dorongan batin untuk memulai kehidupan baru sebagai suami isteri, ia merasa memperoleh kekuatan batin untuk melepaskan dengan orang tuanya, sekaligus memperoleh dorongan untuk membina rumah tangganya. Begitu pula bagi pihak suami, ia merasa bahwa orang tua si gadis telah menyerahkan si gadis kepadanya dengan penuh percaya, hal ini akan menimbulkan rasa percaya diri sendiri dan rasa tanggungjawab yang besar untuk bertindak sebagai suami yang bijaksana dan penuh pengertian. Hal-hal semacam inilah yang merupakan pengaruh psikologis yang besar artinya untuk mendorong terwujudnya rumah tangga yang kekal dan bahagia.

F. Saksi Nikah

Naş Al-Qurân, dalam QS. At-Thalâq (65): 2; menyintir masalah saksi dalam pernikahan.²⁷ Dapat dipahami bahwa saksi dalam pernikahan merupakan suatu keharusan yang menyebabkan sah tidaknya akad nikah. Meskipun demikian;

Imam Malik menyatakan bahwa keberadaan **saksi bukan merupakan suatu keharusan**, melainkan cukup dengan diberitakan atau asal pernikahan tersebut sudah diketahui oleh khalayak dipandang sudah sah. Senada dengan Imam Malik, **Abu Taur** dan mazhab Syi'ah menyatakan

فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلُ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ.....

27. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.....

bahwa pernikahan **dianggap sah dengan tanpa saksi**, sebab pada hakikatnya **pernikahan adalah akad** dan akad tidak memerlukan saksi.²⁸ Pendapat ini diambil setidaknya berdasarkan dua hal. **Pertama**, analogi terhadap jual beli. Allah dalam al-Qurân memerintahkan adanya saksi dalam jual beli, sedangkan saksi tidak diperintahkan dalam pernikahan.²⁹ Oleh karena itu, apabila saksi bukan merupakan syarat dalam sah jual beli, maka saksi lebih tidak disyaratkan dalam pernikahan. **Kedua**, adanya hadiś yang memerintahkan untuk memberitakan pernikahan. Hadiś tersebut adalah:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْلِنُوا النِّكَاحَ

Adanya perintah Rasulullah untuk memberitakan pernikahan dianggap merupakan esensi dari perintah adanya saksi. Dengan kata lain, adanya saksi bukan merupakan syarat sah nikah, melainkan hanya agar pernikahan tersebut diketahui oleh masyarakat. Apabila tujuan **diketahui oleh khalayak** tersebut telah terpenuhi, maka **saksi tidak lagi diperlukan**³⁰

Pendapat Imam Malik yang dengan gamblang tidak mensyaratkan saksi dalam pernikahan secara mutlak, namun

²⁸ M. Najib al-Muti'i, *Al-Majmu' Syarh al-Muḥaḍab li al-Syairozi* (Jeddah: Maktabah al-Irṣād, tt) h. 296. Lihat juga dalam Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz IX (Beirut: Dār al-Fikr, 2002) h. 6559

²⁹ Ayat-ayat pernikahan berikut tidak mencantumkan saksi,:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ , وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ . .

³⁰ Lihat. Keterangan dalam al-Maktabah asy-Syāmilah, *Tuhfaḥ al-Ahwaḍi*, Bab Pernikahan Tanpa Saksi, juz III, h. 131

mayoritas ulama Malikiyah justru berpegang pada pendapat bahwa saksi merupakan syarat, hanya saja hakikat saksi bukan sebagai syarat sah nikah, melainkan syarat agar diperbolehkan menggauli istri.³¹ Dengan demikian, akad pernikahan yang dilaksanakan tanpa saksi hukumnya adalah tidak sah. Pendapat ini berdasarkan pada beberapa hadiś yang telah secara jelas menyebutkan disyaratkannya saksi dalam nikah. Diantara hadiśtersebut ialah:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ، الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكَحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ
dan لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ

“Tidaklah dipandang sah nikahnya seseorang, tanpa persetujuan wali dan tanpa saksi yang adil, Sia-sialah orang yang menikahkan dirinya tanpa jelas dan atau tanpa izin dari walii.... Dan tidak boleh tidak (diharuskan) dalam pernikahan itu dihadirkan empat orang: wali, Calon Suami dan dua orang saksi”

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa, saksi diharuskan hadir ketika akad nikah, dan tidak cukup hanya dengan diberitakan saja. Menurut mereka, pernikahan merupakan hal³² yang berbeda dengan jual beli. Tujuan dari jual beli adalah harta benda, sedangkan tujuan pernikahan adalah memperoleh

³¹. Lihat dalam: Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*. Juz IX. Beirut: Dâr al-Fikr. 2002, h. 6560

³²Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, (Kairo: Dâr al-fatah. 1995), h. 48.

kenikmatan dan keturunan. Oleh karena itu, harus dilakukan dengan hati-hati dengan cara menghadirkan dua saksi.

Pendapat di atas memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Menurut pendapat pertama, apabila ada suatu pernikahan dengan dihadiri saksi, namun kedua belah pihak sepakat meminta saksi untuk merahasiakan pernikahan mereka, maka pernikahan dianggap sah, meskipun makruh. Sedangkan menurut pendapat kedua, imam Malik, pernikahan tersebut dianggap tidak sah. karena.³³ Esensi dari pernikahan itu tidak mengharuskan saksi, melainkan keharusan untuk diberitakan atau pernikahan tersebut sudah diketahui oleh khalayak.

Terkait dengan persyaratan adanya saksi dalam pernikahan, **ulama sepakat** memberikan kriteria bagi orang-orang yang dijadikan saksi: (1) Islam, (2) Akil balig, (3) Berakal, (4) Mendengar rangkaian kalimat akad dan memahaminya. Dengan demikian, anak kecil, orang gila atau mabuk dan non Muslim tidak dapat diterima persaksiannya.³⁴ Sehubungan dengan kriteria bagi saksi nikah, status saksi sebagai seorang yang adil masih menjadi perdebatan dikalangan ulama. **Ulama Hanafiyah** berpendapat bahwa saksi tidak harus orang yang adil.³⁵ Siapapun yang berhak menjadi wali nikah, maka ia juga berhak menjadi saksi. Menurut kriteria ini, pernikahan dengan dua saksi yang fasiq dihukumi sah. Sebaliknya, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan

³³ M. Najib al-Muti'i, *Al-Majmu'*, Op Cit, h. 297

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, Op Cit, h. 50. Lihat juga dalam Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*. Op Cit, h. 6562 dan M. Najib al-Muti'i, *Al-Majmu'*, Op Cit, h. 296

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*. Op Cit, h. 76

bahwa merupakan syarat bagi saksi haruslah orang yang adil, sebagaimana tersebut dalam hadis³⁶

Terlepas dari status adil maupun tidak, mazhab **Syafi'i dan Hambali** menyatakan bahwa dua orang yang menjadi saksi harus laki-laki. Dengan demikian, persaksian seorang laki-laki dan dua orang wanita tidak dapat diterima dalam pernikahan.³⁷ Pendapat ini berdasarkan pada hadis nabi: "أَنْ لَا يَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ، وَلَا فِي النِّكَاحِ، وَلَا فِي الطَّلَاقِ". Sedangkan ulama **Hanafiyah** berpendapat bahwa persaksian satu orang laki-laki dan dua orang perempuan diperbolehkan. Pendapat ini berangkat dari persepsi bahwa saksi pernikahan sama dengan saksi dalam jual beli (harta benda). Oleh karena perempuan dapat dijadikan saksi dalam masalah harta benda, maka ia juga dapat menjadi saksi pernikahan.³⁸

Ketentuan KHI mengenai saksi termaktub dalam Pasal 24 yaitu: (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun dari pelaksanaan akad nikah; (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Pasal 25 KHI menentukan syarat-syarat "Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli". Dan merupakan suatu keharusan bagi wali untuk "hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan".³⁹

³⁶ Lihat keterangan selengkapnya dalam al-Maktabah Asy-Syâmilah, *Faidh al-Qadir*, Juz 6 h. 567. لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاحِدَيْنِ عَدْلٍ .

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, Op Cit, h. 50; Lihat juga keterangan dalam al-Maktabah Asy-Syâmilah, *Tuhfah al-Ahwaḍi*, Bab Pernikahan Tanpa Saksi, juz III, h. 131.

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*. Op Cit, h. 75.

³⁹ KHI Pasal 26.

G. Kesimpulan

Perkembangan hukum di Indonesia jelas mengacu kepada nilai-nilai ajaran Islam yang disesuaikan dengan kearifan local bangsa Indonesia, khususnya dalam masalah perkawinan, (wali dan saksi). Oleh karenanya, Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan dirinya dengan meniadakan campur tangan orang lain, dalam hal ini adalah campur tangan seorang wali berkenaan dengan masalah perkawinan. Pertimbangan rasional logis inilah yang membuat Hanafi mengatakan **tidak wajibnya wali** nikah bagi wanita yang hendak menikah;
2. Selain ulama Hanafiyah, ulama sepakat bahwa wali merupakan syarat sah nikah. Dengan kata lain, pernikahan tanpa adanya wali adalah tidak sah. Bagi wanita yang tidak memiliki wali, maka yang menjadi walinya adalah hakim;
3. Keberadaan saksi menurut **Imam Malik** bukan merupakan suatu keharusan, melainkan cukup dengan diberitakan atau asal pernikahan tersebut sudah diketahui oleh khalayak dipandang sudah sah. Pendapat yang senada dengan Imam Malik, **Abu Taur** dan mazhab Syi'ah menyatakan bahwa pernikahan **dianggap sah dengan tanpa saksi**, sebab pada hakikatnya **pernikahan adalah akad** dan akad tidak memerlukan saksi. Pendapat ini menganalogikan terhadap jual beli. Allah dalam al-Qur'an memerintahkan adanya saksi dalam jual beli, sedangkan saksi tidak diperintahkan dalam pernikahan. Oleh karena itu, apabila saksi bukan merupakan syarat dalam sah jual beli, maka saksi lebih tidak disyaratkan dalam pernikahan;

Selain Imam Malik, Abu Ṭaur dan maḏhab Syi‘ah, bahwa saksi merupakan suatu keharusan, sama adakah ia hadir ditempat akad nikah ataupun cukup atas persetujuan (izinnya) dari wali..

BAB IV PERCERAIAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara’.¹

Dalam istilah Fiqh perceraian dikenal dengan istilah “*Talaq*” atau “*Furqah*”. *Talaq* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *Furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan *talaq* dan *furqah* mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.²

Menurut A. Fuad Sa’id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.³

¹Taqiyyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Imam, 1993), juz. 11, h. 175

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: PT. Liberty, 2004), h. 103

³Abdul Manan, *Problematisasi Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*, dalam Jurnal Mimbar Hukum, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA, Jakarta No. 52 Th. XII 2001 h.7

Menurut hukum Islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab, antara lain: karena putus dengan sendirinya (karena kematian), karena adanya perceraian, karena adanya putusan Pengadilan.⁴

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan.

Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami isteri supaya perkawinan berjalan dengan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Bila ada di antara suami isteri berbuat di luar hak dan kewajibannya maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Tetapi bila dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak lagi dapat diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Meskipun perceraian itu merupakan perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut.⁵

⁴ Lihat, Pasal 113 *Kompilasi Hukum Islam*

⁵ Lihat, Hadis yang dikemukakan oleh Abu Al-Farij Ibn al-Jauzi, *al-'Ilalu al-Mutanâhiyah*, al-Mausû'ah, Arabiah, Juz 3, h.637; lihat; Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, h.158

B. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai penetapan rukun talak, sebagaimana dikutip oleh Husni Syams.⁶ Menurut Ulama Hanafiyah, rukun talak itu adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Kasani sebagai berikut:

فركن الطلاق هو اللفظ الذي جعل دلالة على معنى الطلاق لغة وهو التخلية والإرسال ورفع القيد الصريح وقطع الوصلة ونحوه في الكناية أو شرعا وهو إزالة حل المحلية في النوعين أو ما يقوم مقام اللفظ⁷

"Rukun talak adalah lafal yang menjadi penunjukan terhadap makna talak, baik secara etimologi, yaitu *al-takhliyyah* (meninggalkan atau membiarkan), *al-irsal* (mengutus) dan *raf al-Qayyid* (mengangkat ikatan) dalam kategori lafal-lafal lainnya pada lafal *kinayah*, atau secara syara' yang menghilangkan halalnya ("bersenang-senang" dengan) isteri dalam kedua bentuknya (*raj'iy* dan *ba'in*), atau apapun yang menempati posisi lafal"

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa rukun talak itu dalam pandangan ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ṣighah* atau lafal yang menunjukkan pengertian talak, baik secara etimologi, *syar'iy* maupun apa saja yang menempati posisi lafal-lafal tersebut.

⁶<http://fikihonline.blogspot.com/2010/04/rukun-dan-syarat-talak.html>, Akses 12 feb 2015

⁷ 'Ala al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasaniy, *Bada'i' wa al-Shana'i'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), Juz 3, h. 98

Menurut ulama Malikiyah, rukun talak itu ada empat, yaitu:

1. Orang yang berkompeten melakukannya. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu adalah suami atau wakilnya (kuasa hukumnya) ataupun wali, jika ia masih kecil.
2. Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu sengaja membacakan lafal-lafal yang termasuk kategori lafal *sharih* atau lafal *kinayah* yang jelas.
3. Isteri yang dihalalkan. Maksudnya talak yang dijatuhkan itu mesti terhadap isteri yang telah dimiliki melalui suatu pernikahan yang sah.
4. Adanya lafal, baik bersifat *sharih* (gamblang/ terang) ataupun termasuk kategori lafal *kinayah*.⁸

Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah, rukun talak itu adal lima, yaitu:

1. Orang yang menjatuhkan talak. Orang yang menjatuhkan talak itu hendaklah seorang *mukallaf*. Oleh karena itu, talak anak kecil yang belum baligh dan talak orang gila tidak mempunyai kekuatan hukum;
2. Lafal talak. Mengenai rukun yang kedua ini, para ulama Syafi'iyah membaginya kepada tiga macam, yaitu:
 - a. Lafal yang diucapkan secara *sharih* dan *kinayah*. Diantara yang termasuk lafal *sharih* adalah al-*sarrah*, al-*firaq*, al-*ṭalaq* dan setiap kata yang terambil dari lafal al-*ṭalaq* tersebut. Sedangkan lafal *kinayah* adalah setiap

⁸ Menurut Ibn Juza (ulama Malikiyah), rukun talak ada tiga, yaitu al-*muthalliq* (suami), al-*muthallaqah* (isteri, dan al-*shighah* (lafal atau yang menempatnya secara hukum); Lihat dalam: Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*, (Damaskus, Dâr al-Fikr, 1989), cet. Ke-3, Juz 7, h. 361-362

lafal yang memiliki beberapa pengertian, seperti seorang suami berkata kepada isterinya: *izhabi* (pergilah kamu) atau *ukhruji* (keluarlah kamu) dan lafal-lafal lain seperti itu, sementara suami itu meniatkan menjatuhkan talaknya. Jadi menurut mereka, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami itu baru terakad apabila diucapkan dengan lafal-lafal yang *şarih* ataupun lafal *kinayah* dengan meniatkannya untuk menjatuhkan talak;

- b. Apabila lafal talak itu tidak diucapkan, baik secara *şarih* maupun *kinayah*, boleh saja melalui isyarat yang dipahami bermakna talak, namun menurut kesepakatan ulama dikalangan Syafi'iyah, isyarat tersebut baru dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan oleh orang bisu. Menurut mereka isyarat tersebut juga terbagi kepada *şarih* dan *kinayah*. Isyarat *şarih* adalah isyarat yang dapat dipahami oleh orang banyak, sementara isyarat yang termasuk kategori *kinayah* adalah isyarat yang hanya dipahami oleh sebagian orang. Penetapan dapatnya isyarat itu menggantikan kedudukan lafal, sesuai dengan kaidah fiqhiyyah sebagai berikut:

الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان⁹

"Isyarat yang biasanya dapat dipahami sama kedudukannya dengan penjelasan melalui lisan bagi orang-orang bisu"

- c. Talak itu juga sudah dianggap memenuhi rukun kedua ini, apabila suami tersebut menyerahkan (*al-fawiq*)

⁹Muhammad al-Zarqa', *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus, Dar al-Qalam, 1996), cet. Ke-4, h. 351

kepada isterinya untuk menjatuhkan talaknya. Misalnya seorang suami berkata kepada isterinya: *Talliqli nafsak* (talaklah/ aku talak dirimu), lalu apabila isterinya itu menjawab: *Tallaqtu* (aku talakkan), maka talak isterinya itu telah jatuh. Sebab dalam kasus seperti itu, isteri berkedudukan sebagai *tamlik* (wakil) dalam menjatuhkan talak.

Jadi dalam pandangan ulama Syafi'iyah, lafal atau *sighah* yang merupakan salah satu rukun talak itu dapat terpenuhi melalui ucapan dengan lafal yang *sharih* atau *kinayah*, isyarat bagi orang yang bisu baik dengan isyarat yang *sharih* maupun *kinayah*, ataupun melalui penyerahan menjatuhkan talak yang dikuasakan oleh seorang suami kepada isterinya.

3. Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, lafal talak itu sengaja diucapkan. Ulama Syafi'iyah mengemukakan bahwa ada lima bentuk yang keraguan cacatnya kesengajaan, yaitu:
 - a. Salah ucapan. Misalnya, seorang suami yang isterinya bernama *Tariq*, lalu ia memanggilnya dengan ucapan: *Ya Taliq* (wahai yang ditalak). Kemudian suami tersebut mengatakan bahwa lidahnya terpeleset (salah ucapan), maka talaknya tidak sah. Jadi apabila seorang suami tersalah ucapannya sehingga kata yang keluar itu adalah kata talak atau lafal-lafal yang secara *sharih* bermakna talak, maka talaknya dianggap tidak sah;
 - b. Ketidak tahuan. Apabila seorang suami mengatakan: "Hai wanita yang ditalak" kepada seorang wanita yang disangkanya isteri orang lain namun ternyata wanita itu adalah isterinya sendiri, maka menurut pendapat Jumhur ulama Syafi'iyah talaknya sah. Namun apabila

orang 'ajam (non arab) mengucapkan lafal talak, sementara ia tidak memahami maksudnya maka talak itu tidak sah;

- c. Bersenda gurau. Talak yang dijatuhkan dalam keadaan bersenda gurau, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana ketentuan yang berlaku pada seluruh bentuk akad lainnya;
- d. Adanya unsur paksaan. Adanya unsur keterpaksaan dapat menghalangi ke-absahan seluruh bentuk *taṣarruf* kecuali mengislamkan kafir harbi dan murtad. Oleh karena itu, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami dalam keadaan terpaksa tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun menurut pendapat terkuat, unsur paksaan yang menjadikan talak itu tidak diakui keabsahannya hanya unsur paksaan yang termasuk kategori keterpaksaan *absolute* seperti ancaman bunuh dan lenyapnya harta, bukan keterpaksaan *relative* seperti dikurung atau tidak diberi makanan. Ketentuan tersebut berdasarkan kepada Hadis Nabi Saw berikut:

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (رواه ابن ماجه والحاكم .

10

¹⁰ Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlaniy, *Subul al-Salâm; Syarh Bulûgh al-Marâm min Adillâh al-Ahkâm*, (Bandung: Dahlan, t.th.), h. 176. Lihat juga: Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqiy, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th.), Jilid 1, h. 659

"Diterima dari Ibnu Abbas r.a dari Nabi Saw bahwa ia bersabda: Sesungguhnya Allah Swt mengangkat dari umatku dari sifat tersalah, lupa dan apa saja yang dipaksakan kepadanya" (H.R. Ibnu Majah dan al-Hakim)

- e. Hilang akal pikiran disebabkan gila dan minum obat. Gilanya seseorang dapat menghalangi keabsahan dari seluruh bentuk *taṣaruf*. Ketentuan tersebut didasarkan kepada hadis Nabi Saw:

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر
وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق (رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي
وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان .¹¹

"Diterima dari Aisyah r.a., dari Nabi Saw bahwa ia bersabda: Dibebaskan dari tiga macam kewajiban, yaitu dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga dewasa dan dari orang gila hingga ia ingat atau sadar" (H.R. Ahmad dan al-Arba'ah kecuali al-Tirmizi. Hadis ini dianggap ṣahih oleh al-Hakim dan juga diriwayatkan oleh Ibn Hibban)

¹¹ Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlaniy, *Subul al-Salâm; Syarh Bulûgh al-Marâm min Adillaḥ al-Ahkâm*, (Bandung: Dahlan, t.th.), h. 180-181; Lihat juga: Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqiy, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th.), Jilid 1, h. 658.

4. Wanita yang dihalalkan (isteri). Apabila seorang suami menyandarkan talak itu kepada bagian dari tubuh isterinya, misalnya ia menyandarkan kepada anggota tubuh tertentu seperti tangan, kepala, limpa atau hati, maka talaknya sah. Namun apabila suami tersebut menyandarkan kepada *faḍalat* tubuhnya seperti air liur, air susu atau air mani, maka talaknya tidak sah;
5. Menguasai isteri tersebut. Apabila seorang suami berkata kepada seorang wanita yang bukan isterinya: *Anti ṭalliḡ* (kamu wanita yang ditalak), maka talaknya tidak sah, namun apabila suami tersebut berkata kepada isterinya atau isterinya itu masih berada dalam masa 'iddah talak *raj'i*, maka talaknya baru dianggap sah. Bahkan menurut ulama Syafi'iyah, apabila seorang suami berkata kepada wanita yang bukan isterinya: *In nakahtuki fa anti ṭalliḡ* (jika aku menikahimu maka kamu adalah wanita yang ditalak), maka nikahnya juga tidak sah. Jadi menurut mereka, ucapan yang dikaitkan dengan syarat-pun juga tidak sah, sebab ketika ia mengucapkannya, wanita tersebut tidak berada dalam kekuasaannya.¹² Karena itu, dapat dipahami bahwa dalam menetapkan rukun talak terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama.

Menurut ulama Hanafiyyah, rukun talak itu hanya satu, yaitu lafal yang menunjukkan makna talak, baik secara etimologi dalam kategori *ṣarih* atau *kinayah*, atau secara syar'i, atau *tafwīḍ* (menyerahkan kepada isteri untuk menjatuhkan talaknya).

¹² Muhammad bin Muhammad Abi Hamid al-Ghazaliy, *al-Wajiz fi Fiḡh Madzhab al-Imâm al-Syâfi'iy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 286-289; Lihat juga: Al-Sayyid Abi Bakr (al-Sayyid al-Bakr), *I'ânât al-Thâlibîn*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, t.th.), Jilid 4, h. 2

Menurut ulama Malikiyyah rukun talak ada empat, yaitu:

1. orang yang berkompeten menjatuhkan talak;
2. ada kesengajaan menjatuhkan talak;
3. wanita yang dihalalkan; dan
4. Adanya lafal, baik *şarih* maupun *kinayah*.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah rukun talak tersebut ada lima, yaitu:

1. orang yang menjatuhkan talak;
2. adanya lafal talak;
3. adanya kesengajaan menjatuhkan talak;
4. adanya wanita yang dihalalkan; dan
5. menguasai isteri tersebut.

Apabila diperhatikan secara seksama, sebenarnya rukun talak yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabillah itu relatif sama substansinya dengan formulasi rukun talak yang dikemukakan oleh ulama Malikiyyah, dimana formulasi menguasai isteri yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabillah telah tercakup kedalam rumusan adanya wanita yang dihalalkan yang dikemukakan ulama Malikiyyah. Oleh karena itulah, dalam sebagian literatur persoalan ini diklasifikasikan kepada pendapat Hanafiyyah dan non Hanafiyyah.¹³

C. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan

Hal-hal yang menyebabkan putusnya perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 KHI adalah:

¹³ Abdurrahman al-Jaziriy, *al-Fiqh 'Ala Madzâhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Juz 4, h. 280; Bandingkan dengan Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*, (Damaskus, Dâr al-Fikr, 1989), cet. Ke-3, Juz 7, h. 264.

1. Karena *Talaq*.

a. Pengertian dan dasar Hukum Talak

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak (*talaq*),¹⁴ Kata *Talaq* diambil dari kata *iṭlaq* yang berarti melepaskan atau menanggalkan,¹⁵ semakna dengan kata talak itu, adalah *al-irsâl* atau *tarku*, yang berarti melepaskan dan menanggalkan.¹⁶ yaitu melepaskan tali perkawinan mengakhiri hubungan suami isteri; atau secara harfiah berarti membebaskan seekor binatang. Ia dipergunakan dalam syari'ah untuk menunjukkan cara yang sah dalam mengakhiri sebuah perkawinan. Meskipun Islam memperkenankan perceraian, jika terdapat alasan-alasan yang kuat baginya, namun hak itu hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang mendesak.¹⁷

Talak bukanlah sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi; Sebagaimana HR. Abu Daud dari Ibnu Umar:

¹⁴ QS.At-Talaq (65): 1-7; QS. Al-Baqarah (2): 229; QS. An-Nisa' (4): 21

¹⁵ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), Cet. I, h. 9

¹⁶ Said Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Pustaka Al-Husna, Jakarta, 1994, h.2; Lihat Zurinal & Aminuddin, *Ciputat*, Lembaga penelitian UIN, Jakarta, 2008

¹⁷ Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), h. 8

عن ابن عمر قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إن
أبغض الحلال الى الله عز وجل الطلاق . (رواه أبو داود)¹⁸

“Dari Ibnu Umar, Rasulullah Saw bersabda:
Ṭalaq, adalah merupakan perkara halal yang
paling dibenci oleh Allah". (HR Abu Daud, dan
dinyatakan sah oleh al-Hakim).

Menurut Muhammad Ismail al-Kahlani, *ṭalaq* adalah:

الطلاق : حل الوثاق مشتق من الأطلاق وهو الأرسال والترك

“*Ṭalaq* menurut bahasa yaitu membuka ikatan,
yang diambil dari kata *īṭlaq* yaitu melepaskan,
menanggalkan”¹⁹

Menurut Wahbah Zuhaily, *ṭalaq* ialah:

الطلاق لغة حل القيد والاطلاق

“*Ṭalaq* menurut bahasa ialah membuka ikatan
atau melepaskan”²⁰

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *ṭalaq* itu dapat
dipahami sebagai berikut: “*Ṭalaq* menurut istilah *syara*’

¹⁸ Abu Al-Farij Ibn al-Jauzi, *al-‘Ilalu al-Mutanâhiyah*, al-Mausû’ah, Arabiah, Juz 3, h.637; lihat; Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, h.158

¹⁹ Moh. Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, (Bandung: Pustaka Dahlan, 1987), jilid 3, h. 168

²⁰ Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damsyik, Dar al-Fikr, 1989), juz. VII, h. 356

ialah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan”²¹

Maksudnya ialah bahwa ikatan perkawinan itu akan putus dan berakhirnya hubungan suami isteri dalam rumah tangga apabila suami menjatuhkan *ṭalaq* kepada isterinya.

Memperhatikan beberapa pengertian *ṭalaq* di atas baik secara bahasa maupun istilah dapat diambil dipetik pemahaman, bahwa yang dimaksud dengan *ṭalaq* adalah melepaskan atau mengakhiri ikatan perkawinan antara suami dan isteri dengan ucapan atau dengan tata cara yang ditetapkan.

Setelah ikatan perkawinan itu diangkat atau dilepaskan, maka isteri tidak halal lagi bagi suaminya. Hal ini terjadi bila suami melaksanakan *ṭalaq ba'in*. Tapi apabila suami melaksanakan *ṭalaq raj'i* maka hak *ṭalaq* berkurang bagi suami, yang pada awalnya suami memiliki hak menjatuhkan *ṭalaq* tiga kali, maka sekarang menjadi dua dan menjadi satu. Dengan kata lain *ṭalaq raj'i* adalah mengurangi pelepasan ikatan perkawinan.

Islam menentukan bahwa *ṭalaq* merupakan hak sepenuhnya yang berada ditangan suami. Dengan demikian menurut pandangan fikih klasik, suami boleh menjatuhkan *ṭalaq* kepada isterinya kapan saja dan dimana saja. Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh al-'Arba'ah kecuali al-Nasâ'i sebagai berikut:

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa oleh Moh. Thalib. (Bandung: al-Ma'arif, 1998), jilid 8, h. 9

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
ثلاث جدهن جد وهز لمن جد النكاح والطلاق والرجعة (رواه
الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم)

"Dari Abu Hurairah r.a ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Ada tiga perkara sungguh-sungguh dalam tiga perkara itu menjadi sungguh-sungguh, dan main-main menjadi sungguh-sungguh, yaitu nikah, *ṭalaq*, dan rujuk " (diriwayatkan oleh al-Arba'ah kecuali al-Nasâ'i dan di-*ṣahih*-kan oleh Hakim).²²

Pengertian perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991) telah dijumpai dalam Pasal 117, yaitu: "Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang mengadili salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 129, 130, 131".²³

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum

²² Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlany, *Subul al-Salam; Syarh Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam*, Terj. (Bandung : Dahlan, t.th), h. 175

²³ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 112; Lihat, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bab XVI Pasal 117; Putusnya Perkawinan Bagian kesatu umum. Pasal 115, h. 21.

Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut: "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."²⁴

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub di atas maka yang dimaksud dengan perceraian disini adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama,. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan di luar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat,²⁵ sebagaimana disebutkan dalam Pasal 113 KHI.

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (cerai gugat). Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²⁶ Sehingga KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan dihadapan sidang Pengadilan. Tampaknya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada Pasal 66 ayat (1):

“Seseorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada

²⁴ *Kompilasi Hukum Islam* (KHI), Bab XVI Putusnya Perkawinan Bagian kesatu umum. Pasal 115, h. 21.

²⁵ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), h. 171. Selanjutnya disebut Ali Hasan, *Pedoman Hidup*.

²⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), Cet. 2, h. 152.

Pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak”.²⁷

Mencermati pengertian talak di atas, terdapat tiga kata kunci yang menunjukkan hakikat perceraian yang bernama talak, yakni:

- 1) Kata “melepaskan” atau membuka atau menanggalkan mengandung arti bahwa talak itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat dengan erat yaitu ikatan perkawinan;
- 2) Kata “ikatan perkawinan” mengandung arti bahwa talak itu mengakhiri hubungan perkawinan yang selama ini terjadi antara pasangan suami dan istri;
- 3) Kata “dengan lafaz *ta-la-qa* dan sama maksudnya dengan itu” mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui ucapan. Dan ucapan yang digunakan adalah kata-kata *ṭalaq* tidak dengan: putus perkawinan, bila tidak dengan cara mengucapkan ucapan tersebut, seperti halnya putusnya perkawinan karena kematian.

b. Macam-macam Talak

Talak dibagi kepada dua macam, sebagai berikut:

- 1) Talak *Raj'i*; Adalah suatu talak dimana suami memiliki hak untuk merujuk isteri tanpa kehendaknya. Dan talak *raj'i* ini disyaratkan pada isteri yang telah digauli.²⁸ Dengan demikian, yang

²⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), Cet. 1, h. 221; Lihat, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 66 ayat (1).

²⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj, Abdurrahman dkk, Juz 2, Asy-Syifa', Semarang, 1990, h. 476

dimaksud dengan talak *raj'i* adalah: talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri sebagai talak satu atau dua, yang di ikrarkan di depan sidang Pengadilan, dan suami diperbolehkan meruju'nya bila masih dalam masa iddah, tanpa diharuskan nikah baru. Hal ini sesuai dengan firman Allah, QS. Al- Baqarah (2): 229

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ۗ

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk kembali dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik”

- 2) Talak *Ba'in*; secara etimologi, *ba'in* adalah nyata, jelas, pisah atau jatuh, yaitu talak yang terjadi karena isteri belum digauli oleh suami, atau karena adanya bilangan talak tertentu (tiga kali), dan atau karena adanya penerimaan talak tebus (*khulu'*),²⁹ meskipun ini masih diperselisihkan fuqaha, apakah *khulu'* ini talak atau *fasakh*.

Talak *ba'in* dibagi menjadi dua macam, yaitu *ba'in şugra* dan *ba'in kubra*.

- a) *Ba'in şugra* adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru (*tajdid an-nikah*) kepada bekas isterinya. Yang dimaksud

²⁹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terjemahan, Abdurrahman dkk, Juz 2, Asy-Syifa', Semarang, 1990, h. 477

menghilangkan hak-hak rujuk, seperti suami tidak diperkenankan rujuk kepada isterinya yang ditalak, hingga masa iddahnya habis. Suami diperbolehkan kembali kepada isterinya namun diharuskan nikah baru (*tajdid an nikah*) dan juga mahar baru (*tajdid al mahr*).

- b) *Ba'in kubra* adalah talak yang menghilangkan hak suami untuk nikah kembali kepada isterinya, kecuali kalau bekas isterinya telah kawin dengan laki-laki lain dan telah berkumpul sebagaimana suami isteri secara nyata dan sah, dan juga isteri tersebut telah menjalani masa iddahnya serta iddahnya telah habis pula.

Allah berfirman QS. Al-Baqarah (2): 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا
غَيْرَهُ

“maka apabila suami mentalaknya, sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal baginya sampai dia kawin dengan suami yang lain”.

Perlu diperhatikan juga, bahwa hendaklah pernikahan yang kedua itu benar-benar menurut kemauan laki-laki yang kedua, dan benar-benar dengan kemauan perempuan, bukan kehendak suami yang pertama. Tegasnya bukan dengan maksud supaya ia dapat menikah kembali dengan laki-laki yang pertama, memang betul-betul dengan

niat akan kekal sebagaimana pernikahan pada umumnya.

Dilihat dari waktu mengucapkannya, dibagi kepada *talak sunni* dan *talak bid'i*.

a) *Talak sunni*, adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah (sesuai dengan yang telah digariskan oleh syara').³⁰ Dalam formulasi fikih Syafi'iyah terjadi perbedaan pendapat dalam mendefenisikan talak *sunni* tersebut. Sebahagian ulama syafi'iyah mendefenisikan talak *sunni*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad al-Hashari berikut:³¹

"Talak Sunni adalah talak (yang dijatuhkan kepada isteri yang telah) disetubuhi dan dijatuhkan pada waktu suci serta belum disetubuhinya pada waktu suci tersebut, bukan (dijatuhkan) pada waktu haid, wanita itu tidak dalam keadaan hamil, anak kecil dan tidak pula wanita *monopouse*, sementara ber'iddah dengan quru' ³²

Menurut sebahagian ulama Syafi'iyah yang lain, talak *sunni* adalah talak yang dijatuhkan kepada isteri yang telah disetubuhi, yang dijatuhkan pada waktu suci dan ia belum disetubuhi pada waktu suci tersebut.³³ Adapun talak yang dijatuhkan

³⁰ <http://fikihonline.blogspot.com/2010/04/macam-macam-talak.html>, Akses 15 Feb 2015

³¹ Ahmad al-Hashariy, *al-Wilâyah al-Washâyah, al-Thalâq fi al-Fiqh al-Islâmiy li Ahwâl al-Syakhshiyyah*, (Beirut: Dar al-Jil, 1992), cet. Ke-2, h. 653;

³² Ahmad al-Hashariy, *al-Wilâyah al-Washâyah, al-Thalâq fi al-Fiqh al-Islâmiy li Ahwâl al-Syakhshiyyah*, (Beirut: Dar al-Jil, 1992), cet. Ke-2, h. 653

³³ Musthafa Dib al-Bagha, *al-Tawzhîb fi Adillâh min al-Ghâyah wa al-Taqrîb*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), cet. Ke-2, h. 173

kepada isteri yang masih kecil (sebelum *Baligh*), sudah tua yang telah *monopouse*, hamil atau isteri yang belum disetubuhi, menurut kelompok ini, tidak dinamakan talak *sunni* dan tidak pula *bid'iy* tetapi antara keduanya.³⁴

Perbedaan antara mendefinisikan talak *sunni* di atas disebabkan perbedaan dalam mengklasifikasikan bentuk kategori. Kelompok pertama mengklasifikasikan talak dalam kategori: Talak *sunni* dan talak *bid'iy*. Sedangkan kelompok kedua mengklasifikasikannya kepada: talak *sunni*, talak *bid'iy*, dan kelompok ketiga mengkatagorikan bukan talak yang bukan *sunni* dan *bid'iy*.

Ulama Hanabilla, mengemukakan bahwa, talak *sunni* adalah:

طلاق السنة هو أن يطلقها من غير جماع واحدة ثم بدعها
حتى تنقض عدتها³⁵

"Talak sunni adalah seseorang menjatuhkan talak kepada isterinya yang belum distubuhinya (pada waktu suci itu) satu kali, kemudian ia meninggalkan isterinya itu sampai habis masa 'iddahnya "

Ulama Hanafiyyah, mengklasifikasikan talak sunni tersebut kepada dua kategori, yaitu talak *ahsan* (lebih baik) dan talak *hasan* (baik).³⁶

³⁴ Mahmud Mathrajiy, *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab al-Imâm al-Nawawiy*, (Beirut: dar al-Fikr, 2000), Juz 18, h. 277-278

³⁵ Ahmad al-Hashariy, *al-Wilâyah al-Washâyah, al-Thalâq fî al-Fiqh al-Islâmiy li Ahwâl al-Syakhshiyyah*, (Beirut: Dar al-Jil, 1992), cet. Ke-2, h. 243.

³⁶ 'Ala al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasaniy, *Bada'i' wa al-Shana'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), Jilid 3, h. 88. Lihat juga: al-Hasariy, *ibid.*, h. 212;

Substansi yang membedakan antara kedua macam talak *sunni* yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyyah di atas (*ahsan* dan *hasan*) terletak pada jumlah talak; yang dijatuhkan satu kali sampai habis masa 'iddahnya, maka talak *sunni* itu dinamakan *sunni ahsan*. Namun apabila dijatuhkan tiga kali pada waktu tiga kali suci maka dinamakan dengan talak *sunni hasan*.³⁷

Ulasan ulama Hanafiyyah, yang membedakan antara talak *sunni ahsan* dan talak *sunni hasan* tersebut didasarkan kepada riwayat yang diterima dari Ibrahim al-Nakh'i yang menjelaskan bahwa para sahabat Rasulullah Saw menyukai talak hanya satu sampai habis masa 'iddah isterinya.³⁸ Dan seorang suami hanya menjatuhkan satu talak sampai habis masa 'iddah isterinya, lebih memberi peluang kepada suami tersebut untuk menyesali tindakannya.

Karena itu menurutnya, tidak dapat disamakan antara talak *sunni ahsan*, yaitu menjatuhkan satu talak, dengan talak *sunni hasan*, seorang suami menjatuhkan talak isterinya tiga kali pada masa tiga kali suci.

Apabila diperhatikan formulasi fikih tentang talak *sunni* yang telah ditemukan oleh para ulama

³⁷Lihat, Burhan al-Din Abi al-Hasan 'Ali Ibn Abi Bakr 'Abd al-Jalil al-Rasyidaniy al-Marghinaniy, *al-Hidayah Syarh Bidayat al-Mubtadi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), Juz 1, h. 247; Lihat Juga: Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*, (Damaskus, Dâr al-Fikr, 1989), cet. Ke-3, Juz 7, h. 426

³⁸Ahmad al-Hashariy, *al-Wilâyah al-Washâyah, al-Thalâq fî al-Fiqh al-Islâmiy li Ahwâl al-Syakhshiyyah*, (Beirut: Dar al-Jil, 1992), cet. Ke-2, h. 212; Lihat juga, 'Ala al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasaniy, *Bada'i' wa al-Shana'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), Jilid 3, h. 88.

terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa kategori talak *sunni ahsan* versi ulama Hanafiyyah tersebut jelas merupakan talak *sunni* menurut Jumhur Ulama. Namun kategori talak *sunni hasan* versi ulama Hanafiyyah itu, sudah termasuk talak *bid'iy* menurut ulama Malikiyyah dan ulama Hanabillah.³⁹

Alasan lain yang dikemukakan ulama Hanafiyyah yang menyatakan talak *sunni ahsan* adalah firman Allah Swt QS. al-Ṭalaq (65): 1, dan Hadis Nabi Saw.

يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن...

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)...” (QS. al-Ṭalaq (65): 1)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt menyuruh Nabi-Nya untuk menjatuhkan talak isterinya pada waktu mereka dapat menghadapi 'iddahnya. Menurut mereka, bukankah 'iddah meraka tiga kali suci dan oleh karenanya talak boleh dijatuhkan setiap kali suci itu, asalkan pada waktu suci tersebut wanita itu belum disetubuhinya.

³⁹ 'Ala al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasaniy, *Bada'i' wa al-Shana'i'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), Jilid 3, h. 88; Ahmad al-Hashariy, *al-Wilâyah al-Washâyah, al-Thalâq fi al-Fiqh al-Islâmiy li Ahwâl al-Syakhshiyyah*, (Beirut: Dar al-Jil, 1992), cet. Ke-2, h. 213.

Pemahaman ulama Hanafiyyah tersebut didukung oleh Hadis Nabi Saw berikut:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على رسول الله وسلم صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مره فليرجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء (متفق عليه)⁴⁰

"Dari Abdillah Ibnu 'Umar, bahwa sesungguhnya ia menjatuhkan talak isterinya, sementara isterinya itu dalam keadaan haid, pada masa Rasulullah Saw. Lalu 'Umar Ibn al-Khattab menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw, Rasulullah Saw berkata kepada 'Umar Ibn al-Khatab: suruh ia dan hendaknya ia rujuk kepada isterinya, kemudian hendaklah ia meninggalkannya sampai ia suci, kemudian haid, kemudian suci lagi. Selanjutnya, jika ia mau peganglah ia dan jika ia mau talak dia sebelum

⁴⁰ Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), Jilid 2, h. 1093

disetubuhi. Demikianlah 'iddah yang diperintahkan oleh Allah 'azza wa jalla untuk menjatuhkan talak pada wanita"

Menurut ulama Hanafiyyah tersebut, bahwa Rasulullah Saw menyuruh 'Umar untuk merujuk isterinya pada waktu suci. Kemudian apabila masa haid setelah masa suci tersebut telah berlalu maka Rasulullah menyuruhnya untuk memilih antara; tetap memegangnya atau menceraikannya. Hal ini menurut mereka mengindikasikan bolehnya menjatuhkan talak sampai tiga kali pada waktu setiap kali suci. Hadis Nabi Saw yang terkait dalam masalah ini, sebagai berikut:

عن عبد الله أنه قال طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير
جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت
طلقها أخرى ثم تعد بعد ذلك بحیضة (رواه النسائي)⁴¹

"Diterima dari Abdullah r.a, ia berkata bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: Talak *sunni* adalah bahwa seseorang menjatuhkan talak isterinya satu, sementara isterinya itu dalam keadaan suci yang belum disetubuhi (pada waktu suci itu). Apabila masa hainya telah berlalu dan telah datang pula masa sucinya, ia mentalak lagi isterinya

⁴¹ Al-Nasa'iy, *Sunan al-Nasa'iy*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Jilid 3, h.

itu. Kemudian ia menunggu berlalunya satu kali masa haid lagi"

Talak sunni menurut ulama Zhahiriyyah, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Hashari sebagai berikut:

هو أن يطلق الرجل امرئته في طهر ثم يطأها فيه⁴²

"Talak sunni ialah seorang suami menjatuhkan talak isterinya pada waktu suci yang pada masa suci itu isterinya belum disetubuhinya"

Diadalam Kompilasi Hukum Islam⁴³, talak raj'iy juga dijelaskan yaitu, talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa 'iddah, kecuali talak yang jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan *qabla al-dukhul*

Dikategorikan sebagai talak *sunni* apabila memenuhi 3 syarat, yaitu:

- 1) Isteri yang ditalak sudah pernah dikumpuli, apabila talak dijatuhkan kepada isteri yang belum pernah dikumpuli tidak termasuk talak *sunni*;
- 2) Isteri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu isteri dalam keadaan suci dari haid;
- 3) Talak dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan suci.

⁴² Ahmad al-Hashariy, *al-Wilâyah al-Washâyah, al-Thalâq fi al-Fiqh al-Islâmiy li Ahwâl al-Syakhshiyyah*, (Beirut: Dar al-Jil, 1992), cet. Ke-2, h. 246.

⁴³ Lihat, Pasal 163 ayat (1) dan (2) *Kompilasi Hukum Islam*

Hal ini dapat berdasarkan Firman Allah QS. Aṭ-Ṭhalâq (65): 1

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)⁴⁴ dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu”.

- b) *Talak bid'i* adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntunan sunnah (sesuatau yang dilarang syara')⁴⁵. Artinya, talak *bid'iy* tersebut dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan syara'. Akan tetapi, dalam menjelaskan talak yang termasuk dilarang dalam kategori syara' itu, para ulama berbeda pendapat.

Ulama Malikiyyah membagi talak *bid'iy* kepada dua bagian, yaitu:

- 1) Talak yang haram dijatuhkan; yaitu talak yang dijatuhkan kepada isteri yang telah disetubuhi, yang memenuhi persyaratan berikut:

⁴⁴ Maksudnya: isteri-isteri itu hendaklah ditalak diwaktu suci sebelum dicampuri. Tentang masa iddah, lihat QS. Al-Baqarah (2): 228, 234; dan QS. aṭ-Ṭalaq (65): 4.

⁴⁵ Lihat, Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islâmiyy wa Adillatuh*, (Damaskus, Dâr al-Fikr, 1989), cet. Ke-3, Juz 7, h. 425; dan Lihat, Ahmad al-Hashariy, *al-Wilâyah al-Washâyah, al-Thalâq fi al-Fiqh al-Islâmiyy li Ahwâl al-Syakhshiyyah*, (Beirut: Dar al-Jil, 1992), cet. Ke-2, h. 231

- a) Suami tersebut menjatuhkan talak kepada isterinya dalam keadaan haid atau nifash. Oleh karena itu, menurut ulama Malikiyyah, wanita haid atau nifash baru boleh melakukan ibadah yang sifatnya *ta'abudiyyah* setelah ia mandi, disamping telah habis keluar darah haid dan nifas. Maka ketika seorang suami menjatuhkan talak kepada isterinya yang telah terputus darah haid dan nifasnya dan belum mandi, maka hukumnya termasuk kedalam kategori haram.

Mengenai isteri yang tidak haid, seperti wanita yang telah *monopouse* atau tidak/belum haid, maka termasuk kategori talak *bid'iy* yang diharamkan baginya, tidak ada dalam poin ini, namun hanya pada dua bentuk yang terakhir.

- b) Suami tersebut menjatuhkan talak kepada isterinya tiga kali pada satu tempat, baik isteri itu pada masa haid atau dalam masa suci. Namun tentu saja menjatuhkan talak tiga kepada isteri ketika ia berada dalam masa haid, berarti ia melakukan dua dosa sekaligus, yaitu menjatuhkan talak kepada isteri yang sedang berada dalam masa haid;
- c) Suami tersebut menjatuhkan talak kepada isterinya sebagai talak saja, misalnya, seorang suami berkata kepada isterinya; Engkau tertalak sebagian talak, atau suami tersebut menjatuhkan talak kepada sebagian anggota tubuhnya saja, seperti suami tersebut berkata: "tangan kamu tertalak";

2) Talak yang makruh dijatuhkan.

Yang termasuk talak *bid'iy* yang makruh dijatuhkan, terwujud dengan dua syarat, yaitu:

- a) Suami tersebut menjatuhkan talak isterinya pada masa suci yang telah disetubuhinya pada masa suci itu;
- b) Suami tersebut menjatuhkan talak isterinya dua kali pada satu tempat.⁴⁶

Menurut ulama Syafi'iyah, talak *bid'iy* itu terbagi dua, yaitu:

- a) Suami tersebut menjatuhkan talak kepada istrinya yang telah disetubuhi pada masa haid. Ketentuan ini mereka dasarkan kepada firman Allah QS. Aṭ-Ṭhalâq (65): 1, "hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya". Sebab pengharaman menjatuhkan talak dalam bentuk ini, karena akan memudaratkan istrinya;
- b) Suami tersebut menjatuhkan talak istrinya pada masa suci namun pada masa suci itu ia telah menyetubuhi istrinya; hal ini karena ada kemungkinan istrinya hamil. Oleh karenanya akan menyulitkan masa '*iddah*-nya, apakah sampai melahirkan atau dengan menggunakan *qurû'*. Di samping itu ada kemungkinan suami itu akan menyesal karena ia akan berpisah juga

⁴⁶ Abdurrahman al-Jaziriy, *al-Fiqh 'Ala Madzâhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Juz 4, h. 300-301

dengan anaknya.⁴⁷ Ulama Hanabilah sepakat dengan ulama Syafi'iyah.⁴⁸

c) *Ṭalak lâ Sunni walâ Bid'i*, ada beberapa talak yang termasuk talak *lâ Sunni walâ Bid'i*, diantaranya adalah:

- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah didukhul (disetubuhi);
- 2) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah haid atau isteri telah lepas dari masa haid (*menopause*);
- 3) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang hamil.⁴⁹

Ditinjau dari segi lafaz (redaksi) yang digunakan untuk menjatuhkan talak, yaitu *talak ṣareh* dan *talak kinayah*

Talak ṣareh adalah talak yang apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada isterinya dengan mempergunakan kata-kata *at-Ṭalak*, *al-firâq* atau *as sara*. Ketiga kata ini adalah jelas artinya adalah menceraikan isteri. Dengan menggunakan redaksi ini walaupun tanpa niat jatuh talak secara hukum.⁵⁰

⁴⁷ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*, (Damaskus, Dâr al-Fikr, 1989), cet. Ke-3, Juz 7, h. 430

⁴⁸ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*, (Damaskus, Dâr al-Fikr, 1989), cet. Ke-3, Juz 7, h. 431

⁴⁹ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Dina Utama, Semarang, Cet I, 1993, h. 137

⁵⁰ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Dina Utama, Semarang, Cet I, 1993, h. 138

Talak kinayah adalah talak yang dilakukan seorang suami kepada isterinya dengan menggunakan kata-kata selain kata-kata pada *lafaz şareh*. Seorang suami mentalak isterinya dengan menggunakan *lafaz kinayah* (sindiran) jatuh talaknya apabila suami tersebut niat bahwa perbuatannya tersebut adalah ucapan yang bertujuan untuk mentalak isterinya.

Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i, apabila seorang suami menjatuhkan talak secara *kinayah* tanpa maksud mentalak, maka tidak jatuh talaknya, karena *kinayah* mempunyai makna ganda (makna talak dan selain talak) dan yang dapat membedakannya hanya niat dan tujuannya.⁵¹

Ditinjau dari cara menyampaikan redaksi talak, yaitu: talak dengan ucapan, dengan tulisan, dengan isyarat dan dengan utusan.

- 1). Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada isterinya dengan menggunakan ucapan lisan sendiri dihadapan isterinya secara langsung dan didengarkan langsung oleh isterinya;
- 2). Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan suami kepada isterinya secara tertulis kemudian dibaca oleh isterinya dan memahami maksud dan isinya;
- 3) Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat seorang suami yang tuna wicara kepada isterinya dihadapan isterinya secara langsung dan ia paham terhadap maksud serta isyarat suaminya itu;

⁵¹ Alhamdani, *Risalah Nikah*, Pustaka Amani, Jakarta, 1980, h. 184

- 4) Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada isterinya dengan melalui prantara orang lain sebagai utusan suami untuk menyampaikan maksud mentalak isterinya. Talak dengan utusan ini diharuskan ada saksi, demikian ini untuk dijadikan dasar sampai dan tidaknya utusan yang dimaksud kepada isterinya yang akan menerima talak dari suaminya.

Secara yuridis, perceraian telah diatur dalam UU tentang perkawinan. Didalamnya dijelaskan bahwa “putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan Pengadilan”.⁵² Kenyataan di atas, dapat dipahami bahwa putusnya perkawinan karena perceraian (cerai talak), adalah berbeda halnya dengan putusnya perkawinan karena (cerai gugat) atau karena kematian.

Ditegaskan dalam Pasal 39 UU Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.⁵³ Dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menggunakan istilah cerai talak dan cerai gugat,⁵⁴ hal ini dimaksudkan agar dapat membedakan

⁵² Pasal 38 UU No 1 tahun 1974 *tentang Perkawinan*

⁵³ Lihat Pasal 39 UU no. 1 tahun 1974 *tentang Perkawinan*

⁵⁴ Pembedaan antara cerai thalaq dan cerai gugatan ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 14 sampai dengan pasal 36. Pasal 14 sampai dengan pasal 18 adalah mengatur tentang cerai thalaq, sementara pasal 20 sampai dengan pasal 36 adalah mengatur tentang cerai gugatan. (hal ini dapat dipahami dengan memperhatikan Penjelasan atas PP No. 9 Tahun 1975).

pengertian yang dimaksud oleh huruf c pada Pasal 38 undang-undang tersebut.

b. Gugatan Perceraian

Putusnya perkawinan karena *Khulu'*

Khulu' berasal dari kata "*khulu' al-saub*" yang berarti melepaskan atau mengganti pakaian pada badan, karena seorang wanita adalah pakaian bagi laki-laki, dan juga sebaliknya.⁵⁵ Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah (2): 187.

Khulu' adalah salah satu bentuk perceraian dalam Islam yang berarti menghilangkan atau mengurungkan akad nikah dengan kesediaan isteri membayar uang *'iwaq* atau uang pengganti kepada suami dengan menggunakan pernyataan cerai atau *khulu'*.⁵⁶ Karena itu, Jika suami berlaku kejam, maka isteri dapat meminta cerai (*khulu'*) dan tidak dipaksa menerima perlakuan yang sekiranya tidak patut baginya. Islam telah memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *khulu'* sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.⁵⁷ Hal ini berdasarkan firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 229:

⁵⁵ Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu-pun adalah pakaian bagi mereka..." (QS. Al-Baqarah (2): 187)

⁵⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Grup 2010), h. 220

⁵⁷ Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Grup. 2010), h. 220; Lihat, Zakiah Daradjat, (*et al*) *Ilmu Fiqh*, jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 192; Depag RI, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, 1984/1985), cet,2, h. 251.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ...

“Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya. -Itulah hukum⁵⁸ hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya... “

Bila terjadi cerai dengan cara *khulu'* maka suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada isterinya. Dari tinjauan *sighat*, *khulu'* mengandung pengertian “penggantian” dan ganti rugi oleh pihak isteri. Perceraian akan terjadi bila isteri telah membayar sejumlah yang disyaratkan suami.⁵⁹

Perceraian yang disebabkan *khulu'* adalah merupakan *ṭalaq ba'in*. Maka bila suami telah melakukan *khulu'* terhadap isteri, suami tidak berhak untuk *ruju'* kembali kepada isteri, sekalipun isteri rela menerima kembali uang *iwaq'* yang telah dibayarkannya. Jika isteri bersedia kembali bekas suaminya tersebut *ruju'* kepadanya, maka suami harus melakukan akad nikah kembali dengan melengkapi rukun dan syaratnya.

⁵⁸Ayat Inilah yang menjadi dasar hukum *khulu'* dan penerimaan *'iwaq'*. *Khulu'* yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut *'iwaq'*.

⁵⁹ Dasrizal Dahlan, *Putusnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Perdata Barat (BW); Tinjauan Hukum Islam*. (Jakarta : PT. Kartika Insan Lestari, 2003), h. 201

c. Perceraian Karena Sebab lain

1) Putusnya perkawinan karena *Fasakh*

Fasakh menurut bahasa berarti memisahkan atau memutuskan. Adapun pengertian *fasakh* menurut istilah adalah memutuskan akan nikah karena ada sebab yang nyata dan jelas yang menghalangi kelestarian hubungan suami isteri.⁶⁰ *Thalaq* adalah hak suami; *khulu'* merupakan hak isteri; sementara *fasakh* merupakan hak bagi keduanya. Bila sebab *fasakh* ada pada isteri, maka hak *fasakh* ada pada suami, dan begitu juga sebaliknya.

Perceraian dalam bentuk *fasakh* termasuk perceraian dalam proses peradilan. Hakimlah yang memberikan keputusan tentang berlangsungnya perkawinan, atau terjadinya perceraian karena itu pihak penggugat dalam perkara *fasakh* haruslah mempunyai alat-alat bukti yang lengkap, sehingga dengan alat bukti tersebut dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim yang menyidangkan perkara tersebut.

Fasakh biasanya timbul apabila pihak suami atau isteri merasa dirugikan oleh pasangannya itu, merasa tidak memperoleh hak-hak sesuai yang ditentukan agama sebagai seorang suami atau isteri. Akibatnya salah seorang dari keduanya tidak lagi sanggup melanjutkan perkawinan karena keharmonisan rumah tangga tidak lagi ada dan tidak mungkin untuk mewujudkan perdamaian sehingga *fasakh* ini perlu ditempuh.

Pada dasarnya *fasakh* adalah hak bagi suami dan juga isteri, namun dalam praktek sehari-hari hak *fasakh*

⁶⁰ Isni Bustami, *Perkawinan dan Perceraian dalam Islam*, (Padang : IAIN IB Press, 1999), h. 136

ini lebih banyak dimanfaatkan oleh isteri. Barangkali karena suami lebih banyak menggunakan hak *thalaq* yang ditentukan agama.

2) Putusnya perkawinan karena *Li'an*

Li'an secara etimologi berarti laknat atau kutukan. Sementara secara terminologi adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika menuduh isterinya berzina dengan empat kali sumpah dan menyatakan bahwa dia adalah termasuk orang yang benar dalam tuduhan, dan pada sumpah kelima disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima laknat/kutukan Allah jika ia dusta dalam tuduhannya. Bila suami melakukan *li'an* kepada isterinya, sedangkan isterinya tidak menerima, maka isteri boleh melakukan sumpah *li'an* juga terhadap suaminya.

Mencermati definisi tersebut, dapat dipahami bahwa Suami isteri saling menyatakan bersedia dilaknat oleh Allah setelah masing-masing suami isteri mengucapkan persaksian empat kali oleh diri sendiri yang dikuatkan dengan sumpah masing-masingnya, karena salah satu pihak bersikeras menuduh pihak yang lain melakukan zina, atau suami tidak mengakui anak yang dikandung/dilahirkan oleh isterinya sebagai anaknya sendiri, dan pihak isteri bersikeras pula menolak tuduhan suami sedang mereka tidak memiliki alat bukti yang diajukan kepada hakim.

3) Putusnya perkawinan karena *Syiqaq*

Syiqaq artinya adalah perselisihan yang terus menerus antara suami dan isteri. Bila ini terjadi maka diadakanlah dua utusan sebagai pendamai antara pihak

suami dan isteri setelah fase-fase menasehati, memisahkan tempat tidur, dan memukul isteri sebagai upaya mendidik menuju perdamaian rumah tangga yang tak kunjung berhasil. Hal ini berdasarkan firman Allah QS. An-Nisâ (4): 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai (*hakam*) dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai (*hakam*) dari keluarga perempuan. Jika keduanya (*hakam* itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti” (QS. An-Nisâ (4): 35).

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami, bahwa bila keutuhan rumah tangga suami isteri terancam karena pertengkaran yang tak mungkin diatasinya, maka perlu diadakan juru damai dari kedua belah pihak. Sekiranya hal ini masih juga tidak membuahkan hasil maka persoalannya wajar ditangani oleh hakim untuk memberi putusan setelah pihak-pihak pendamai tidak berhasil mendamaikannya.

4) Putusnya perkawinan karena *Ila'*

Ila' ialah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. Dalam kalangan bangsa Arab jahiliyah perkataan *ila'* mempunyai arti khusus dalam hukum perkawinan mereka, yakni suami bersumpah untuk tidak mencampuri isterinya, waktunya tidak ditentukan dan selama itu isteri tidak di-*ṭalaq* ataupun diceraikan; sehingga kalau keadaan ini berlangsung berlarut-larut, yang menderita adalah pihak isteri karena keadaannya terkatung-katung dan tidak ada ketentuan yang pastian.

Berdasarkan firman Allah QS. Al-Baqarah (2):

226-227, dapat diperoleh ketentuan bahwa:

- a) Suami yang meng-*ila'* isterinya, batas waktunya paling lama hanya empat bulan;
- b) Kalau batas waktu itu habis, maka suami harus kembali hidup sebagai suami-isteri atau mentalaknya.

Apabila suami hendak kembali meneruskan hubungan dengan isterinya, hendaklah ia menebus sumpahnya dengan denda atau *kaffarah*. *Kaffarah* sumpah *ila'* sama dengan *kaffarah* umum yang terlanggar dalam hukum Islam. Denda sumpah umum ini diatur dalam QS. Al-Maidah (5): 89, berupa salah satu dari empat kesempatan yang diatur secara berurutan, yaitu:

- a. Memberi makan sepuluh orang miskin menurut makan yang wajar yang biasa kamu berikan untuk keluarga kamu; atau

- b. Memberikan pakaian kepada sepuluh orang miskin; atau
 - c. Memerdekakan seorang budak; atau kamu tidak sanggup juga maka
 - a. Hendaklah kamu berpuasa tiga hari.
- 5) Putusnya perkawinan karena *Zihâr*

Salah satu perceraian antara suami isteri yang merupakan wewenang hakim untuk menetapkan putusnya yakni bila suami menyatakan kepada isterinya bahwa isterinya itu disamakan dengan ibunya sendiri. *Zihâr* adalah salah satu bentuk perceraian di zaman jahiliyyah, bila suami tidak menyukai isterinya lagi dan juga tidak menginginkan isterinya itu kawin dengan laki-laki lain sekiranya isterinya telah diceraikannya. Dengan datangnya aturan Islam *zihar* itu tidak lagi dibenarkan, karena men-*zihar* isteri dengan menyamakannya dengan ibu berarti mengucapkan perkataan dusta dan mungkar. Suami yang terlanjur men-*zihar* isterinya agar menarik kembali men-*zihar* nya dengan diwajibkan membayar *kaffarat* (denda) dengan memerdekakan seorang budak sebelum melakukan hubungan suami isteri. Jika suami tidak mampu memerdekakan budak hendaklah ia berpuasa dua bulan berturut-turut, dan jika juga tidak mampu maka hendaklah ia memberi makan 60 orang miskin. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT QS. Al-Mujâdalah (58): 3 dan 4

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْ
قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكُمْ تُوَعُّظُونَ بِهِ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٥٨﴾

“Dan mereka yang men-*zihar* isterinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Mujâdalah (58): 3)

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۖ
فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ



“Maka barangsiapa yang tidak dapat (memerdekakan hamba sahaya), maka (dia wajib) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barangsiapa yang tidak mampu, maka (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang sangat pedih”. (QS. Al-Mujâdalah (58): 4)

Sekiranya suami tidak ingin kembali lagi kepada isterinya, agar isterinya tidak terkatung-katung, maka suami diberi waktu 4 (empat) bulan untuk menentukan apakah ia akan kembali kepada isterinya dengan membayar *kaffarat* ataukah akan menceraikan isterinya,

maka dalam hal ini isteri berhak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan. Dengan demikian hakim dapat mengabulkan gugatan isteri bila terbukti kebenarannya.

6) Putusnya perkawinan karena meninggal dunia (kematian)

Putusnya perkawinan karena kematian, terjadi karena salah satu pihak dalam perkawinan meninggal dunia, apakah itu suami atau istri, yang lebih dulu atau pun para pihak suami dan istri secara bersamaan meninggal dunia.

Putusnya perkawinan karena kematian, merupakan kejadian yang berada diluar kehendak atau kuasa dari para pihak dalam perkawinan. Tidak terdapat campur tangan dari pasangan yang hidup lebih lama ataupun campur tangan pengadilan dalam hal ini. Putusnya perkawinan karena kematian sepenuhnya merupakan kehendak atau kuasa dari Allah.⁶¹ Putusnya perkawinan karena kematian lazim disebut dalam masyarakat kita dengan istilah **cerai mati**.⁶²

Berdasarkan **Pasal 38** UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan menjadi putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Namun, dalam UUP tersebut tidak disebutkan secara khusus definisi dari cerai hidup dan cerai mati.

Cerai hidup dan cerai mati dapat kita temui dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan

⁶¹ Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h.

⁶² Asevy Sobari, Advokat & Konsultan Hukum, [https:// www.blogger.com/profile/09735696252797569363](https://www.blogger.com/profile/09735696252797569363), Akses 14 Februari 2015

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni dalam beberapa pasal berikut:

Pasal 8:

Putusnya perkawinan selain “cerai mati” hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, *khuluk*, atau putusan taklik talak.

Pasal 96:

- (1) Apabila terjadi **cerai mati**, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditanggungnya sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Walaupun dengan kematian suami tidak dimungkinkan hubungan mereka disambung lagi, namun bagi isteri yang kematian suami tidak boleh segera melaksanakan perkawinan baru dengan laki-laki lain. Si isteri harus menunggu masa iddahnya⁶³ habis yang lamanya empat bulan sepuluh hari.

7) Putusnya Perkawinan karena Putusan Pengadilan

Putusnya Perkawinan karena putusan Pengadilan ini, sebagaimana ditunjukkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 114 dan Pasal 115.

⁶³ *Iddah*, ialah masa menunggu atau tenggang waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu mana si suami boleh merujuk kembali isterinya; sehingga pada masa *iddah* ini si isteri belum boleh melangsungkan perkawinan baru dengan laki-laki lain.

Menurut Pasal 115 menyatakan bahwa: perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak ber-hasil mendamaikan kedua belah pihak (suami dan istri),

Kekuasaan Kehakiman (*Judicial Power*) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) dilakukan dan dilaksanakan oleh empat lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁶⁴ Keempat lingkungan peradilan yang berada dibawah MA ini merupakan penyelenggara kekuasaan di bidang yudikatif. Oleh karena itu secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (*state court*).⁶⁵

Masing-masing lingkungan peradilan terebut memiliki wewenang mengadili perkara dan meliputi badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus, yang berwenang mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Sedangkan Peradilan Umum merupakan peradilan yang

⁶⁴ Menurut amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan sekarang diganti dengan Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004

⁶⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h. 180-181; Lihat Juga, A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 137-146

berwenang mengadili perkara-perkara perdata dan perkara-perkara pidana bagi rakyat pada umumnya.⁶⁶

Kewenangan masing-masing lingkungan peradilan diantaranya: Peradilan Umum, sebagaimana yang digariskan Pasal 50 dan Pasal 51 UU No. 2 Tahun 1986 jo. UU. No. 8 Tahun 2004 jo. UU. No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum hanya berwenang mengadili perkara pidana dan perdata (perdata umum dan khusus). Sehingga Pengadilan Negeri sebagai bagian dari Peradilan Umum sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 50 dan 51 UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum memiliki kewenangan diantaranya, yaitu di bidang perdata umum. Kewenangan yang dimilikinya itu berlaku bagi rakyat pada umumnya. Salah satu diantara sengketa perdata umum yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri adalah sengketa di bidang perceraian bagi rakyat yang bukan beragama Islam. Terjadinya sengketa perceraian di kalangan rakyat yang bukan beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksanya.

Pengadilan Agama, sebagai salah satu lembaga Peradilan Khusus merupakan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam menyelesaikan sengketa yang muncul dikalangan orang-orang yang beragama Islam. Dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa Peradilan Agama memiliki wewenang terhadap persoalan yang menyangkut dengan perkawinan, kewarisan, wakaf, sadaqah, wasiat, hibah, dan sengketa di bidang Ekonomi Syari'ah.

⁶⁶ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 159

Kekuasaan Pengadilan itu diatur dalam Bab III Pasal 49 sampai dengan pasal 53 UU No. 7 Tahun 1989, dan di dalam ketentuan Pasal 49 dinyatakan:

- (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang a. Perkawinan; b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. Wakaf dan shadaqah;
- (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku;
- (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Salah satu cakupan kekuasaan absolut Pengadilan Agama adalah bidang perkawinan. Kekuasaan badan peradilan di bidang tersebut semakin bertambah, terutama sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974. Menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain adalah:

1. Izin beristeri lebih dari satu orang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;

4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh PPN;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;
8. Perceraian karena talaq;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Mengenai penguasaan anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal usul seorang anak;

21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain;

Dari 22 perkara tersebut, terdapat enam perkara yang relatif cukup besar diterima dan diselesaikan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama, dua perkara perkawinan dan empat perkara perceraian. Perkara perceraian tersebut meliputi penetapan izin ikrar *ṭalaq*, *ta'lik ṭalaq*, *fasakh*, dan perceraian.

D. Alasan Perceraian

Berkenaan dengan perceraian yang terjadi, menurut hukum perdata perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan undang-undang. Dalam kaitannya dengan hal ini ada dua pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah “bubaranya perkawinan” dan istilah “perceraian”. Perceraian adalah salah satu sebab dari bubaranya perkawinan.⁶⁷

Alasan Perceraian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 209 KUH Perdata disebutkan alasan-alasan perceraian adalah:

1. Zina, berarti terjadinya hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang yang telah menikah dengan orang lain yang bukan isteri atau suaminya. Perzinaan itu sendiri harus

⁶⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2006), cet, 4, hlm. 445

dilakukan dengan kesadaran, dan yang bersangkutan melakukan dengan bebas karena kemauan sendiri tanpa paksaan, dalam kaitan ini pemerkosaan bukanlah merupakan perzinaan, demikian pula seorang gila atau sakit ingatan atau orang yang dihipnotis atau pula dengan kekerasan pihak ketiga tidaklah dapat disebut melakukan perzinaan.

2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja. Kalau gugatan untuk bercerai didasarkan pada alasan bahwa pihak yang satu pergi meninggalkan pihak lain, maka menurut Pasal 211 KUH Perdata gugatan itu baru dapat diajukan setelah lampau lima tahun dihitung dari saat pihak lain meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sebab yang sah. Selanjutnya Pasal 218 menentukan, bahwa gugatan itu gugur apabila pulang kembali dalam rumah kediaman bersama. Tetapi apabila kemudian ia pergi lagi tanpa sebab yang sah, maka ia dapat digugat lagi setelah lampau 6 bulan sesudah saat perginya yang kedua kali.
3. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan. Dalam hal ini bila terjadi hal yang mengakibatkan adanya penghukuman penjara yang harus dijalankan oleh salah satu pihak selama 5 tahun atau lebih, pihak yang lain dapat mengajukan tuntutan untuk memutuskan perkawinan mereka, sebab tujuan perkawinan tidak lagi dapat berjalan sebagaimana diharapkan oleh masing-masing pihak yang harus hidup terpisah satu sama lain. Disini bukan berarti adanya hukuman penjara tersebut menjadi alasan semata-mata untuk menuntut perceraian, tetapi hukuman itu akan memberi akibat yang mengganggu ketentuan dan kebahagiaan rumah tangga.

4. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh suami atau isteri terhadap isteri atau suaminya, yang demikian sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan. Alasan ini semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 5 ditegaskan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:
 - a. Kekerasan fisik;
 - b. Kekerasan psikis;
 - c. Kekerasan seksual;
 - d. Penelantaran rumah tangga”.⁶⁸

Alasan Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan lahirnya Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang diundangkan tanggal 2 Januari 1974 sebagai hukum positif dan berlaku efektif setelah disahkannya Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan Undang-undang perkawinan, maka perceraian tidak dapat lagi dilakukan dengan semena-mena seperti yang terjadi sebelumnya.

Alasan-alasan perceraian menurut Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 disebutkan dalam Pasal 39.⁶⁹ Dari ketentuan Pasal 39 ayat 2 ini maka perceraian akan dikabulkan oleh hakim hanya jika ada cukup alasan, artinya bahwa sebuah perceraian tidak serta merta digantungkan pada kehendak pihak yang menginginkannya, namun harus

⁶⁸ Pasal 5 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

⁶⁹ Pasal 39 ayat (1) dan (2) UUP No 1 tahun 1974: “(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan siding Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak; (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”

ada cukup alasan. Apa saja yang dimaksud dengan alasan tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut pada UU Perkawinan, untuk itu kita harus melihat penjelasannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP 9/1975), dalam Pasal 19 dikatakan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

"Alasan atau alasan-alasan" artinya, perceraian dapat diajukan berdasarkan satu alasan saja atau dapat pula berdasarkan lebih dari satu alasan/akumulasi dari yang ditentukan tersebut. Alasan atau alasan-alasan itulah yang nantinya akan diuji oleh majelis hakim dalam agenda pembuktian di persidangan.

Secara tidak langsung ketentuan tentang alasan perceraian ini memberikan perlindungan kepada istri yang sering kita dengar mendapatkan pernyataan "cerai liar" dari suami tanpa suatu proses

peradilan. "Cerai liar" ⁷⁰ atau yang lebih dikenal dengan (Cerai di bawah tangan) yang dilakukan suami tidak didepan sidang pengadilan yang ditetapkan untuk itu, dengan demikian tidak dapat menguji alasan dari sang suami menceraikan sang istri. Proses pengujian di sidang pemeriksaan Pengadilan inilah yang melindungi pihak istri dari pernyataan "cerai liar" yang dilakukan suami yang dilakukan secara serampangan, tanpa alasan dan tanpa pembuktian.

⁷⁰ Meminjam dan mengutip istilah Asevy Sobari, Advokat & Konsultan Hukum, <http://asevysobari.blogspot.com/2014/11/alasan-perceraian.html>, Akses 12 Februari 2015

BAB V NIKAH *MUT'AH*

A. Pengertian Nikah *Mut'ah*

Yang dimaksud nikah *mut'ah* adalah, seseorang menikah dengan seorang wanita dalam batas waktu tertentu, dengan sesuatu pemberian kepadanya, berupa harta, makanan, pakaian atau yang lainnya. Jika masanya telah selesai, maka dengan sendirinya mereka berpisah tanpa kata talak dan tanpa warisan.¹

Bentuk pernikahan ini, seseorang datang kepada seorang wanita tanpa harus ada wali atau saksi. Kemudian mereka membuat kesepakatan *mahar* (upah) dan batas waktu tertentu. Misalnya tiga hari atau lebih, atau kurang. Biasanya tidak lebih dari empat puluh lima hari; dengan ketentuan tidak ada *mahar* kecuali yang telah disepakati, tidak ada nafkah, tidak saling mewariskan dan tidak ada *iddah* kecuali *istibra`* (yaitu satu kali haid bagi wanita *monopouse*, dua kali haid bagi wanita biasa, dan empat bulan sepuluh hari bagi yang suaminya meninggal), serta tidak ada *nasab* kecuali jika disyaratkan.²

Kata nikah dalam bahasa arab yang berarti menghimpun atau mengumpulkan³, secara umum pengertian

¹ Jami' *Ahkamu Nisaa`* (3/169-170), dan lihat juga definisinya di dalam *Subulus Salam*, Ash Shan'ani, Darul Kutub Ilmiah (3/243); *al Mughni*, Ibnu Qudamah, Dar Alam Kutub (10/46)

² ash Shan'ani, *Subulus Salam*, *Loc Cit.*

³ Abi Zakariya al Anshari, *Fathul Wahhab*, *Syarah minhajut tulhab*, Syirkah Izamatuddin, juz II, tt, h. 30 .

nikah (diluar definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqih) adalah salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami isteri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi,⁴ yang karenanya hubungan badan menjadi halal;⁵ Sedangkan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974, tidak disebutkan istilah nikah tapi perkawinan, yang berarti; ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita.

Disebutkan dalam QS. ar-Rum (30): 21;⁶ dalam hal ini tujuan perkawinan dimaksudkan agar terciptanya kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Begitu juga, disebutkan dalam QS. an-Nahl (16): 72,⁷ QS. an-Nisâ' (4): 1, 9; untuk tujuan regenerasi dan/atau pengembangbiakan manusia (*reproduksi*).⁸ Dengan tercapainya tujuan *reproduksi*,

⁴ *Esiklopedi Hukum Islam* (editor: Abdul Aziz Dahlan), PT. Ichtiar Baru Van Hove, jilid 4, Jakarta. cet. I, 1966, h. 1329.

⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, penerjmh. M. Abdul Ghoffar, E.M, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2004, h. 3 ; Lihat, M. Quraisy Syihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i, atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet.k6, Mizan, Bandung, 1997, h. 191

⁶ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. ar-Rum (30): 21)

⁷ Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?" (QS. an-Nahl (16): 72)

⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia*, Op. Cit, 226; Lihat juga: Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, ACAdemia, Tazaza, Yogyakarta, 2004, h. 40.

maka tujuan memenuhi kebutuhan biologis, sebagaimana difirmankan dalam QS.al-Ma'ârij (70): 29-31, QS. al-Baqarah (2): 187, 223 dan QS. an-Nur (24): 33, akan dengan sendirinya tercapai, sekaligus terciptanya ketenangan dan cinta kasih dalam kehidupan keluarga.

Ketika menafsirkan QS. an-Nisâ' (4): 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ط كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ^ع
وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
مُسْفِحِينَ^ع فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً^ع وَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ^ع فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ^ع إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا

"Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki⁹ sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu perempuan-perempuan yang demikian itu, jika kamu¹⁰ berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka mas kawinnya (maharnya) kepada mereka, sebagai

⁹ Maksudnya: perempuan-perempuan yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersamanya.

¹⁰ Ialah: selain dari macam-macam wanita yang tersebut dalam QS. An Nisa' ayat 23 dan 24.

suatu kewajiban; tetapi tiadalah mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan (ditetapkan) mahar itu.¹¹ Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Al-Khazin (salah seorang Mufasssir Sunni) menjelaskan definisi nikah *mut'ah*, “dan menurut sebagian kaum (ulama), yang dimaksud dengan hukum yang terkandung dalam ayat ini ialah nikah *mut'ah*, yaitu seorang pria menikahi seorang wanita sampai jangka waktu tertentu dengan memberikan mahar sesuatu tertentu, dan jika waktunya telah habis maka wanita itu terpisah dari pria itu dengan tanpa talak (cerai), dan ia (wanita itu) harus ber*istibrâ'* (menanti masa iddahnya selesai dengan memastikan kesuciannya, dan tidak adanya janin dalam kandungannya), serta tidak ada hak waris antara keduanya. Nikah ini boleh/halal di awal masa Islam kemudian diharamkan oleh Rasulullah saw.”¹².

B. Disyari'atkannya Nikah *Muṭ'ah*

Telah disepakati bahwa nikah *muṭ'ah* telah disyari'atkan dalam Islam, seperti juga halnya dengan nikah *ḍa'im* (permanen). Semua kaum Muslim dari berbagai mazhab dan aliran tanpa terkecuali telah sepakat, bahwa nikah *muṭ'ah* telah ditetapkan dan disyari'atkan dalam Islam. Bahkan hal itu dapat digolongkan hal *ḍaruriyat minaddin* (yang gamblang dalam agama). Alqur'an dan sunah telah menegaskan disyari'atkannya nikah *muṭ'ah*. Hanya saja terjadi perbedaan

¹¹ Bisa jadi untuk menambah, mengurangi atau tidak membayar sama sekali maskawin yang telah ditetapkan.

¹² Tafsir Khazin (*Lubab at-Ta'wiil*).1, 506.

pendapat tentang apakah ia kemudian ***dimansukhkan*** atau ***tidak***?

Al-Maziri seperti dikutip an-Nawawi mengatakan, “Telah tetap (terbukti) bahwa nikah *mut’ah* adalah boleh hukumnya di awal Islam....”¹³ namun oleh Nabi Saw pada akhirnya dilarang.

Ibnu Hajar mendefinisikan nikah *mut’ah*, “ialah menikahi wanita sampai waktu tertentu, maka jika waktu itu habis terjadilah perpisahan, dan difahami dari kata-kata Bukhari bahwa ia sebelumnya mubah, boleh dan sesungguhnya larangan itu terjadi pada akhir urusan.”¹⁴

Al-Syaukâni juga menegaskan bahwa nikah *mut’ah* adalah **pernah diperbolehkan** dan disyari’atkan dalam Islam, kemudian katanya dilarang oleh Nabi Saw, ia berkata, “Jumhur ulama berpendapat sesungguhnya yang dimaksud dengan ayat ini ialah nikah *mut’ah* yang berlaku di awal masa Islam. Pendapat ini dikuatkan oleh *qira’at* Ubai ibn Ka’ab, Ibnu Abbas dan Said ibn Jubair dengan tambahan إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى (sampai jangka waktu tertentu)¹⁵

Ibnu Kaşir menegaskan, “Dan keumuman ayat ini dijadikan dalil nikah *mut’ah*, dan tidak diragukan lagi bahwa

¹³ *Sahih Muslim* dengan syarah al-Nawawi. 9179, Bab *Nikah al-Mut’ah*.

¹⁴ *Fathu al-Bâri*.19, 200, *Kitabun- Nikah*, bab Nahyu an-Nabi saw. ‘an Nikah al-Mut’ah Akhiran (bab tentang larangan Nabi saw. akan nikah mut’ah pada akhirnya).

¹⁵ *Tafsir Fathu al-Qadir*.1, 449.

sesungguhnya nikah *muṭ'ah* itu ditetapkan dalam *syari'at* pada awal Islam, kemudian setelah itu **dimansukhkan....**"¹⁶

C. Nikah *Muṭ'ah* antara Boleh dan Tidak

1. Dasar dibolehkannya Nikah *Muṭ'ah*

Nikah *muṭ'ah*, pada awal Islam -saat kondisi darurat- diperbolehkan, kemudian datang naṣ-naṣ yang melarang hingga hari Kiamat.

Diantara hadis yang menyebutkan dibolehkannya nikah *muṭ'ah* pada awal Islam ialah:

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن النبي ص نهي عن المتعة وعن لحوم الحمر لأحلية زمن خيبر

"Dari Ali bin Abi Thalib R.a berkata: "Sesungguhnya Rasulullah melarang nikah *muṭ'ah* dan memakan daging khimar jinak pada waktu perang Khaibar".¹⁷

عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّكَ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ , وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيلَهُ , وَلَا تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ."

¹⁶ *Tafsir Ibnu Katsir*.1, 474.

¹⁷ HR. Bukhari , 5115, dan HR. Muslim, 1407.

Dari Rabi` bin Sabrah, dari ayahnya R.a, bahwasanya ia bersama Rasulullah Saw, lalu beliau bersabda: “Wahai, sekalian manusia. Sebelumnya aku telah mengizinkan kalian melakukan *muṭ’ah* dengan wanita. Sesungguhnya Allah Swt telah mengharamkannya hingga hari Kiamat. Barangsiapa yang mempunyai sesuatu pada mereka, maka biarkanlah! Jangan ambil sedikitpun dari apa yang telah diberikan”.¹⁸

وَعَنْهُ قَالَ : أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ
حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ثُمَّ لَمْ نُخْرِجْ حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا

Dari beliau, juga berkata: “Rasulullah Saw memerintahkan kami untuk *muṭ’ah* pada masa penaklukan kota Makkah, ketika kami memasuki Makkah. Belum kami keluar, beliau Nabi Saw telah mengharamkannya atas kami”.¹⁹

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أُوطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ هَيَّ عَنْهَا

“Dari Salamah bin Akwa` R.a, ia berkata: “Rasulullah Saw telah memberikan keringanan dalam *muṭ’ah* selama tiga hari pada masa perang

¹⁸ HR Muslim, 9/159, (1406), HR. Ahmad 3/404, HR. Thabrani dalam Al-Kabir, 6536, HR. Baihaqi 7/202, HR. Ad-Darimi 2/140

¹⁹ HR Muslim, 9/159, (1406).

Awthas (juga dikenal dengan perang Hunain), kemudian beliau melarang kami”.²⁰

2. Dasar diharamkannya Nikah *Muṭ'ah*

Nikah *muṭ'ah* telah diharamkan oleh Islam dengan dalil Kitab (al-Qur'an), Sunnah, Ijma', dan secara akal (*qiyas*).

a. Berdasarkan QS.Al-Ma'ârij (70): 29-31:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٩﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَلَهُنَّ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾ فَمَنْ أَبْغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

“dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki,²¹ Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di luar itu,²² Maka mereka Itulah orang-orang

²⁰ HR Muslim, 9/157, (1405). dan HR.Muslim 1023

²¹ Maksudnya: hamba sahaya (budak-budak) belian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir. Dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu, perempuan-perempuan yang ditawan biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu, dan kebiasaan ini bukanlah suatu yang diwajibkan. imam boleh melarang kebiasaan ini.

²² Maksudnya: seperti zina, homo seksual, lesbian dan sebagainya.

yang melampaui batas”. (QS.Al-Ma`ârij (70): 29-31)

Ayat ini menerangkan bahwa, sebab disahkannya berhubungan badan hanya melalui dua cara. Yaitu: nikah Şahih dan perbudakan. Sedangkan wanita *muṭ'ah*, bukanlah istri dan bukan pula budak.²³

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ
فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ
وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَتٍ غَيْرِ مُسَفِّحَتٍ وَلَا
مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ
الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman, dari hamba sahaya yang kamu miliki.

²³ Mahmud Syukri al Alusi, *Mukhtashar Itsna Asy'ariah*, h. 228.

Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah sebagian dari yang lain,²⁴ karena itu nikahilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin yang pantas (patut), karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami. (Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(QS, An-Nisâ’ (4): 25)

Ada dua alasan yang dapat dipetik dari ayat ini:

Pertama, jika nikah *muṭ’ah* diperbolehkan, maka tidak ada lagi alasan untuk tidak melakukannya bagi orang yang kesulitan menjaga diri atau keperluan untuk menikahi hamba sahaya atau bersabar untuk tidak menikah.²⁵

²⁴ Maksudnya: orang merdeka dan budak yang dikawininya itu adalah sama-sama keturunan Adam dan Hawa dan sama-sama beriman.

²⁵ Mahmud Syukri al Alusi, *Mukhtashar Itsna Asy’ariah*, Loc Cit

Kedua, ayat ini merupakan larangan terhadap nikah *muṭ'ah*, karena Allah Swt berfirman “karena itu nikahilah mereka dengan seizin tuan mereka”. Sebagaimana diketahui, bahwa nikah seizin orang tua atau wali, itulah sebenarnya nikah yang disyari'atkan, yaitu dengan wali dan dua orang saksi. Adapun nikah *muṭ'ah*, tidak mensyari'atkan demikian.²⁶

b. **Dalil dari Sunnah**

Semua riwayat yang telah dipaparkan di atas, dapat dipahami merupakan dalil haramnya nikah *muṭ'ah*.

Dalil-dalil dari hadis yang mengharamkannya-pun jelas dan sahih lagi, sehingga tidak ada alasan bagi kita saat ini untuk menghalalkannya.

c. **Dalil Ijma`**

Para ulama *ahlussunnah* menyebutkan, bahwa seluruh umat Islam telah sampai pada posisi *ijma'* tentang pengharamannya. Para ulama telah sepakat menyatakan bahwa dalil yang pernah menghalalkan nikah *muṭ'ah* itu telah **dimansukhkan sendiri oleh Rasulullah**. Tidak ada satu pun kalangan ulama ahli sunnah yang menghalalkannya kecuali oleh ulama **syi'ah sendiri**. Diantara pernyataan tersebut adalah:

- 1) Perkataan Ibnul 'Arabi *rahimahullah*, sebagaimana Al Qurṭubi berkata, “Telah berkata Ibnul 'Arabi,

²⁶ al Qurṭhubi, *Jami' Ahkamil Qur'an*, (5/130).

‘Adapun *muṭ’ah*, maka ia termasuk salah satu keunikan *syari’ah*; karena *muṭ’ah* diperbolehkan pada awal Islam, kemudian diharamkan pada perang Khaibar, lalu diperbolehkan lagi pada perang Awthas kemudian diharamkan setelah itu, dan berlangsung pengharaman. Dan *muṭ’ah* -dalam hal ini- tidak ada yang menyerupainya, kecuali permasalahan kiblat, karena *nasakh* (penghapusan) terjadi dua kali, kemudian baru hukumnya stabil’.”²⁷

- 2) Imam Thahawi berkata, “Umar telah melarang *muṭ’ah* dihadapan para sahabat Rasulullah, dan tidak ada seorangpun yang mengingkarinya. Ini menunjukkan, bahwa mereka setuju dan menuruti apa yang telah dilarang. Dan juga bukti *Ijma’* mereka atas larangan tersebut adalah, bahwa hukum tersebut telah dihapus.”²⁸
- 3) Qaḍi Iyaḍ berkata, “Telah terjadi *Ijma’* dari seluruh ulama atas pengharamannya, kecuali dari kalangan Rafīḍah (kelompok Syi’ah)”.²⁹
- 4) Disebutkan oleh al Khattabi: “Pengharaman *muṭ’ah* nyaris menjadi sebuah *Ijma’* (maksudnya *Ijma’* kaum Muslimin), kecuali dari sebagian Syi’ah”.³⁰

²⁷ al Qurthubi, *Jami’ Ahkamil Qur’an*, Dar Syi’ib (5/130-131).

²⁸ Syarh Ma’anil Atsar (3/27).

²⁹ Ibnu Hajar *Fathul Bari*, (9/173).

³⁰ Khattabi, *Aunul Ma’bud*, Darul Kutub Ilmiah (6/59).

d. Alasan dari Akal dan Qiyas ³¹

- 1) Sesungguhnya nikah *mut'ah* tidak mempunyai hukum standar, yang telah diterangkan dalam kitab dan Sunnah dari talak, iddah dan waris, maka ia tidak berbeda dengan pernikahan yang tidak sah lainnya.
- 2) 'Umar telah mengumumkan pengharamannya dihadapan para sahabat pada masa khilafahnya dan telah disetujui oleh para sahabat. Tentu mereka tidak akan mengakui penetapan tersebut, jika pendapat 'Umar tersebut salah.
- 3) Haramnya nikah *mut'ah*, dikarenakan dampak negatif yang ditimbulkannya sangat banyak. Antara lain:
 - a) Bercampurnya *nasab*, karena wanita yang telah dimut'ah oleh seseorang dapat dinikahi lagi oleh anaknya, dan begitu seterusnya.
 - b) Disia-siakannya anak hasil *mut'ah* tanpa pengawasan sang ayah atau pengasuhan sang ibu, seperti anak zina.
 - c) Wanita dijadikan seperti barang murahan, pindah dari tangan ke-tangan yang lain, dan sebagainya.

³¹ lihat Muhammad Malullah, *asy Syi'ah wal Mut'ah*, Maktabah Ibnu Taimiyah, h..19; Mahmud Syukri al-Alusi, *Mukhtashar Itsna Asy'ari'ah*, h. 227-228 dan Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (II, h. 130-131).

e. Pendapat Para Ulama

Berdasarkan hadis-hadis tersebut di atas, para ulama berpendapat sebagai berikut:

- 1) **Mazhab Hanafi**; Imam Syamsuddin Al-Sarkhasi (wafat 490 H) dalam kitabnya *Al-Mabsuṭ* (V/152) mengatakan: “Nikah *muṭ’ah* ini batil menurut mazhab kami. Demikian pula Imam Ala al-Din al-Kasani (wafat 587 H) dalam kitabnya *Bada’i al-Sanâ’i fî Tartib al-Syarâ’i* (II/272) mengatakan, “Tidak boleh nikah yang bersifat sementara, yaitu nikah *muṭ’ah*”.
- 2) **Mazhab Maliki**; Imam Ibnu Rusyd (wafat 595 H) mengatakan, “hadis-hadis yang mengharamkan nikah *muṭ’ah* mencapai peringkat mutawatir”³² Sementara itu Imam Malik bin Anas (wafat 179 H) mengatakan, “Apabila seorang lelaki menikahi wanita dengan dibatasi waktu, maka nikahnya batil.”³³
- 3) **Mazhab Syafi’i**; Imam Syafi’i (wafat 204 H) dalam kitabnya *al-Umm* (V/85) mengatakan, “Nikah *muṭ’ah* yang dilarang itu adalah semua nikah yang dibatasi dengan waktu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, seperti ucapan seorang lelaki kepada seorang perempuan, aku nikahi kamu selama satu hari, sepuluh hari atau satu bulan.” Sementara itu Imam Nawawi (wafat 676 H) dalam

³² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid* (IV/325 s.d 334).

³³ Imam Malik bin Anas, *Al-Mudawanah Al-Kubra* (II/130)

kitabnya *al-Majmu'* (XVII/356) mengatakan, “Nikah *muṭ'ah* tidak diperbolehkan, karena pernikahan itu pada dasarnya adalah suatu aqad yang bersifat mutlaq, maka tidak sah apabila dibatasi dengan waktu.”³⁴

- 4) **Madzhab Hambali**, Imam Ibnu Qudamah (wafat 620 H) dalam *Al-Mughni* mengatakan, “Nikah *muṭ'ah* ini adalah nikah yang batil.”³⁵ Ibnu Qudamah juga menukil pendapat Imam Ahmad bin Hambal (wafat 242 H) yang menegaskan bahwa nikah *muṭ'ah* adalah haram.

Masih banyak lagi kesesatan dan penyimpangan Syi'ah. Kami ingatkan kepada kaum muslimin agar waspada terhadap ajakan para propagandis Syi'ah yang biasanya mereka berkedok dengan nama “Wajib mengikuti mazhab *Ahlul Bait*”, sementara pada hakikatnya *Ahlul Bait* terlepas diri dari mereka, itulah manipulasi mereka. Semoga Allah selalu membimbing kita kejalan yang lurus berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman *Salafus Ṣalih*.

D. Kajian Psikologis, Sosiologis dan Filosofis

Al-Baihaqi berkata dari Ja'far bin Muhammad bahwa beliau ditanya tentang nikah *muṭ'ah* dan jawabannya adalah bahwa nikah *muṭ'ah* itu adalah zina itu sendiri.

³⁴ Imam Nawawi, *Al-Majmu'* (XVII/356)

³⁵ Imam Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (X/46)

Selain itu nikah *muṭ'ah* sama sekali tidak sejalan dengan tujuan dari pernikahan secara umum, karena tujuannya bukan membangun rumah tangga *sakinah*. Sebaliknya tujuannya semata-mata mengumbar hawa nafsu dengan imbalan uang. Merendahkan harkat perempuan karena perempuan dipandang sebagai obyek seksual kaum pria belaka. Berpeluang disalahgunakan dan hanya sebagai pelampiasan hawa nafsu.

Apalagi bila dikaitkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang *Ṣalih* dan *Ṣalihah*. Semua itu jelas tidak akan tercapai lantaran nikah *muṭ'ah* memang tidak pernah bertujuan untuk mendapatkan keturunan. Tetapi untuk kenikmatan seksual sesaat. Tidak pernah terbersit untuk nantinya punya keturunan dari sebuah nikah *muṭ'ah*. Bahkan ketika dahulu sempat dihalalkan di masa Nabi yang kemudian segera diharamkan, para sahabat-pun tidak pernah berniat membentuk rumah tangga dari nikah *muṭ'ah* itu.

Ungkapan bahwa nikah *muṭ'ah* itu adalah zina dibenarkan oleh Ibnu Umar. Dan sebagai sebuah kemungkaran, pelaku nikah *muṭ'ah* diancam dengan hukum rajam, karena tidak ada bedanya dengan zina. Ibnu Umar telah berkata bahwa Rasulullah memberi izin untuk nikah *muṭ'ah* selama tiga hari, lalu beliau mengharamkannya.³⁶ Lebih lanjut tentang pelaku nikah *muṭ'ah* ini, fuqaha dari kalangan sahabat Umar berkata,

³⁶ Lihat; HR Muslim, 9/157, (1405). dan HR.Muslim 1023; dan lihat juga,Tafsir Khazin (*Lubab at-Ta'wîl*).1, 506.

"Demi Allah, takkan kutemui seorang pun yang menikah *muṭ'ah* padahal dia *muhṣan* kecuali aku merajamnya."³⁷

Nikah *muṭ'ah* identik dengan penyakit kelamin yang memalukan. Dampak negatif dari nikah *muṭ'ah* ini seperti yang banyak didapati kasusnya adalah beredarnya penyakit kelamin semacam *sphilis*, raja singa dan sejenisnya di kalangan mereka yang menghalalkannya. Karena pada hakikatnya nikah *muṭ'ah* itu memang zina. Sungguh amat memalukan ada wanita yang rapi berjilbab, menutup aurat dan mengesankan dirinya sebagai wanita baik-baik, tetapi datang ke-dokter spesialis gara-gara terkena penyakit khas para pelacur. *Na`ūzu billâhi min zâlik!*

Mereka yang menghalalkan *muṭ'ah*, tidak rela anak wanitanya dinikahi secara *muṭ'ah*. Ini adalah dalil bahwa nikah *muṭ'ah* itu bertentangan dengan fitrah manusia. Seandainya orang-orang yang menghalalkan nikah *muṭ'ah* itu punya anak wanita yang disayangnya, dipelihara dengan kasih sayang, dibesarkan dan diberikan pendidikan serta rizki yang cukup, lalu setelah besar hanya dijadikan piala bergilir oleh laki-laki manapun yang mau membayarnya, dengan beberapa uang receh, tentu saja hatinya menjerit untuk menolak nikah *muṭ'ah*.

Sungguh aneh melihat ada orang tua yang rela anak perempuannya disetubuhi hanya berdasarkan kesepakatan kontrak dan menerima bayaran dari jasa kenikmatan. Sungguh nikah *muṭ'ah* tidak ada bedanya dengan pelacuran yang dilegalkan.

Adapun hikmah atau rahasia dibolehkannya kawin *muṭ'ah* waktu itu, ialah karena masyarakat Islam waktu itu

³⁷ lihat Muhammad Malullah, *asy Syi'ah wal Mut'ah*, Maktabah Ibnu Taimiyah, h..19

masih dalam suatu perjalanan yang kita istilahkan dengan masa transisi, masa peralihan dari jahiliyah kepada Islam. Sedang perzinahan di masa jahiliyah merupakan satu hal yang biasa dan tersebar di mana-mana. Maka setelah Islam datang dan menyerukan kepada pengikutnya untuk pergi berperang, dan jauhnya mereka dari isteri merupakan suatu **penderitaan** yang cukup berat. Sebagian mereka ada yang imannya kuat dan ada pula yang lemah. Yang imannya lemah, akan mudah untuk berbuat zina sebagai suatu perbuatan yang keji dan cara yang tidak baik.

Nikah *mut'ah* yang dibolehkan diawal Islam³⁸ jauh berbeda dengan nikah *mut'ah* menurut Syi'ah. Nikah Mut'ah Dalam Ajaran Syi'ah dan kesan Negatifnya adalah kawin yang dilakukan berdasarkan mahar tertentu. Masa berlakunya bisa setengah jam, bisa satu jam, satu hari, satu minggu, satu bulan dan seterusnya, sesuai dengan akad perjanjian di kedua belah pihak tergantung kesanggupan membayarnya.

Nikah *mut'ah* dalam sekte syi'ah memiliki lima syarat, yaitu:

1. Calon Istri
2. Calon Suami
3. Mahar
4. Batas Waktu
5. Ijab Kabul.

Nikah *mut'ah* ini tidak perlu wali dan tidak perlu saksi dan tidak ada hak waris-mewarisi.³⁹ Kalau ada anak yang lahir

³⁸ al Qurthubi, *Jami' Ahkamil Qur'an*, Dar Syi'ib (5/130-131).

³⁹ al Qurthubi, *Jami' Ahkamil Qur'an*, (5/130).

akibat *muṭ'ah* ini adalah menjadi tanggung jawab ibunya, karena *faraj* ibunya waktu melakukan nikah *muṭ'ah* tadinya sudah dibayar.

Di dalam *al Furu' Minal Kafi* 5/455 karya al-Kulaini, dia menyatakan bahwa Ja'far Ash-Shadiq pernah ditanya seseorang: "Apa yang aku katakan kepada dia (wanita yang akan dinikahi) bila aku telah berduaan dengannya?" Maka beliau menjawab: "Engkau katakan: Aku menikahimu secara *muṭ'ah* berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya, namun engkau tidak mendapatkan warisan dariku dan tidak pula memberikan warisan apapun kepadaku selama sehari atau setahun dengan upah senilai dirham demikian dan demikian." Engkau sebutkan jumlah upah yang telah disepakati baik sedikit maupun banyak." Apabila wanita tersebut mengatakan: "Ya" berarti dia telah *riḍa* dan halal bagi si pria untuk menggaulinya.⁴⁰ Ja'far Ash-Shadiq berkata: "Tidak apa-apa menikahi seorang wanita yang masih perawan bila dia *riḍa* walaupun tanpa izin kedua orang tuanya."⁴¹

E. Dampak Negative Nikah *Muṭ'ah* Ala Syi'ah

Diantara dampak negative nikah *muṭ'ah* ala syi'ah dapat diketahui sebagai berikut:

1. Banyak didapati kasusnya adalah, beredarnya penyakit kelamin semacam *sphilis*, raja singa dan sejenisnya di kalangan mereka yang menghalalkannya. Karena pada hakikatnya nikah *muṭ'ah* itu memang zina;

⁴⁰ *Al-Muṭ'ah Wa Atsaraha Fil-Ishlahil Ijtima'I*, h. 28-29 dan 31

⁴¹ Tahdzibul Ahkam 7/254.

2. "Merusak garis *nasab* manusia". Dalam nikah *mut'ah*, suami tidak bisa menceraikan istri sebelum masa kontrak selesai, namun ia (laki-laki) bisa menghadiahkan waktu *mut'ahnya* kepada laki-laki lain tanpa persetujuan istri;
3. Berpeluang disalahgunakan dan hanya sebagai pelampiasan hawa nafsu seksual belaka;
4. Merendahkan harkat perempuan, karena perempuan dipandang sebagai obyek seksual kaum pria belaka.⁴²

Ada beberapa perbedaan yang disebutkan Yusuf Jabir al-Muhammady dalam *Tahrimul Mut'ah fil Kitabi was Sunnah* sebagai bukti bahwa wanita yang dimut'ah bukanlah istri atau budak yang dimiliki.

Perbedaan tersebut adalah:

1. Wanita yang dimut'ah adalah wanita sewaan;
2. Tidak ada waris-mewarisi di antara pasangan *mut'ah*, sedangkan nikah *sunni* menimbulkan pewarisan antara keduanya;
3. Boleh *mut'ah* lebih dari 4 wanita bahkan (tidak terhitung/ribuan), artinya nikah *mut'ah* tidak membatasi jumlah istri, sedangkan nikah *sunni* dibatasi dengan jumlah istri hingga maksimal 4 orang;
4. *Mut'ah* selesai (jika habis masa/kontraknya) tanpa ada perceraian; dengan kata lain, bahwa *mut'ah* dibatasi oleh waktu, sedangkan nikah *sunni* tidak dibatasi oleh waktu;

⁴² Islamid. blogspot.com. *Nikah Mut'ah Menurut Kacamata Islam*,.Diposkan Sabtu, 17 Desember 2011, Akses, Desember 2013; lihat: <http://www.voa-islam.com/islam/aqidah/2010/04/06/4744/haramkah-nikah-mutah-yang-diagungkan-syiah/> Posted by Ummu Hanif at 9:52 AM

5. Pasangan *muṭ'ah* boleh kembali ke pasangan pertamanya sesuai kehendaknya walaupun sudah pernah diselingi pasangan lain ataupun tidak;
6. Boleh *muṭ'ah* dengan wanita musyrik;
7. 'Iddah *muṭ'ah* sama dengan 'iddah wanita sewaan;
8. Wanita yang di-*muṭ'ah* mendapat upah pada hari-hari yang ia datang pada pasangannya;
9. Orang yang *muṭ'ah* tidak dianggap sebagai orang yang sudah menikah (*muhṣan*);
10. Boleh *muṭ'ah* dengan wanita yang memiliki suami;
11. Boleh *muṭ'ah* dengan pelacur;
12. Boleh *muṭ'ah* dengan gadis selama tidak merusak kegadisannya karena dikhawatirkan akan menjadi aib bagi keluarganya (bahkan dengan bayi yang masih menyusui);
13. Tidak ada *li'an* dalam *muṭ'ah*;
14. Tidak ada *Zihar* dalam *muṭ'ah*;
15. Tidak ada *ila'* dalam *muṭ'ah*;
16. Tidak ada nafkah bagi wanita yang di-*muṭ'ah* (tidak mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istri), nikah *sunni* mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istri.
17. Tidak ada tempat tinggal bagi wanita dalam *muṭ'ah* ;
18. Boleh mensyaratkan dalam *muṭ'ah* untuk tidak melakukan *jima'*, calon istri dalam *muṭ'ah* bisa mensyaratkan dalam akadnya untuk tidak sampai ke tidur, sedangkan dalam nikah *sunni* tidak boleh mensyaratkan demikian;
19. Boleh melakukan '*azl* dalam *muṭ'ah* tanpa harus izin kepada wanita yang dimut'ah;
20. Tidak ada *khulu'* dalam *muṭ'ah*;

21. Boleh *mut'ah* dengan saudari istri sendiri (ipar) ⁴³
22. Nikah *mut'ah* berakhir dengan habisnya waktu yang ditentukan dalam akad atau *fasakh*, sedangkan nikah *sunni* berakhir dengan talaq atau meninggal dunia;
23. Nikah *mut'ah* dapat dilaksanakan tanpa wali dan saksi, sedangkan nikah *sunni* harus dilaksanakan dengan wali dan saksi;

Banyaknya perbedaan antara wanita yang di-*mut'ah* dengan wanita yang dinikahi atau budak yang dimiliki memperjelas bahwa wanita yang di-*mut'ah* bukanlah istri atau budak, sehingga *mut'ah* termasuk kemaluan yang diharamkan dan orang yang melakukannya termasuk melampaui batas. Oleh karena itu sejak ayat tersebut di atas diturunkan (ketika Rasulullah Saw hidup) ⁴⁴ maka menjadi haram hukum *mut'ah*.⁴⁵

F. Bentuk Ijab Qabul Nikah Mut'ah

Bentuk ijab qabul nikah *mut'ah* ini dilakukan dengan cara:
Calon Wanita Mengucapkan Ijab:

متّعتك نفسي في المدة المعلومة على المهر المعلوم

⁴³ [http://Nanang Soehendar.blogspot.com/](http://Nanang%20Soehendar.blogspot.com/), Nikah Mut'ah, diposkan Selasa, 17 Januari 2012, Akses 20 Desember 2013

⁴⁴ Lihat; QS.Al-Ma`ârij (70): 29-31; Lihat, Mahmud Syukri al Alusi, *Mukhtashar Itsna Asy'ariah*, h. 228.

⁴⁵ HR Muslim, 9/159, (1406).

(*Matta'tuka nafsiy fi al-muddati al-ma'lūmah `ala al-mahri al-ma'lumi*) artinya: saya mut'ahkan diri saya dengan anda dengan jangka waktu yg diketahui (disepakati) dan mahar yg diketahui (disepakati),

Bila calon wanita selesai mengucapkan *Ijab* maka **calon lelaki** dengan segera mengucapkan *Qabul* yaitu dengan kata *قبلت* (*Qabiltu*) Artinya “saya terima”, dengan selesainya ucapan *ijab qabul* maka sahlah kedua calon itu menjadi suami istri dan calon lelaki wajib memberikan maharnya dengan segera. Group ini dibentuk pada tanggal 5 Mei 2010, dan telah *dilike* oleh 827 orang sampai hari ini. Pada kolom perkenalannya tertulis “Nikah *mut'ah* dalam Islam dapat menyelesaikan masalah hubungan antar pria dan wanita yang ingin berniat menjauhi dosa besar yaitu berzina. dst.....” Na’uzubillah min zâlik.....

Padahal Rasulullah Saw bersabda, “Wahai manusia, aku pernah membolehkan kamu melakukan *mut'ah* dengan wanita. Kemudian Allah telah mengharamkan hal itu sampai hari kiamat. Oleh karena itu, jika masih ada yang memiliki wanita yang diperoleh melalui jalan *mut'ah* maka hendaklah ia melepaskannya dan janganlah kamu mengambil sedikit pun dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka” (HR. Muslim).⁴⁶

Hadiś ini juga merupakan salah satu dalil pertimbangan Majelis Ulama Indonesia untuk menetapkan bahwa nikah

⁴⁶ HR Muslim, 9/159, (1406); HR. Ahmad 3/404; HR. Thabrani dalam Al-Kabir, 6536; HR. Baihaqi 7/202; HR. Ad-Darimi 2/140

mut'ah hukumnya **haram**, fatwa ini ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 1997.⁴⁷

KH. Ma'ruf Amin (Ketua MUI Pusat) menyimpulkan bahwa Fatwa MUI Jatim dan Sampang tentang Syi'ah sudah pada tempatnya dan sesuai aturan. Tak lama berselang, Jalaludin Rakhmat, tokoh Syi'ah yang juga Ketua Dewan Syura IJABI dalam artikelnya "*Menyikapi Fatwa tentang Fatwa*" di *Republika*⁴⁸ menggugat KH. Ma'ruf Amin dan Fatwa MUI Jatim.

Inti gugatannya:

Pertama, fatwa yang salah, sama seperti obat yang salah diberikan kepada pasien, alih-alih menyembuhkan, ia justru bisa membunuh. Lebih jauh Jalal menyebut Fatwa MUI Sampang ikut serta membunuh muslim di Sampang dan Fatwa MUI Jatim juga menjadi dasar bagi Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk memberi tambahan hukuman 2 tahun penjara kepada Tajul Muluk.

Kedua, menurut Jalal, Fatwa MUI Jatim dan KH. Ma'ruf Amin mengabaikan dan tidak membaca keputusan Konferensi Islam Internasional di Jordania 4-6 Juli 2005 yang melahirkan Risalah Amman yang poinnya menegaskan bahwa pengikut dua mazhab Syi'ah (Ja'fari dan Zaidi) adalah Muslim

⁴⁷ Lihat *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Penerbit Erlangga, h.379.

⁴⁸ *Harian Republika* (10/11/2012)

sebagaimana pengikut empat *mazhab Sunni* (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) dan tidak boleh mengkafirkannya.

Menjawab gugatan pertama, fatwa resmi yang dikeluarkan oleh lembaga ulama seperti MUI, terutama menyangkut akidah dan paham agama, adalah dalam rangka meluruskan pemahaman dan membentengi akidah umat.

MUI sangat peka terhadap penyimpangan agama dan akan segera menghadapinya dengan serius dan sungguh-sungguh, “Penetapan fatwa (MUI” bersifat *responsif*, *proaktif*, dan *antisipatif*.” (Himpunan Fatwa MUI: 5) dan “Setiap usaha pendangkalan agama dan penyalahgunaan dalil-dalil adalah merusak kemurnian dan kemantapan hidup beragama. Oleh karena itu, MUI bertekad menanganinya secara serius dan terus menerus.”⁴⁹ Fatwa MUI berdasarkan dalil-dalil yang jelas untuk mendapatkan kebenaran dan kemurnian agama, “Fatwa MUI berdasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'* dan *Qiyas*, serta dalil lain yang dianggap *mu'tabar*.” (Himpunan Fatwa MUI: 5), dan “MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (fikih) dan masalah akidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia” (Himpunan Fatwa MUI: 7). Jelasnya, Fatwa tidak pernah dirumuskan untuk menciptakan permusuhan dan apalagi pembunuhan. Fakta ini sangat gamblang untuk direnungkan.

⁴⁹ Fatwa MUI, 1 Juni 1980, dalam Himpunan Fatwa MUI: 42.

G. Mengabaikan Akar Masalah

Jalaludin Rakhmat dalam artikelnya sama sekali tidak menyebutkan akar masalah yang memicu keluarnya Fatwa MUI Jatim, yang didahului sebelumnya oleh MUI Sampang tentang ajaran Syi'ah yang dibawa oleh Tajul Muluk di Sampang.

Dalam konsideran Fatwa MUI Sampang disebutkan bahwa Tajul Muluk telah **menyebarkan ajaran-ajaran** yang terindikasi **menyimpang** dari ajaran Islam sebagai berikut:

1. Mengimani imam yang 12 dan menganggap perkataan mereka sebagai wahyu;
2. Al-Quran yang ada saat ini dianggap sudah tidak orisinal;
3. Melaknat sahabat Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar dan Usman;
4. Šalat Jum'at tidak wajib;
5. Haji tidak wajib ke Makkah cukup ke Karbala;
6. Nikah *mut'ah* dianggap sunnah;
7. Hanya taat kepada imam yang 12 dan memusuhi musuh-musuhnya imam yang 12;
8. Shalat hanya dilakukan tiga waktu;
9. 'Aurat yang wajib ditutup hanya alat vital saja;
10. Salat Tarawih, *Duha* dan Puasa *'Asyura* haram.⁵⁰

Sebelum keluar fatwa MUI Sampang yang dikukuhkan oleh fatwa MUI Jatim, para ulama Sampang dan Madura terlebih

⁵⁰ Fatwa MUI Sampang, tanggal 8 shafar 1433/ 1 Januari 2012.

dahulu mengumpulkan para saksi, warga yang pernah mengikuti pengajian-pengajian Tajul Muluk. dari pengakuan para saksi warga, terkumpul 29 poin ajaran yang ditanyakan warga kepada ulama dan dianggap menyimpang. (temuan 50 Ulama Madura, ada 22 poin ajaran yang menyimpang).⁵¹

Dalam dokumen “Dakwaan Kesesatan yang dituduhkan kepada Tajul Muluk Ma'mun” terungkap beberapa ajaran krusial misalnya:

1. Mereka menganggap bahwa Kitab Suci Al-Qur'an yang ada pada tangan Muslimin se-alam dunia tidak murni diturunkan Allah, akan tetapi sudah terdapat penambahan, pengurangan dan perubahan dalam susunan ayat-ayatnya (no.4);
2. Mereka menganggap bahwa semua ummat Islam -selain kaum Syi'ah- mulai dari para Sahabat Nabi hingga hari qiamat, termasuk didalamnya tiga Khalifah Nabi (Abu Bakar, Umar, Usman) dan imam empat Mazhab (Abu Hanifah, Malik, Syafi'ie, Ahmad) termasuk pula Bujuk Batu Ampar adalah orang-orang pendusta, dan beraqidah dengan aqidah bodoh lagi murtad karena membenarkan tiga Khalifah tersebut di dalam merebut kekhalifahan Ali bin Abi Thalib (no.5).⁵² Tidak hanya Tajul Muluk, Jalaludin Rakhmat sendiri terbukti banyak sekali melecehkan para Sahabat Nabi. Berikut ini adalah sebagian daftar pelecehan Jalaludin Rakhmat terhadap para sahabat utama Nabi

⁵¹ <http://www.hidayatullah.com/read/20495/03/01/2012>.

⁵² lihat Dokumen Fatwa MUI Jatim dan Sampang *tentang Ajaran Tajul Muluk* di Sampang, tanggal: 8 shafar 1433/ 1 Januari 2012.

Muhammad Saw yang menjelek-jelekan, melaknat dan bahkan mengkafirkan mereka.

Di dalam buku-buku yang diedit atau ditulisnya sendiri (oleh: Jalaluddin Rakhmat) ditemukan antara lain; “Syiah melaknat orang yang dilaknat Fatimah”.⁵³ Dan yang dilaknat Fatimah adalah Abu Bakar dan Umar.⁵⁴ Para sahabat suka membantah perintah Nabi Muhammad.⁵⁵ “Para Sahabat Merobah-robah Agama”⁵⁶ Para Sahabat Murtad.⁵⁷ Uśman tidak menikahi dua putri Nabi Saw, tapi dua wanita lain.⁵⁸ Dia jelas membenci julukan *Dzu-Nuraini* (pemilik dua cahaya) karena Uśman bin Affan menikah dengan dua puteri Rasulullah Saw. Julukan itu kata Jalal, harus kita hapus (*mansukh*)!⁵⁹ Tragedi Karbala merupakan gabungan dari pengkhianatan sahabat dan kelaliman musuh (Bani Umayyah).⁶⁰

Tentu saja, berbagai tulisan yang bernada melecehkan, menghujat dan mendiskreditkan para sahabat utama Nabi

⁵³ Emilia Renita AZ, dalam “40 Masalah Syiah”. Bandung: IJABI. Cet ke 2. 2009. h. 90.

⁵⁴ Jalaluddin Rakhmat, “*Meraih Cinta Ilahi*”, Depok: Pustaka IIMaN, 2008. h. 404-405.

⁵⁵ Jalaluddin Rakhmat dalam “*Sahabat Dalam Timbangan Al-Quran, Sunnah dan Ilmu Pengetahuan*”, PPs UIN Alauddin, 2009. h. 7.

⁵⁶ Jalaluddin dalam artikel di *Buletin at-Tanwir*, Yayasan Muṭahhari, Edisi Khusus No. 298. 10 Muharram 1431 H. h. 3.

⁵⁷ *Ibid.* h. 4.

⁵⁸ Jalaluddin Rakhmat, dalam “*Al Mushthafa (Manusia Pilihan yang Disucikan)*”, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008, h.164.

⁵⁹ *Ibid.*, h.165-166.

⁶⁰ Jalaluddin Rakhmat dalam “*Meraih Cinta Ilahi*”, Op Cit, h.493.

seperti di atas tidak bisa dikatakan tidak sesat! Namun sungguh aneh, para penyokong dan pendakwah Syi`ah seperti Jalaludin Rakhmat dan Haidar Bagir selalu meminta kaum Sunni kedepankan akhlak dan mengangkat persatuan ummat dihadapan ajaran-ajaran yang menyinggung akidah dan perasaan *Sunni*.

Dalam artikelnya berjudul '*Wa'taṣimū bi Ḥablillâhi Jamî'an*',⁶¹ Haidar Bagir menyintir perkataan Imam At-Thahawi dalam '*Al-'Aqidah Al-Thahawiyah*' bahwa, "Kita tidak menisbatkan kekafiran, kemusyrikan dan kemunafikan kepada seseorang selama tidak tampak dari mereka sesuatu yang menunjukkan hal-hal demikian itu. Dan sebagai gantinya, kita menyerahkan semua yang tidak tampak itu kepada Allah, kita hanya menghukum berdasar yang tampak saja."

Tampaknya ia sedang meminta kaum *Sunni* untuk tidak menghukumi kafir dan seterusnya kepada Syi`ah. Padahal dalam kitab yang sama, jika mau jujur, Imam At-Thahawi sangat keras menghukumi orang yang berani lancang menghujat para sahabat Nabi berdasarkan kaidah "Kita hanya menghukum berdasar yang tampak saja".

Beliau menulis, "Kita mencintai para sahabat Rasulullah Saw dan tidak berlebihan dalam mencintai salah seorang mereka, kita juga tidak berlepas diri dari mereka. Kita membenci orang yang membenci mereka (para sahabat)

⁶¹ Harian *Republika* 02 Nopember 2012.

dan yang menyebut mereka tidak baik. Kita tidak menyebut mereka kecuali dengan kebaikan. Mencintai mereka adalah agama, iman dan ihsan. Membenci mereka adalah kekafiran, kemunafikan dan sikap melampaui batas (*ṭughyân*).”⁶²

H. Kontroversi Risalah Amman

Gugatan Jalaludin kedua adalah masalah Deklarasi Amman. Seperti disebutkan Jalaludin Rakhmat, sebenarnya bukanlah *Ijma'* Ulama dalam pengertian yang fixed dalam ushul fikih. Risalah Amman, juga deklarasi Makkah dan Bogor lebih bersifat politis. Ia dipicu oleh konflik Sunni-Syi'ah di Iraq, pasca tumbanganya Saddam Husain tahun 2003 yang digulingkan oleh AS dan Sekutu yang berkolaborasi dengan kaum Syi'ah Iraq dengan kompensasi politik yang menguntungkan posisi Syi'ah di Iraq pasca Saddam.

Tak pelak terjadi eskalasi kekerasan antara *Sunni-Syi'ah*, dimana Sunni menuding Syi'ah menyerahkan kedaulatan Iraq kepada Amerika dengan keuntungan politik tertentu, telah membantai ribuan kaum Sunni Iraq dan merampas tanah-tanah wakaf *Ahlus Sunnah* di Iraq.

Dalam rangka merespons konflik sektarian yang berdarah itu, maka terjadilah upaya-upaya mediasi dunia Islam seperti pertemuan Amman, Makkah dan Bogor.

Bukti bahwa **Risalah Amman 2005** itu sekedar basa-basi politis (bukan fatwa keagamaan) dan tidak mengikat seluruh

⁶² Ibnu Abi Al-'Izz , *Al-'Aqidah Al-Thahawiyah dan Syarahnya*, tt, h. 689.

ulama yang hadir, adalah fakta Prof. Dr. Yusuf Al-Qarḍawi yang ikut tercantum namanya (diundang dan menandatangani Risalah Amman) ternyata merilis tiga fatwa tentang Syi'ah Imamiyah 12 didalam kitab "*Fatawa Mu'ashirah*" jilid 4 yang terbit pada tahun 2009.

Dalam fatwanya, beliau membongkar kesesatan Syi'ah Imamiyah 12 dengan membentangkan pokok-pokok perbedaan akidah antara Ahlus Sunnah dan Syi'ah, hukum mencaci para sahabat Nabi dan sikapnya tentang pendekatan (*Taqrib*) sunni-syiah pasca Mukhtamar Doha-Qatar tanggal 20-22 Januari 2007.

Tampak dari fatwa Syeikh Al-Qarḍawi (2009) bahwa kaum Syi'ah masih dikategorikan Muslim (seperti yang dinyatakan oleh Risalah Amman), tapi itu tidak berarti golongan Muslim tersebut bersih dan terbebas dari kesesatan terutama dalam hal-hal pokok akidah sebagaimana dijelaskan panjang lebar oleh Qarḍawi. Tentu saja Syeikh Al-Qarḍawi lebih alim dan mumpuni daripada Jalaludin Rakhmat, sehingga mampu membedakan mana kekufuran dan kesesatan. Sehingga wajar para ulama MUI Jatim dan KH. Ma'ruf Amin juga merasa tak perlu menengok Risalah Amman yang terbukti bukan Ijma Ulama itu.

Ada baiknya kita mengaca kepada sikap institusi Al-Azhar Mesir dalam menyikapi dakwah Syi'ah. Grand Syeikh Al-Azhar, Prof. Dr. Ahmad At-Thayyib, menyatakan seperti dilansir *Koran Ahram* (09/11/2012) bahwa Al-Azhar menolak keras penyebaran ajaran syi'ah di negeri-negeri *Ahlus Sunnah*, karena akan merongrong persatuan dunia Islam, mengancam stabilitas, memecah belah umat dan membuka peluang kepada

zionisme untuk menimbulkan isu-isu perselisihan mazhab di Negara-negara Islam.⁶³

I. Kesimpulan

1. *Muṭ'ah* berarti bersenang-senang atau menikmati. Istilah *muṭ'ah* berarti seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan memberikan sejumlah harta tertentu dalam waktu tertentu, pernikahan ini akan berakhir sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan tanpa talak serta tanpa kewajiban memberi nafkah atau tempat tinggal dan tanpa adanya saling mewarisi antara keduanya.
2. Eksistensi hukum nikah *muṭ'ah* ada dua pandangan. Pertama; memandang boleh sejauh dibutuhkan dan dalam situasi darurat atau terpaksa, artinya bukan halal secara mutlak. Kedua, nikah *muṭ'ah* pernah dibolehkan sebelum perang Khaibar dan ketika Fathu Makkah; setelah itu Rasulullah Saw melarang untuk seterusnya hingga kiamat. Ibnul Qayyim rahimahullah menguatkan riwayat yang mengatakan, bahwa pengharaman berlaku pada tahun penaklukan Makkah.
3. Nikah *muṭ'ah* yang dibolehkan diawal Islam jauh berbeda dengan nikah *muṭ'ah* menurut Syi'ah. Nikah *muṭ'ah* dalam ajaran Syi'ah dan kesan negatifnya adalah kawin yang dilakukan berdasarkan mahar tertentu. Masa berlakunya bisa setengah jam, bisa satu jam, satu hari, satu minggu, satu bulan dan seterusnya, sesuai dengan akad perjanjian di kedua belah pihak tergantung kesanggupan membayarnya.

⁶³ Penulis adalah Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Red: Cholis Akbar/ hidayatullah.com, Rabu, 14 November 2012

BAB VI

PERKAWINAN TIDAK TERCATAT

A. Pendahuluan

Tarik menarik diantara dua hukum yang berbeda atau dualisme hukum dalam masalah perkawinan telah menjadikan masalah tersendiri dalam hukum Nasional Indonesia. Nikah tidak tercatat atau talak tanpa Pengadilan Agama dianggap sah secara agama Islam, namun menurut hukum positif yang berlaku justru dipandang tidak sah.

Dualisme hukum di Indonesia yang aturannya saling bertentangan, terkait pernikahan dan talak merupakan hal yang bermasalah. Salah satu penyebab terjadinya dualisme adalah karena di Indonesia **ada dua kelompok 'madzhab'** (yang mendukung sepenuhnya atau mengikuti ajaran Islam total, dan yang mendukung atau mengikuti hukum positif). Supaya terjadi sinkronisasi, maka dipakailah keduanya, sebab bagi negara seperti Indonesia yang berdasarkan hukum yang dibuat berdasarkan persetujuan rakyat, tentulah sebagai warga yang baik kita harus mengikutinya.

Nikah tidak tercatat dalam fiqih kontemporer dikenal dengan istilah ***zawaj 'urfi*** yaitu suatu pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan tetapi tidak tercatat secara resmi oleh pegawai pemerintah yang menangani pernikahan

(baca: KUA).¹ Disebut nikah ‘*urfi*’ (adat) karena pernikahan ini merupakan adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat muslim sejak masa Nabi Saw dan para sahabat yang mulia, dimana mereka tidak perlu untuk mencatat akad pernikahan mereka, tanpa ada permasalahan dalam hati mereka.²

B. Historis Pencatatan Akad Nikah

Kaum muslimin pada zaman dahulu, untuk melangsungkan nikah cukup dengan lafaz dan saksi, tanpa memandang perlu untuk dicatat dalam catatan resmi. Namun, dengan berkembangnya kehidupan dan berubahnya keadaan, dimungkinkan para saksi itu lupa, lalai, meninggal dunia, dan sebagainya, maka diperlukan adanya pencatatan akad nikah secara tertulis.³

Awal pencatatan akad nikah adalah ketika kaum muslimin mulai mengakhirkan mahar atau sebagian mahar, lalu catatan pengakhiran mahar tersebut dijadikan bukti pernikahan. Syaikhul Islam *rahimahullah* mengatakan: “Para sahabat tidak menulis mahar karena mereka tidak mengakhirkannya, bahkan memberikannya secara langsung, meskipun ada diantara mereka yang mengakhirkan, tetapi dengan cara yang baik. Tatkala manusia mengakhirkan mahar padahal waktu lama dan terkadang lupa, maka mereka menulis mahar yang diakhirkan

¹ Majallah *al-Buhus al-Fiqhiyyah*, edisi 36, Th. 9/ RAjab-Sya`ban-Ramadhan 1428.H, h. 194

² Azmi Mamduh, *Al-‘Aqdu Al-‘Urfi*, hal. 11, dan Usamah al-Asyqor, *Mustajaddat Fiqhiyyah fi Qodhoya Zawaj wa Tholaq*, h. 130

³ Majalah, *Al-Buhuts Al-Fiqhiyyah*, Op Cit, h. 194

tersebut, sehingga catatan itu merupakan bukti kuat tentang mahar, dan wanita itu adalah istrinya”.⁴

Kelahiran UUP telah mengalami rentetan sejarah yang cukup panjang. Bermula dari kesadaran kaum perempuan Islam akan haknya yang merasa dikebiri oleh dominasi pemahaman fikih klasik atau konvensional yang telah mendapat pengakuan hukum,⁵ kemudian mereka merefleksikan hal tersebut dalam pertemuan yang kelak menjadi embrio lahirnya UUP. Arso Sosroatmojo mencatat bahwa pada rentang waktu 1928 kongres perempuan Indonesia telah mengadakan forum yang membahas tentang keburukan-keburukan yang terjadi dalam

⁴ Majmu' Fatawa 32/131

⁵ Sebelum UUP No 1/ 74 lahir, Muslim Indonesia menggunakan hukum Islam yang telah diresepsi ke dalam hukum Adat. Hukum Islam yang telah diresepsi ke dalam hukum adat tersebut mendapat pengakuan dari *Indische Staats Regeling* (ISR) yang berlaku untuk tiga golongan. (a. Golongan Eropa (termasuk Jepang); b. Golongan pribumi (orang Indonesia) dan; c. Golongan Timur Asing, Pasal 163). Lihat Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, cet. I* (Bandung: Mandar Maju, 1990), h.4-5, bandingkan dengan C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet. II* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 224-225

perkawinan di kalangan umat Islam.⁶ Kemudian hal tersebut juga pernah dibicarakan pada dewan rakyat (*volksraad*).⁷

Pada akhir tahun 1950 dengan surat keputusan Menteri Agama No. B/2/4299 tertanggal 1 Oktober 1950 dibentuklah Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk bagi umat Islam.⁸ Sementara itu berbagai organisasi terus menerus mendesak kepada Pemerintah dan DPR agar secepat mungkin merampungkan penggarapan mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) yang masuk DPR.⁹ Organisasi-organisasi tersebut antara lain Musyawarah Pekerja Sosial (1960), Musyawarah Kesejahteraan Keluarga (1960), Konferensi Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) Pusat dan Seminar Hukum oleh Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI, 1963).¹⁰

⁶ Keburukan dimaksud antara lain: perkawinan (anak di bawah umur), kawin paksa, poligami, talak sewenang-wenang dan lain-lain. Sementara menurut Khoiruddin Nasution respon perempuan Indonesia terhadap praktek perkawinan hukum Islam khususnya mengenai ketentuan hak dan kewajiban suami isteri.. Bandingkan antara Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 9 dan Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Dengan Perbandingan UU Negara Muslim* (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2004), h. 285

⁷ Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 9 .

⁸ Kepanitiaan itu mengalami beberapa perubahan personalia, maka pada tanggal 1 April 1961 dibentuklah panitia baru yang diketuai oleh Mr. H. Moh. Noer Poerwosoetjipto. Lihat *Ibid.*

⁹ Pada waktu itu ada dua RUU yang masuk ke DPR yaitu; a. RUU tentang Pokok-pokok Perkawinan Umat Islam dan; b. RUU tentang Ketentuan Pokok Perkawinan. Lihat *Ibid.*, h. 10

¹⁰ *Ibid.*

Umat Islam waktu itu mendesak DPR agar secepatnya mengundang RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan bagi umat Islam, namun usaha tersebut menurut Arso Sosroatmodjo tidak berhasil. Kemudian DPR hasil pemilihan umum tahun 1971 mengembalikan RUU tersebut ke pemerintah. Segala upaya telah dikerahkan untuk menghasilkan UUP yang sesuai untuk umat Islam. Arso mencatat bahwa pada rentang waktu tahun 1972/1973 berbagai organisasi gabungan terus memperjuangkan lahirnya undang-undang tersebut.

Simposium Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) pada tahun 1972 menyarankan agar PP ISWI memperjuangkan tentang UUP. Kemudian Badan Musyawarah Organisasi Wanita Islam Indonesia pada tanggal 22 Februari 1972 salah satunya menghasilkan keputusan untuk mendesak pemerintah agar mengajukan kembali RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan Umat Islam dan RUU tentang Ketentuan Pokok-Pokok Perkawinan. Selanjutnya organisasi Mahasiswa yang ikut ambil bagian dalam perjuangan RUU Perkawinan Umat Islam yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang telah mengadakan diskusi panel pada tanggal 11 Februari 1973.¹¹

Akhirnya, setelah bekerja keras, pemerintah dapat menyiapkan sebuah RUU baru, dan tanggal 31 Juli 1973 dengan No. R. 02/PU/VII/1973, pemerintah menyampaikan RUU tentang Perkawinan yang baru kepada DPR, yang terdiri dari 15 (lima belas) bab dan 73 (tujuh puluh tiga) pasal.¹² RUU ini mempunyai tiga tujuan. *Pertama*, memberikan kepastian

¹¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. I, cet. I (Jakarta: Kencana, 2006), h. 4

¹² *Ibid.*, h. 2 dan h. 27.

hukum bagi masalah perkawinan,. *Kedua*, untuk melindungi hak-hak kaum wanita, dan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum wanita. *Ketiga*, menciptakan Undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman.¹³ Keterangan Pemerintah tentang RUU tersebut disampaikan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 30 Agustus 1973.

Menurut Hasan Kamal, setidaknya **terdapat 11 pasal** yang bertentangan dengan ajaran Islam (fiqih munakahat),¹⁴ Kemudian diadakan forum pandangan umum oleh wakil-wakil fraksi atas RUU tentang Perkawinan pada tanggal 17 dan 18 September 1973,¹⁵

Adapun hasil akhir undang-undang perkawinan yang disahkan DPR terdiri dari **14 (empat belas) bab yang dibagi dalam 67 (enam puluh tujuh) pasal**, seperti dicatat sebelumnya.¹⁶ Sedang rancangan semula yang diajukan

¹³ Tentang tujuan memenuhi harapan kaum wanita misalnya dapat tergambar dari Pidato Kenegaraan Presiden Suharto pada tanggal 16 Agustus 1973, disinggung tentang munculnya desakan kaum wanita dan organisasi lainnya agar negara memiliki uu yang mengatur tentang perkawinan.

¹⁴ Dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, Undang-Unang Nomor 1 tahun 1974 sampai KHI)*, cet. I (Jakarta: Kencana, 2004), h. 24

¹⁵ Adapun fraksi-fraksi yang terlibat yaitu Fraksi ABRI, Karya Pembangunan, PDI dan Fraksi Persatuan Pembangunan. Lihat Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, h. 27

¹⁶ Yaitu UUP yang berlaku sampai saat sekarang ini yang diundangkan pada tanggal 2 januari 1974, dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 3019. lebih lanjut lihat C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, h. 222

pemerintah ke DPR yaitu terdiri dari 73 pasal.¹⁷ sehingga dapat difahami bahwa UU No 74 sangat kental nuansa politisnya yang pada akhirnya UU yang lahir terkesan membela salah satu kepentingan, dalam hal ini kepentingan wanita.

C. Perkawinan yang Tidak Tercatat

Salah satu kerangka awal untuk mendapatkan jaminan hukum dalam sebuah perkawinan adalah dengan mencatatkannya kepada instansi yang berwenang. Hal ini tidak hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam saja, melainkan juga bagi mereka yang beragama Kristen, Katholik, Hindu maupun Budha. Sebagaimana tertuang dalam UU no. 22 tahun 1946 j.o. UU No 32 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (penjelasan Pasal 1), juga dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2), yang diperkuat dengan Inpres RI no. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan 6.

Dalam hukum Islam, hukum perkawinan merupakan salah satu aspek yang paling banyak diterapkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia dibanding dengan hukum-hukum muamalah yang lain.¹⁸ Perkawinan adalah *miṣâqan galîẓan*, atau ikatan yang kokoh, yang dianggap sah bila

¹⁷ *Ibid.* Meskipun Atho mencatat bahwa hasil akhir UU No. 1 Tahun 1974 adalah 66 pasal, dalam kenyataan UU No.1 Tahun 1974 terdiri dari 67 pasal.

¹⁸ Syukri Fathudin AW, Vita Fitria, *Problematika Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan*. Dalam [http://www. google.com](http://www.google.com), Akses 25 Nopember 2013, yang mengutip dari Anderson, J.N.D, *Hukum Islam di Dunia Modern*, (1994) Yogyakarta, Tiara Wacana, h. 46

telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Berdasarkan Alquran dan hadis, para ulama menyimpulkan bahwa hal yang termasuk rukun pernikahan adalah calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Kewajiban akan adanya saksi ini adalah pendapat Syafi'i, Hanafi dan Hanbali.¹⁹ Adapun syarat-sahnya nikah, menurut Wahbah Zuhaili adalah antara suami isteri tidak ada hubungan nasab, *sighat* ijab qabul tidak dibatasi waktu, adanya persaksian, tidak ada paksaan, ada kejelasan calon suami isteri, tidak sedang ihram, ada mahar, tidak ada kesepakatan untuk menyembunyikan akad nikah salah satu calon mempelai tidak sedang menderita penyakit kronis, adanya wali.²⁰

Melihat kriteria rukun maupun persyaratan nikah di atas, **tidak ada penyebutan tentang pencatatan.** Keberadaan saksi dianggap telah memperkuat keabsahan suatu perkawinan. Pihak-pihak terkait tidak bisa mengadakan pengingkaran akan akad yang sudah terjadi. Bisa jadi ini didasarkan pada pernikahan masa Rasulullah sendiri tidak ada yang dicatatkan. Dalam kitab fikh klasikpun tidak ada pembahasan tentang pencatatan pernikahan.

Menurut hukum Islam, bahwa tujuan *syari'at* Islam (*maqâṣidus syari'ah*) adalah mendatangkan maslahat dan menghindarkan bahaya, karena perkawinan yang tidak dicatat pemerintah menimbulkan *mudarat* kepada istri, anak, dan harta

¹⁹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1996, h. 18.

²⁰ Wahbah Zuhaili, *All-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, (Dar-al-Fikr, Beirut, 1989), h. 62.

bersama (gono gini), maka pencatatan perkawinan oleh pemerintah menurut sebagian orang dapat **dipandang sebagai masalah darurat** karena tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Al-Hadiś. Hukum yang diterapkan berdasarkan ijtihad ini dapat berubah sesuai kondisi, selama perubahan hukum itu untuk kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis, atau *maqâşidus syari`ah* berdasarkan *kaidah fiqhiyah*.²¹

تغير الاحكام بتغير الاحوال والأزمنة

“Hukum dapat berubah disebabkan perubahan keadaan dan zaman”²².

Menurut Abdul Manan, ada beberapa faktor yang menjadi alat atau factor pengubah hukum, yaitu faktor arus globalisasi, faktor sosial budaya, faktor politik, faktor ekonomi, faktor iptek, pendidikan, hukum, dan supremasi hukum.²³

Ada pula yang menjadikan *maslahat mursalah* sebagai landasan berpendapat. Teori ini mengajarkan bahwa: “Apa yang tidak diperintahkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan *Al Hadis* dapat dibuat aturan yang mengharuskan berdasarkan kemaslahatan dan sekaligus menghindari *muḍarat*.

²¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Perkawinan Yang Tidak Dicatat Pemerintah: Pandangan Hukum Islam*, Jakarta GT2 dan GG Pas, h. 22.

²² Menurut Syamsul Anwar, (nara sumber) Sabtu 03 Nopember 2012 mengemukakan bahwa ada 4 (empat) syarat hukum dapat berubah: 1) Bila ada tuntutan untuk berubah; 2) Tidak menyangkut ibadah mahḍah (ibadah pokok); 3) Hukum itu tidak bersifat Qaṭ'i tapi bersifat zanni; 4) ada landasan syar'inya.

²³ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2005, h. 57.

Berdasarkan cara berfikir ini, **pencatatan perkawinan dapat diwajibkan demi menjaga kemaslahatan suami, istri, dan anak-anaknya,**²⁴ karena dinilai bahwa perkawinan yang tidak tercatat lebih banyak mendatangkan *mudarat* daripada manfaatnya. Para perancang ordonansi perkawinan di Pakistan mendasarkan fikiran mereka pada ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa **dalam melakukan transaksi penting seperti utang piutang saja hendaknya selalu dicatatkan, apalagi perkawinan yang bahkan lebih penting dari utang piutang.**²⁵

Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²⁶ Artinya kita harus melihat secara menyeluruh dari isi pasal tersebut, dengan kesatu-paduan pasal tersebut harus dilaksanakan secara pasti, guna mendapatkan kepastian hukum.

Ketika suatu perkawinan hanya dilaksanakan sampai kepada batas Pasal 2 ayat (1) saja, maka akibat hukumnya adalah ketika terjadi persengketaan antara suami istri maka pasangan tersebut tidak bisa minta perlindungan secara konkrit kepada Negara, dalam hal ini minta putusan kepada Pengadilan. Hal ini terjadi karena perkawinan yang bersangkutan tidak tercatat secara resmi didalam administrasi

²⁴ Fathurrahman Djamil, *Perkawinan Bawah Tangan dan Konsekuennya Terhadap Anak dan Harta*, Jakarta, GT2 dan GG Pas, Mei 2007, h. 38.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ UU No. 1 Tahun 1974, *tentang Perkawinan*, Pasal 2 ayat (1) dan (2)

Negara. Olehkarenanya maka *segala konsekuensi hukum apapun yang terjadi selama dalam perkawinan bagi negara dianggap tidak pernah ada, bila tidak tercatat.*

Solusi bagi suami istri yang telah melakukan nikah dengan tidak diketahuinya secara resmi oleh negara adalah dengan memintakan *işbat (ketetapan)* resmi dari lembaga negara yang mempunyai otoritas untuk menetapkan yaitu Pengadilan Agama.

Dalam menganalisis masalah pencatatan perkawinan dengan metode ini dapat dilakukan sebagai berikut:

Dalam analisis *tematik* bahwa naş tidak pernah menyebutkan secara tegas memerintahkan pencatatan perkawinan. Naş al-Qur`an yang memerintahkan agar dicatat transaksi hutang piutang adalah QS, al-Baqarah (2): 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, *hendaklah kamu menuliskannya.....* “

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ

يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^٥

“jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya”.

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا
إِلَىٰ أَجَلِهِ^٦ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^٧ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تَجَرَّةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا

“janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan

lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya”.

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ
فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ

“dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu...”

Terkait masalah status hukum perkawinan tidak tercatat (dibawah tangan/ nikah Sirri), sebagian menilai bahwa nikah dibawah tangan adalah sah secara agama sementara secara kenegaraan tidak sah. Dalam hal ini penulis tidak ingin larut dalam kontradiksi tersebut, tidak ingin mengklaim sah dan tidaknya nikah. Penulis hanya ingin memfokuskan bagaimana pernikahan dibawah tangan yang banyak dilakukan masyarakat atau yang tidak tercatat di KUA sebagai lembaga resmi pemerintah pencatat nikah, tidak menimbulkan implikasi bagi pelaku dan keturunannya.

Jadi, Nikah sirri, yang dimaksud dalam tulisan ini adalah nikah yang tidak terdaftar secara resmi di lembaga perkawinan. Bukan pernikahan yang dirahasiakan sebagaimana terambil dari kata “*sirrun*” dalam bahasa Arab yang berarti: rahasia.

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akte Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Perkawinan dibawah tangan jelas tidak memiliki Akte Nikah, maka bagi masyarakat yang tidak mempunyai Akte Nikah dapat mengajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama (ayat 2),²⁷ Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya Akte Nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Batas.....

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah, tentunya harus memberikan pelayanan terbaik bagi pencari keadilan agar permasalahan nikah di bawah tangan yang dilaksanakannya

²⁷ Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

atau karena tidak punya akte nikah dapat segera teratasi, sehingga problematika yang terkait hal-hal keperdataan bagi pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan ini terselesaikan dengan baik.

Ada minimal tiga hal yang dapat diambil dari sunnah untuk mengadakan pengumuman:

1. Bahwa perkawinan merupakan urusan public yang siapapun pantas mengetahui;
2. Pengakuan public ini diharapkan sebagai sarana pengakuan dan penjaminan hak; dan
3. Bentuk pengakuan dan penjaminan hak dalam masyarakat ini muncul dalam bentuk pengumuman (walimah-an, iklan dan sejenisnya) dan saksi.

Pengakuan dan penjaminan hak di masa nabi cukup dengan pengumuman kepada masyarakat. Namun seiring dengan perkembangan masyarakat, kemajuan administrasi dan ketatanegaraan, bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak juga mengalami perkembangan. Bentuk pengakuan dan penjaminan di masa sekarang dalam bentuk **hitam di atas putih** yang dalam ini adalah akta nikah.

D. Manfaat Pencatatan Akad Nikah

Pencatatan akad nikah secara resmi memiliki beberapa manfaat, diantaranya:

1. Menjaga hak dari kesia-siaan, baik hak suami istri atau hak anak berupa nasab, nafkah, warisan dan sebagainya..

2. Menyelesaikan persengketaan antara suami istri atau para walinya ketika mereka berselisih, karena bisa jadi salah satu diantara mereka akan mengingkari suatu hak untuk kepentingan pribadi dan pihak lainnya tidak memiliki bukti karena saksi telah tiada.
3. Catatan dan tulisan akan bertahan lama, sehingga sekalipun yang bertanda tangan telah meninggal dunia namun catatan masih berlaku.
4. Catatan nikah akan menjaga suatu pernikahan dari pernikahan yang tidak sah, karena akan diteliti terlebih dahulu syarat dan rukun serta penghalangnya.
5. Menutup pintu pengakuan dusta dalam pengadilan. Karena bisa saja sebagian orang mengaku telah menikahi seorang wanita secara dusta untuk menjatuhkan lawannya dan mencemarkan kehormatan hanya karena mudahnya suatu pernikahan dengan saksi palsu.²⁸

E. Muḍarat Nikah Tidak Tercatat

Banyak problem hukum yang dijumpai bagi pasangan suami istri dan anaknya akibat dari perkawinan tidak tercatat, dan mereka mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan. Perkara isbat nikah ini, dapat diklasifikasikan masalahnya sebagai berikut:

1. Suami istri yang telah menikah di bawah tangan, tidak mempunyai akte nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut agama dan negara. Akibatnya anak-

²⁸ Lihat: Yusuf bin Ahmad Ad-Daryuwisy, *Az-Zawaj Al-'Urfi*, Darul Ashimah, KSA, cet pertama, 1426 H, 74-75.

anak tidak dapat memperoleh Akte Kelahiran dari instansi yang berwenang, karena untuk mendapatkan akte kelahiran itu diperlukan akte nikah dari orang tuanya.²⁹

2. Suami istri yang melangsungkan pernikahan sesudah tahun 1974 tidak mengetahui kalau pernikahannya tidak tercatat, karena mereka merasa dinikahkan oleh penghulu resmi dan membayar sejumlah biaya pernikahan, namun pada saat memerlukan buku nikah sebagai syarat untuk berangkat haji atau mengurus pensiun atau pembuatan akte kelahiran anak, baru diketahui ternyata perkawinan mereka tidak tercatat di KUA setempat, kemudian kedua suami istri mengajukan isbat nikah.³⁰
3. Suami istri menikah secara sirri, kemudian terjadi sengketa perkawinan, suami mengajukan permohonan isbat nikah untuk bercerai dan adapula istri (Penggugat) yang mengajukan isbat nikah untuk bercerai karena telah ditinggal pergi oleh suaminya, guna memperoleh kepastian hukum status dirinya sebagai janda;
4. Seorang wanita yang tanpa sadar senang kepada seorang laki-laki beristri dan menikah dengan laki-laki tersebut tanpa adanya pendaftaran ke KUA. Beberapa bulan berselang, istri (pertama) laki-laki tersebut mendatangi istri baru suaminya, selanjutnya suami beristri dua tersebut

²⁹ Fathurrahman Djamil, *Perkawinan Bawah Tangan dan Konsekuennya Terhadap Anak dan Harta*, Jakarta, GT2 dan GG Pas, Mei 2007, h. 38.

³⁰ T a r s i, (Ketua Pengadilan Agama Pelaihari) *Problematika Nikah di bawah tangan kaitannya Dengan Pengesahan Nikah*, www.pa.plaihari.go.id/index.php?content=mod-artikel, Akses 24 Nopember 2013

menghilang dan tidak kembali lagi ke rumah istri barunya. Setelah sekian lama tidak melaksanakan kewajiban lahir batinnya, wanita tersebut mengajukan permohonan isbat untuk bercerai, tetapi:

- a. Ia tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
- b. Perkawinannya sesudah UU Nomor 1 Tahun 1974 diberlakukan, dan
- c. Perkawinannya merupakan perkawinan kedua bagi laki-laki beristri.

Memang berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf a dan e Kompilasi Hukum Islam, permohonannya beralasan hukum, tetapi ketentuan pasal tersebut pada huruf d tidak terpenuhi, sedangkan ketentuan pada ayat b pasal tersebut “dapat” dianggap sama dengan perkawinan yang tidak tercatat. Akan tetapi permohonannya itu berbenturan dengan ketentuan huruf c di atas, yang terkait dengan asas perkawinan di Indonesia (Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan syarat-syarat suami berpoligami (Pasal 4 dan 5 UU Nomor 1 Tahun 1974 atau PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Poligami).

Perablemnya adalah:

1. Ia tidak dapat bercerai dari suaminya itu, kecuali apabila pernikahannya diisbatkan;
2. pernikahannya tidak dapat diisbatkan tanpa suami, tergugat tidak mendapat persetujuan istri pertamanya;
3. Apabila pengadilan mengisbatkannya, berarti perkawinan tersebut terjadi sebagaimana didalilkan oleh penggugat (yang bertindak pula sebagai Pemohon) dan isbat nikah

tersebut menimbulkan hukum lainnya, yaitu adanya hubungan hukum kewarisan antara pemohon dengan suaminya. Bila ternyata suaminya itu meninggal dunia setelah atau antara tanggal perkawinan yang diisbatkan dan tanggal perceraian yang diajukan dan diputus bersama-sama dan terkait harta gono gini yang harus dibagi;

4. Apabila pengadilan menolaknya atau sekurang-kurangnya menyatakan permohonan tidak diterima, bagaimana wanita tersebut melepaskan ikatan perkawinannya?; Bagaimana pengadilan menyelesaikan kasus di atas?³¹

F. Faktor Penyebab Pernikahan Tidak Tercatat

Jeje Zainudin, Ketua Pengadilan Agama Gunungkidul mengatakan: “masih banyak yang berpendapat bahwa nikah merupakan urusan pribadi dalam melaksanakan ajaran agama, jadi tidak perlu melibatkan aparat yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA). Disamping itu pernikahan sirri juga dianggap sebagai jalan pintas bagi pasangan yang menginginkan pernikahan, namun belum siap atau ada hal lain yang tidak memungkinkannya terikat secara hukum. Seperti contoh kasus:³²

1. Ati, merasa tidak ada yang salah dengan pernikahan sirrinya, karena dengan sepengetahuan isteri pertama (Tini)

³¹ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan per Undang-Undang dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, 2004, h. 100-101.

³² Diolah dari laporan hasil penelitian, Ringkasan dan Summary, Syukri Fathudin AW, Vita Fitria, *Problematisa Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan*”, <https://www.google.com>, Akses 25 Nopember 2013

dan dengan alasan ingin mendapatkan keturunan. Sebelum menikah Ati sendiri tahu, kalau pernikahannya tidak dicatatkan. Yang melatarbelakangi pernikahan sirrinya adalah status sebagai isteri kedua dari seorang PNS, tidak memungkinkan pernikahannya dicatatkan. Sementara pernikahan Tini lebih didasari konflik batin.

2. Meskipun tidak disetujui oleh kedua orang tuanya, sepasang remaja yang saling mencintai tetap melangsungkan pernikahan sirri. Mereka berdua masih kuliah dan belum siap menghadapi kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya bila pernikahannya dicatatkan.
3. Sementara Tatik akan merasakan beban yang lebih berat bila pernikahan tidak dilangsungkan, mengingat bayi yang ada dalam kandungannya membutuhkan seorang ayah. Sebaliknya, pernikahan Ida justru memicu konflik batin yang membuat kuliah Ida terbengkalai. Pernikahan tersebut terjadi karena perjodohan. Orang tuanya menikahkan secara sirri karena khawatir melihat hubungan Ida semakin lengket dengan teman kuliahnya.
4. Kasus Syekh Puji lebih didasari karena pernikahan dibawah umur sehingga sangat tidak memungkinkan bagi mereka untuk mencatatkan pernikahannya.

Membaca dan mempelajari kasus tersebut, dapat dianalisis, beberapa permasalahan yang mendorong seseorang memilih nikah siri sebagai alternatif perkawinannya.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan sirri adalah:

1. Nikah sirri dilakukan karena hubungan yang tidak direstui oleh orang tua kedua pihak atau salah satu pihak. Misalnya orang tua kedua pihak atau salah satu pihak berniat menjodohkan anaknya dengan calon pilihan mereka.
2. Nikah sirri dilakukan karena adanya hubungan terlarang (perselingkuhan/ hamil diluar nikah), misalnya salah satu atau kedua pihak sebelumnya pernah menikah secara resmi dan telah mempunyai istri atau suami yang resmi, tetapi ingin menikah lagi, tanpa sepengetahuan isteri pertama karna telah hamil.
3. Nikah sirri dilakukan dengan alasan terasa belum lengkap karena sudah bertahun-tahun belum punya anak. Dengan dalih ingin memiliki keturunan, ia menikah dengan isteri keduanya.
4. Nikah sirri dilakukan dengan dalih menghindari dosa karena zina. Kekhawatiran tersebut dialami oleh pasangan mahasiswa dll yang semakin hari semakin dekat, menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perbuatan yang melanggar syariah. Sebagai jalan keluar yang mampu menghalalkan gejolak cinta sekaligus menghilangkan kekhawatiran terjadinya zina. Nikah sirri dilakukan karena merasa belum siap secara materi dan secara sosial.
5. Nikah Sirri sering ditempatkan menjadi sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasannya sendiri. Seperti contoh kasus berikut :
6. Pujiono (baca: syekh Puji) menikahi Ulfa yang masih dibawah umur, sebagai isteri kedua. Yang menjadi kontroversial adalah usia Ulfa masih 12 tahun. Dengan dalih sah secara Agama, dan berpedoman kepada

pernikahan Rasul dan Aisyah yang masih berumur 9 tahun, pernikahan tersebut berlangsung dengan persetujuan orang tua Ulfa dan isteri pertama Puji. Namun karena sorotan berbagai kalangan, Puji akhirnya mengembalikan Ulfa kepada orang tuanya;

7. Pernikahan yang pernah terjadi antara Rhoma Irama dengan Angel Lelga yang menurut beberapa sumber media, Rhoma menikahi Angel karena dia bersedia menjadi muallaf. Pernikahan tersebut ditutupi salah satunya karena khawatir popularitas keartisannya akan pudar. Nyatanya, setelah terekspos media masa, Rhoma Irama justru menceraikan Angel Lelga;
8. Pernikahan Bambang Triatmojo dan Mayangsari. Sebagai orang terkenal di Indonesia, pernikahan sirri dalam poligami yang dilakukan Bambang tersebut salah satunya bertujuan menghindari publikasi media. Ketika pers mengulas berita tersebut, yang terjadi adalah konflik berkepanjangan dengan isteri pertamanya, Halimah, bahkan dengan anak-anaknya. Disinilah sebenarnya keabsahan nikah sirri harus dipertanyakan kembali;
9. Pernikahan *sirri* yang dilakukan oleh Bupati Garut, Jawa Barat Aceng HM. Fikri (baca: Aceng) dengan Fani Oktora (baca: FO) pada hari Senin, 16 Oktober 2012 merupakan peristiwa kontroversial yang cukup menghebohkan banyak kalangan, karena Aceng disatu sisi sebagai pejabat negara, disisi lain, sebagai tokoh masyarakat yang dipandang mengerti agama,³³ tetapi dalam melakukan pernikahan

³³ Acaeng, adalah salah seorang sarjana dan alumni Perguruan Tinggi Agama Islam di Jawa Barat.

tersebut terkesan tidak etis disebabkan ia menceraikan FO melalui SMS dengan talak tiga sekaligus (*talak ba'in*).³⁴ Dan Fani Oktara merasa dilecehkan oleh sang Bupati setelah dirinya hanya dinikahi selama 4 hari karena dianggap tidak perawan.³⁵

10. Nikah sirri dilakukan karena pasangan memang tidak tahu dan tidak mau tahu prosedur hukum. Hal ini bisa terjadi pada suatu masyarakat wilayah desa terpencil yang jarang bersentuhan dengan dunia luar. Lain lagi dengan komunitas jamaah tertentu misalnya, yang menganggap bahwa kyai atau pemimpin jamaah adalah rujukan utama dalam semua permasalahan termasuk urusan pernikahan. Asal sudah dinikahkan oleh kyainya, pernikahan sudah sah secara Islam dan tidak perlu dicatatkan;
11. Nikah sirri dilakukan hanya untuk penjajagan dan menghalalkan hubungan badan saja. Bila setelah menikah ternyata tidak ada kecocokan maka akan mudah menceraikannya tanpa harus melewati prosedur yang berbelit-belit;
12. Nikah sirri dilakukan untuk menghindari beban biaya dan prosedur administrasi yang berbelit. Biasanya pernikahan semacam ini dilakukan oleh kalangan pendatang yang tidak mempunyai KTP. Di Jakarta banyak terjadi di lingkungan pendatang yang hidup di lingkungan kumuh dan tidak menetap;

³⁴ Lihat, Koran Harian *Tribun*, Sabdtu, 01 Desember 2012, h. 1 dan 7. *Majalah Nova*, N0. 1294/XXIV, 10-16 Desember 2012, h. 58.

³⁵ <http://www.youtube.com/user/dedikusmayadi/Published> on Dec 1, 2012

13. Nikah sirri dilakukan karena alasan pernikahan beda agama. Biasanya salah satu pasangan bersedia menjadi *muallaf* (baru beragama Islam) untuk memperoleh keabsahan pernikahannya. Dan bisa jadi masih ada faktor lain yang belum terungkap, semua alasan tersebut mengarah kepada posisi perkawinan sirri (tidak tercatat) dipandang sebagai jalan pintas untuk menghalalkan hubungan suami isteri.

G. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya pernikahan tidak tercatat dilakukan karena ada hal-hal yang dirasa tidak memungkinkan bagi pasangan untuk menikah secara formal. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan tidak tercatat, yang semua alasan tersebut mengarah kepada posisi perkawinan sirri dipandang sebagai jalan pintas yang lebih mudah untuk menghalalkan hubungan suami isteri.
2. Problem yang menyertai pernikahan tidak tercatat yang paling nyata adalah problem hukum, khususnya bagi perempuan, tapi juga problem intern dalam keluarga, problem sosial dan psikologis yang menyangkut opini publik yang menimbulkan tekanan batin bagi pihak perempuan. Problem agama yang perlu dipertanyakan

lagi keabsahan nikah sirri yang akhir-akhir ini marak terjadi di Indonesia;

3. Dampak pernikahan tidak tercatat bagi perempuan adalah secara hukum, isteri tidak dianggap sebagai isteri sah, tidak berhak mendapat warisan jika suami meninggal, tidak berhak mendapat harta gono-gini bila terjadi perpisahan. Dampak tersebut juga berlaku bagi anak kandung hasil pernikahan siri. Adapun dampak sosial lebih kepada benturan-benturan dengan pandangan negatif masyarakat tentang status pernikahan sirri, yang bisa menimbulkan tekanan batin bagi pelaku terutama perempuan;
4. Nikah sirri, yang berkembang ditengah masyarakat adalah nikah yang tidak terdaftar secara resmi di lembaga perkawinan.(nikah tidak tercatat) Bukan pernikahan yang dirahasiakan sebagaimana terambil dari kata "*sirrun*" dalam bahasa Arab yang berarti: rahasia.

BAB VII POLIGAMI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami

1. Pengertian Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani, kata ini merupakan gabungan dari *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan kata *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.¹ Sedangkan dalam bahasa Arab poligami sering diistilahkan dengan *ta'addud az-zaujat*.² Poligami menurut kamus Bahasa Indonesia ialah ikatan perkawinan, yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.³

Menurut tinjauan antropologi sosial, poligami mempunyai pengertian seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita dalam waktu bersamaan, sedangkan

¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi di Islam*, (Jakarta:PT. Baru Van Hoeve,t.t, 2006), h. 789

² Ahmad Warson Al-Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 1985), h. 970

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1089

poliandri adalah perkawinan antara seorang wanita dengan beberapa orang laki-laki.

Istilah poligami jarang dipakai dikalangan masyarakat, dan hanya digunakan dikalangan antropologi saja, sehingga secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan yang disebut poligami, dan kata ini digunakan sebagai lawan dari poliandri.⁴ Sehingga secara istilah, poligami berarti ikatan perkawinan dimana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Walaupun dalam pengertian di atas terdapat kalimat “salah satu pihak”, akan tetapi karena istilah perempuan yang memiliki banyak suami dikenal dengan poliandri, maka yang dimaksud poligami disini adalah ikatan perkawinan, dimana seorang suami punya beberapa isteri dalam waktu bersamaan.⁵

2. Dasar Hukum Poligami

Ayat al-qur'an yang menjadi dasar diperbolehkannya poligami adalah QS.an-Nisā (4): 3 sebagai berikut:

⁴ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, h. 71-72

⁵ Abdul Aziz Dahlan, *OP Cit*, h. 1185

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَتًى وَتَلْتِ وَرُبْعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil ⁶, maka (kawinilah) seorang saja ⁷, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya" (QS.an-Nisā (4): 3). ⁸

Menurut Hamka untuk memahami persoalan kebolehan melakukan perkawinan lebih dari seorang isteri (poligami), harus dilihat Munasabahnya dengan ayat sebelumnya, yakni QS. An-Nisa (4): 2, penegasan tentang diperbolehkannya beristeri lebih dari seorang sampai empat, sebagaimana bunyi ayat 3, ..."maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu

⁶ Dimaksud dengan berlaku adil disini adalah: perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

⁷ Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu; sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

⁸ Departemen Agama RI , Dirjen Bimas Islam dan Pembinaan Syari'ah, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (PT. Tehazed, Jakarta,, 2010), h. 99

senangi: dua, tiga, empat...”. Dengan demikian pangkal ayat dua tentang pemeliharaan anak yatim bertemu dengan kebolehan untuk beristeri lebih dari satu sampai empat.

Selanjutnya, dalam persoalan keharusan berbuat adil terhadap perempuan yang dinikahi sebagai syarat kebolehan melakukan perkawinan lebih dari seorang sampai empat, sebagaimana ditegaskan pada kalimat selanjutnya masih dalam QS. an-Nisa (4): 3 yang berbunyi “tetapi bila kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka satu saja..”. sebagai ganti adanya kekhawatiran tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (yang dinikahi). Kekhawatiran ini didasarkan atas firman Allah dalam QS. An-Nisa (4): 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا
كُلَّ الْمِيلِ فِتْزُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ
اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa (4):129)⁹

⁹*Ibid*, h. 130

Menurut Sayid Sabiq, seorang suami yang mau berpoligami harus meyakini bahwa dia dapat berlaku adil. Adil yang dimaksud adalah kemampuan untuk berbuat adil secara lahir yaitu mampu membagi waktu dan hartanya antara isteri muda dan isteri tuanya, dan selain adil secara lahir juga mampu berlaku adil secara batin yaitu **cinta dan kasih sayang**.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki yang bersangkutan atau hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, suami dapat beristeri lebih dari seorang (poligami). Sedangkan yang menjadi dasar pelaksanaan poligami di Indonesia yang berdasarkan kepada UU No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 3 yang berbunyi:

- a. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami;
- b. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.¹⁰

Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 40, yaitu: “apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”.¹¹

¹⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005), h. 298

¹¹ K. Kwantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta:Ghalia Indah, 1980), h. 82

Sebagai bahan pemikiran, bahwa dikemukakan oleh Al-Maragi yang disebutkan dalam kitab Tafsir Al-Maragi, bahwa kebolehan poligami yang disebutkan dalam surat an-Nisa ayat 3 merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat yang hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkan dengan syarat dapat dipercaya menegakan keadilan dan aman dari perbuatan yang melewati batas. Untuk itu merupakan suatu kewajiban bagi para hakim dan pemberi fatwa yang telah mengetahui, bahwa menolak kerusakan harus lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan. Seperti disebutkan dalam kaidah fiqh:

دَرَّةُ الْمُفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَانِبِ الْمَصَالِهِ¹²

“Menghindari kerusakan, mendatangkan kemaslahatan”
Dan juga tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain:

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَّارَ¹³

Maksud dari kaidah tersebut bahwa kemadaratan itu telah terjadi dan akan terjadi. Apabila demikian halnya wajib untuk dihilangkan. sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al- Baqarah (2): 11:

¹² Ima Jalaludin Abdurrahman Abi Bakar As Suyuti, *Al Misbah Wa An-Nazair*, (Beirut: Dar Al Fakir, 1995 M./1415H.), h. 63

¹³ *Ibid*, h. 63

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ



“Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami orang-orang yang Mengadakan perbaikan."

Hendaknya mereka mempertimbangkan atau memikirkan baik-baik dalam menanggulangi kasus-kasus seperti itu, hal ini menunjukkan betapa pentingnya hati-hati dalam melakukan poligami. Hubungannya dengan QS An-Nisa (4): 129, menurut Al-Maragi yang terpenting adalah usaha maksimal untuk berbuat adil, ataupun diluar kemampuan manusia seperti kecenderungan hati manusia terhadap seorang isteri tidak terhadap ister-isterinya yang lain, maka dalam hal ini seorang tidak diwajibkan berbuat adil.¹⁴ Sedangkan kondisi-kondisi diperbolehkannya poligami menurut Al-Maragi adalah:

1. Bila seorang suami beristerikan seorang wanita mandul sedangkan ia sangat mengharapkan anak;
2. Bila isteri telah tua dan mencapai umur *ya'isah* (tidak haid) lagi, dan ia mampu memberi nafkah kepada lebih dari seorang isteri;

¹⁴ Al-maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Jilid Pertama (Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1382/1963), h. 181

3. Demi terpeliharanya kehormatan diri (agar tidak berzina) karena kapabilitas seksualnya memang mendorongnya untuk berpoligami.
4. Bila diketahui dari hasil sensus, kaum wanita lebih banyak dari kaum pria dengan perbandingan yang mencolok.¹⁵

Mengenai perkawinan poligami ini semua Imam Mazhab (Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki) sepakat bahwa seorang laki-laki boleh beristeri empat dalam waktu bersamaan tidak boleh lima.¹⁶ Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Abu Daud dari Hārīs bin Qais, ia berkata:

أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانٍ نِسْوَةٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِخْتَرِي مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

“Saya masuk Islam bersama-sama isteri dengan delapan isteri saya, lalu saya ceritakan hal itu kepada nabi SAW. Maka beliau bersabda: pilihlah empat orang diantara mereka”¹⁷

Adapun hadis yang mengisyaratkan diperbolehkannya poligami diantaranya, dari Malik meriwayatkan dalam Al-

¹⁵*Ibid*, h. 182

¹⁶ Muhammad Jawad Mughiniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Penerjemah Masykur AB, Lentera 1996,) h. 333

¹⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh As- Sunnah*, Penerjemah Syaiful Islam, (Bandung: Al-Maarif, 1999), h. 139

Muwatta', Nasa'iy dan Daruqutni dalam masing-masing kitab Sunnahnya, mengungkapkan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَيْلِنَا لَانَ بْنِ أُمَيَّةِ التَّقْفِيِّ وَ قَدْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ
عَشْرُ نِسَوَةٍ : إِحْتَرَّ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقَ سَائِرِ هُنَّ

“Bahwa Nabi berkata kepada Ghailan bin Umayyah Assaqafi yang masuk Islam, padahal ia mempunyai sepuluh orang isteri, Rasulullah bersabda kepadanya: pilihlah empat orang diantara mereka, dan ceraikan yang lainnya.¹⁸

3. Pendapat Para Ulama Tentang Poligami

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum poligami. Masjfuk Zuhdi menjelaskan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau mudarat dari pada manfaatnya; karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya, maupun konflik antara isteri beserta anak-anaknya masing-masing.

Hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah

¹⁸*Ibid*, h. 139

menetralisir sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam keluarga monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati, dengki dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat membahayakan keutuhan keluarga. Dengan demikian poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat, misalkan isterinya mandul (tidak dapat membuahkan keturunan), isteri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri.¹⁹

Pendapat yang lebih ekstrim datang dari Muhammad Abduh, yang mengatakan bahwa hukum berpoligami bagi orang yang merasa khawatir tidak akan berlaku adil adalah haram. Selain itu poligami yang dilakukan dengan tujuan hanya untuk kesenangan memenuhi kebutuhan biologis semata hukumnya juga haram. Poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti tidak dapat mengandung. Kebolehan poligami juga mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil. Ini merupakan sesuatu yang sangat berat, seandainya manusia tetap bersikeras untuk berlaku adil tetap saja ia tidak akan membagi kasih sayangnya secara adil kepada masing-masing isterinya.

Mengenai syarat keadilan dalam poligami juga diungkapkan para Imam Madzhab yaitu Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Menurut mereka seorang suami

¹⁹ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, , (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989), h. 12.

boleh memiliki seorang isteri lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang isteri; Akan tetapi kebolehan tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, baik dari nafkah atau gilirannya.²⁰ dalam hal ini imam Syafi'i menambahkan, syarat lain yang harus ditekankan adalah suami harus dapat menjamin hak anak dan isteri. Ayat *zâlika adnâ anlâ taulû* dipahami oleh Imam Syafi'i dalam arti tidak banyak tanggungan kamu. Ia terambil dari kata *'alâ ya'ûlû* yang berarti menanggung dan membelanjai. "kalau satu istri saja sudah berat tanggungannya bagi suami, apalagi lebih dari satu istri".²¹

Para ulama juga memberikan saran, apabila tidak bisa berlaku adil, hendaknya beristeri satu saja itu jauh lebih baik. Para ulama Ahli Sunnah juga telah sepakat, bahwa apabila seorang suami mempunyai isteri lebih dari empat, maka hukumnya haram. Perkawinan yang kelima dan seterusnya dianggap batal dan tidak sah, kecuali suami telah menceraikan salah seorang isteri yang empat itu dan telah habis pula masa iddahnya. Dalam masalah membatasi isteri empat orang saja, Imam Syafi'i berpendapat bahwa hal tersebut telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW sebagai penjelasan dari firman Allah SWT, bahwa selain Rasulullah tidak ada seorangpun yang dibenarkan nikah lebih dari empat perempuan.

²⁰ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996), h. 89.

²¹ *Ibid*, h. 90

Menurut Asghar Ali Engineer, hukum poligami adalah boleh selama memenuhi syarat keadilan, terutama keadilan bagi perempuan dan anak yatim. Ia menjelaskan, untuk menentukan hukum poligami perlu untuk memahami konteks QS. An-Nisa' (4): 3. Dalam memahaminya juga perlu terlebih dahulu dihubungkan dengan ayat yang mendahului konteksnya. Surat An-Nisa' (4): 1-3 pada ayat yang ketiga ini berkaitan dengan poligami, yang dimulai dengan “ Dan jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak (perempuan) yang yatim..”. penekanan ketiga ayat ini bukan mengawini lebih dari seorang perempuan, tetapi berbuat adil kepada anak yatim. Maka konteks ayat ini adalah menggambarkan orang-orang yang bertugas memelihara kekayaan anak yatim sering berbuat yang tidak semestinya, yang kadang mengawininya tanpa mas kawin; maka Al-Qur'an memperbaiki perilaku yang salah tersebut. Bahwa menikahi janda dan anak-anak yatim dalam konteks ini sebagai wujud pertolongan, bukan untuk kepuasan seks. Sejalan dengan itu pemberlakuannya harus dilihat dari konteks itu bukan untuk selamanya. Ini artinya, bahwa ayat ini adalah ayat yang kontekstual yang temporal pemberlakuannya, bukan ayat yang prinsip yang universal yang harus berlaku selamanya.²²

Pendapat serupa diungkapkan Muhammad Syahrur. Ia memahami ayat tersebut bahwa Allah SWT bukan hanya memperbolehkan poligami, tetapi Allah sangat

²² Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Terjemaha Farid Wajidi dan Assegaf, Cici Farkha, (Yogyakarta: LSPPA dan CUSO, 1994), h. 89.

menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi, pertama: bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat itu adalah janda yang memiliki anak yatim, kedua: harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perintah poligami menjadi gugur.²³

Menurut Sayyid Qutub, poligami merupakan suatu perbuatan *Rukhsah*. Karena merupakan *rukshah*, maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini disyaratkan bisa berbuat adil kepada isteri-isterinya. Keadilan yang dituntut disini termasuk dalam nafkah, muamalah, pergaulan serta pembagian malam. Sedang bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja. Sementara bagi yang bisa berbuat adil terhadap isterinya, boleh poligami dengan maksimal hanya empat isteri.

Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat 3 pada surat An-Nisa poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. Keadilan yang dipersyaratkan pada ayat diatas adalah keadilan dalam berbagai hal yaitu:

- a. Adil dalam hal memberikan nafkah hidup mereka selain makan, minum, serta pakaian dan sebagainya.

²³ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Terjemah Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, (Yogyakarta: Elsaq, 2004), h. 428

- b. Pakaian, rumah atau tempat tinggal sebab orang hidup tidak cukup hanya makan dan minum saja tanpa tempat tinggal dan pakaian untuk menutup aurat.
- c. Waktu dalam menggilir isteri-isteri, masing-masing beberapa lama, jika yang satu mendapatkan giliran satu malam maka suami juga harus menggilir isteri lainnya juga satu malam.
- d. Waktu bepergian bersama isteri juga harus mendapat keadilan, untuk itu diperlukan undian bagi suami yang mempunyai lebih dari satu isteri saat ia menghendaki bepergian.²⁴

Poligami terikat oleh syarat berlaku adil kepada seluruh isteri, dan barang siapa yang tidak bisa memastikan kesanggupannya untuk merealisasikan prinsip keadilan kepada seluruh isteri-isterinya, maka dia tidak boleh beristeri lebih dari satu; Seandainya dia tetap menikah lebih dari satu sementara dia tahu bahwa dia tidak dapat berlaku adil, maka nikahnya sah tapi dia berdosa.²⁵

Bagi orang yang memiliki isteri lebih dari satu, hendaklah memisahkan tempat kediaman masing-masing isteri itu. Masing-masing isteri menempati sebuah rumah, rumah itu pun harus sama, kecuali mereka sama-sama rela dan ikhlas ditempatkan dalam sebuah rumah saja. Apabila seorang suami tinggal didalam sebuah rumah yang terpisah

²⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwainy, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1995), h. 618

²⁵ Muhammad Asy Syaarif, *Poligami itu Wajib?*, (Yogyakarta: Mumtaz, 2012), h. 35.

dari isterinya, hendaklah pertemuan suami dengan isteri-isteri itu pun dilakukan dengan seadil-adilnya.²⁶

Mayoritas ulama fiqh menyadri bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Abdurrahman Al-Jaziri menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang diantara isteri-isteri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena sebagai suami, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang isterinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang diluar batas kontrol manusia.²⁷ Sedangkan kondisi-kondisi diperbolehkannya poligami menurut al-Maragi adalah:

- a. Bila seorang suami beristerikan seorang wanita mandul sedangkan ia sangat mengharapakan anak;
- b. Bila isteri telah tua dan mencapai umur *ya'isah* (tidak haid) lagi, dan mampu ia memberi nafkah kepada lebih dari seorang isteri;
- c. Demi terpeliharanya kehormatan diri (agar tidak berzina) karena kapabilitas seksualnya memang mendorongnya untuk berpoligami;

²⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 392

²⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah*, (Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyyah, 1969), h. 239.

- d. Bila diketahui dari hasil sensus, kaum wanita lebih banyak dari kaum pria dengan perbandingan yang mencolok.²⁸

Mengenai perkawinan poligami ini semua Imam Mazhab (imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki) sepakat bahwa seorang laki-laki boleh beristeri empat dalam waktu bersamaan dan tidak boleh lima.²⁹

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan, meskipun menggunakan dasar yang berbeda, para ulama konvensional mengakui poligami boleh hukumnya, bukan dianjurkan (sunnah), apalagi perintah (wajib) seperti diasumsikan kebanyakan orang. Demikian juga dari penjelasan tersebut di atas tidak ada indikasi menyebutkan poligami sebagai asas perkawinan dalam Islam, apalagi menyebutkan poligami sebagai fitrah sebagaimana dikelaim sebagian orang. Kesimpulan lain yang dapat dicatat adalah bahwa ada sejumlah naş yang dicatat para ulama mazhab, yakni: QS.an-Nisa (4): 3, an-Nisa (4): 129, al-Ahzab (33): 50, al-Mu'minun (23): 5-6, ancaman bagi suami yang tidak adil kepada isteri-isterinya, dan kasus laki-laki yang masuk Islam dan disuruh nabi mempertahankan isterinya maksimal empat. Dengan kata lain, sejumlah naş inilah yang membahas poligami. Sebagai tambahan, semua ulama tersebut di atas

²⁸*Ibid*, h. 182

²⁹ Muhammad Jawad Mughiniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Penerjemah Masykur AB, Lentera 1996,) h. 333

mencatat QS. An-Nisa (4): 3 untuk mendukung kebolehan poligami maksimal empat.³⁰

4. Kriteria-Kriteria Poligami

Kriteria ataupun alasan yang mendukung seorang suami melakukan poligami seperti halnya seorang isteri tidak dapat memberikan keturunan, atau isteri tersebut berpenyakit sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana bunyi Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.³¹

Suatu perkawinan harus ditopang dengan pemenuhan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, dikarenakan isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga ia tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri. Faktor-faktor di atas yang menjadi sebab dibolehkannya poligami tetapi ia harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam syari'at Islam dan undang-undang perkawinan.

Didalam surat An-Nisa tentang poligami, diturunkan setelah perang *Uhud*, pada saat itu banyak sekali

³⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: ACADEMIA+TAZZAFA, 2009), h. 265

³¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005), h. 298

pejuang muslim yang gugur, sehingga mengakibatkan banyak anak yatim yang mesti mendapatkan pengawasan dari orang tua yang bertanggung jawab. Perkawinan adalah satu-satunya jalan untuk memecahkan persoalan tersebut. Dalam hal ini al-qur'an telah memberikan ketentuan yang amat jelas, sehingga anak-anak yatim memperoleh hak-haknya kembali dan ketidakadilan tidak berlaku lagi. Islam telah memberikan yang sempurna dalam memecahkan problem yang pelik itu.³²

Berdasarkan latar belakang historis tentang turunnya ayat itu, Islam tidaklah berarti menyuruh pemeluknya untuk berpoligami, bahkan Islam datang memperketat kebolehan poligami, bukan saja dengan jumlah maksimal empat orang isteri, namun juga menjadikannya sebagai sarana untuk mengatasi persoalan anak yatim. untuk memelihara mereka dari perbuatan yang tidak diinginkan; Allah SWT membolehkan untuk menikahi mereka. Tetapi jika merasa takut akan menelantarkan mereka dan tidak sanggup memelihara anak yatim tersebut, maka Allah membolehkan mencari perempuan lain untuk dinikahi. Kebolehan poligami setidaknya harus memenuhi dua persyaratan, yaitu berlaku adil antara isteri-isteri dan anak-anaknya sesuai dengan QS An-Nisa (4): 3, dan kesanggupan membayar nafkah atau belanja rumah tangganya.

Tujuan poligami dalam Islam dapat dilihat dari poligaminya Rasulullah SAW, perbuatan Nabi untuk menikahi isteri-isterinya bukan bertujuan biologis melainkan untuk

³² Labib Ustadz, MZ, *Rahasia Poligami Rasulullah SAW*, (Jakarta: Darul Falah, 2005) h.51

membantu berbagai kesulitan yang dialami perempuan yang kemudian menjadi isteri-isterinya. Sekiranya Rasulullah seorang yang tamak terhadap perempuan, maka beliau tentu tidak menikahi perempuan-perempuan yang kebanyakan sudah janda dan secara ekonomi tidak menguntungkan.³³ selama hidupnya Nabi tidak pernah menikah dengan seorang gadis kecuali Aisyah. Semua isteri Nabi selain Aisyah adalah janda yang sebagian membawa beberapa anak yatim, dan beliau baru berpoligami setelah isteri pertamanya Khadijah wafat dalam usia 60 tahun.³⁴ Hal ini menimbulkan akibat hukum dalam perkawinan sudah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai jalan yang benar dan sah untuk mendapatkan keturunan, tidak dapat diragukan lagi perkawinan yang didasarkan atas prinsip-prinsip cinta, kehormatan, dan kepedulian timbul baik jauh lebih luhur daripada hubungan-hubungan temporer dengan berbagai pasangannya.

Perkawinan dapat dianggap sebagai keberadaan bersama dalam pasangan dimana pihak-pihak utama diberi peran yang berbeda namun saling melengkapi, yang terdiri dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana juga seorang yang melakukan perkawinan poligami akan berakibat hukum terhadap isteri-isteri, harta benda dan anak-anaknya.

Setiap perkawinan memiliki bobot yang sama dalam hukum Islam dan karena itu suami tidak diperbolehkan secara terbuka sesuatu yang lebih besar pada seorang isterinya dan

³³ M. Alfatih Suryadilaga, *Sejarah Poligami dalam Islam cet.1*, (Bandung: Citra Umbara 2002), h.11

³⁴ Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h.110

mengorbankan isteri-isternya yang lain. Suami harus dapat berlaku adil dalam memberikan tanggung jawab memberikan perlindungan dan dukungan terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, karena Allah SWT telah memberikan kemampuan fisik dan mental yang berguna untuk melindungi peranannya sebagai pelindung dan penjaga keluarganya, kewajiban-kewajibannya adalah memberikan nafkah baik nafkah lahir seperti memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya hidup sehari-hari dan lain-lainnya maupun nafkah batin. firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah (2): 233 yang artinya:

“para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma’ruf. Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut..³⁵

Ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap isteri-isteri yang berupa jaminan keadilan dalam memberikan nafkah sehari-hari, tempat kediaman dan kebutuhan lainnya. Mengenai alasan-alasan seorang suami

³⁵Departemen Agama RI, *loc cit.* h. 47

diperbolehkan poligami sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 sebagai berikut:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.³⁶

5. Alasan Isteri Melarang Suami Berpoligami

Pada dasarnya seorang suami yang melakukan poligami didalam Islam diperbolehkan, namun banyak juga yang memberi syarat yang sangat ketat kepada seorang suami yang ingin berpoligami, karna didalam keseharian banyak yang menyalah artikan sebuah poligami, ada yang berpoligami dengan dasar ingin dikatakan hebat oleh masyarakat ada juga yang mengatas namakan mengikuti ajaran Rasul, padahal pada kenyataannya Rasul melakukan poligami karna ingin membantu wanita-wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya di dalam medan perang.

Hikmah diizinkan berpoligami (dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil) antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan isteri mandul.
- b. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan isteri, sekalipun isteri tidak dapat menjalankan

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 57 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum*, Cetakan Pertama (Bandung: Citra Umbara, 2012), h. 11

funksinya sebagai seorang isteri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan.

- c. Untuk menyelamatkan suami dari *hypersex* dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.³⁷
- d. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara atau masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama.

Tentang hikmah diizinkan Nabi Muhammad beristeri lebih dari seorang, bahkan melebihi jumlah maksimal yang diizinkan bagi umatnya (yang merupakan *khususiyat* bagi Nabi) adalah sebagai berikut:

- a. Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama. Isteri Nabi sebanyak 9 orang itu bisa menjadi sumber informasi bagi umat Islam yang ingin mengetahui ajaran-ajaran Nabi dalam berkeluarga dan bermasyarakat, terutama mengenai masalah-masalah keawanan atau kerumah tanggaan.
- b. Untuk kepentingan politik mempersatukan suku-suku bangsa Arab dan untuk menarik mereka masuk agama Islam. Misalnya perkawinan Nabi dengan Juwairiyah, putri Al-Harits (kepala suku Bani Musthaliq). Demikian pula perkawinan Nabi dengan Shafiyah (seorang tokoh dari Bani Quraizhah dan Bani Nazir).
- c. Untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Misalnya perkawinan Nabi dengan beberapa janda pahlawan Islam yang telah lanjut usianya, seperti Saudah binti Zum'ah (suaminya meninggal setelah kembali dari

³⁷ . Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, Op. Cit, h. 136

hijrah Abessinia), Hafshah binti Umar (suaminya gugur di perang badar).³⁸

Poligami dalam Islam sangat berbeda dengan praktik poligami sebelumnya. Perbedaan itu menonjol pada dua hal. **Pertama**, pada bilangan isteri dari yang tidak terbatas jumlahnya menjadi dibatasi hanya empat. Pembatasan ini dirasakan sangat berat, sebab laki-laki pada masa itu sudah terbiasa dengan banyak isteri, lalu mereka disuruh memilih empat orang saja dan menceraikan selebihnya. **Kedua**, ada syarat poligami, yaitu harus berlaku adil. Sebelumnya poligami itu tidak mengenal syarat apapun, termasuk syarat keadilan. Akibatnya, poligami banyak membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi kaum perempuan, karena para suami yang berpoligami tidak terikat dengan keharusan berlaku adil, sehingga mereka berlaku aniaya dan semena-mena mengikuti luapan nafsu.³⁹

Apabila seorang isteri atau isteri-isteri yang menolak atau tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (2) menegaskan:

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isteri-isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau sebab-sebab lainnya yang

³⁸ . *Ibid*, h. 136-137

³⁹ . Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 44-48

perlu mendapat penilaian pengadilan dan hakim pengadilan.⁴⁰

Apabila isteri tidak mau memberikan persetujuan pada suaminya untuk beristeri lebih dari seorang, berdasarkan salah satu alasan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini, isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.⁴¹ Apabila keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin pengadilan tidak diperoleh, maka menurut ketentuan Pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1975, pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang poligami seperti telah diuraikan di atas mengikat semua pihak, pihak yang akan melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal-Pasal di atas dikenakan sanksi pidana. persoalan ini diatur dalam Bab IX Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975:

- a. Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:

⁴⁰ . Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 48-49

⁴¹ Tihami, Sobari Sahrani , *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 370

- 1) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah akan dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 2) Pegawai pencat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6,7,8,9,10, ayat (1),11,12, dan 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3(tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

b. Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

Ketentuan hukum poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan kemaslahatannya. Dengan kemaslahatan yang dimaksud, terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi atas dasar cinta kasih dan kasih sayang yang di ridā'i oleh Allah SWT. Oleh karena itu, segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut, sehingga mesti dihilangkan atau setidaknya dikurangi.

Status hukum poligami adalah Mubah. Mubah dimaksud, sebagai alternatif beristeri hanya sebatas 4 (empat) orang isteri. Hal itu ditegaskan oleh pasal 55 KHI sebagai berikut:

- a. Beristeri lebih dari seorang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.

- b. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Dasar pertimbangan KHI adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmizi, dan Ibn Hibban yang mengungkapkan bahwa sesungguhnya Gailan Ibn Salamah masuk Islam dan ia mempunyai 10 (sepuluh) orang isteri. Mereka bersama-sama masuk Islam. Maka nabi Muhammad SAW memerintahkan kepadanya agar memilih empat orang saja diantaranya dan menceraikan yang lainnya.⁴²

Pada dasarnya tidak ada di dunia ini suatu perbuatan yang semata-mata mendatangkan maslahat sebagaimana juga tidak ada perbuatan yang semata-mata mendatangkan mudharat.

Terkait dengan praktik poligami di tengah-tengah masyarakat, secara jujur jika kita amati, tidak sedikit yang berhasil dalam arti tujuan perkawinan yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dapat berhasil dicapai. Namun demikian, dengan mudah juga kita jumpai pernikahan poligami yang justru memporak-porandakan ketenangan rumah tangga sebelumnya akibat satu hal dan lain hal., misalnya karena faktor ekonomi, psikologis, sifat yang tidak adil dan sebagainya.

⁴² . Zainuddin Ali, *Hukum Prdata Islam di Indonesia*, Op. Cit, h. 49-50

B. Dampak Perkawinan Poligami

Dampak negatif yang ditimbulkan dari berpoligami terutama bagi isteri (pertama) dan anak-anaknya dapat disebutkan sebagai berikut diantaranya:

1. Dampak Psikologis

Perasaan inferior isteri dan menyalahkan diri karena merasa tindakan suaminya berpoligami akibat dari ketidakmampuan dirinya memenuhi kebutuhan biologis suaminya dan juga ketidakmampuan membahagiakan suaminya.

2. Dampak Ekonomi Rumah Tangga

Ketergantungan secara ekonomi kepada suami. Walaupun ada beberapa suami yang dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya, tetapi dalam praktinya lebih sering ditemukan bahwa suami lebih mementingkan isteri muda dan menelantarkan isteri dan anak-anaknya yang terdahulu. Akibatnya isteri yang tidak memiliki pekerjaan akan sangat kesulitan menutupi kebutuhan sehari-hari.

3. Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun psikologis. Hal ini umumnya terjadi pada rumah tangga poligami, walaupun begitu kekerasan juga terjadi pada rumah tangga yang monogami.

4. Dampak Hukum

Seringnya terjadi nikah dibawah tangan (perkawinan yang tidak dicatatkan pda kantor catatan sipil atau kantor urusan agama), sehingga perkawinan dianggap tidak sah oleh Negara. Walaupun perkawinan tersebut sah menurut agama. pihak perempuan akan dirugikan karena konsekuwensinya suatu perkawinan yang tidak ada, seperti hak waris dan sebagainya.

5. Dampak Kesehatan

Kebiasaan berganti-ganti pasangan menyebabkan suami atau isteri menjadi rentan terhadap penyakit menular seksual (PMS), bahkan rentan terjangkit virus HIV/AIDS.⁴³

Menurut Al-Athar dalam bukunya *Ta'addud Az-Zaujat* sebagaimana dikutip oleh Khairuddin Nasution dalam bukunya *Riba dan Poligami: sebuah studi atas pemikiran Muhammad Abduh*, menjelaskan empat dampak negatif dari poligami yakni:

- a. Menimbulkan kecemburuan antar isteri.
- b. Menimbulkan kekhawatiran dan kegelisahan dikalangan isteri jika suami tak dapat berlaku adil.
- c. Anak-anak yang lahir dari ibu yang berbeda sangat rawan terjadi permusuhan atau persaingan yang tidak sehat.
- d. Kekacauan dalam bidang ekonomi.⁴⁴

⁴³ [http://yotnoali.blogspot.com/2011/07/](http://yotnoali.blogspot.com/2011/07/Manfaat-Mudharat-Poligami.html) Menimbang - Manfaat-Mudharat-Poligami.html.? m=1,9/6/2014, 10:38 WIB

⁴⁴ . *Ibid*

C. Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang mendapat awalan “ke” dan akhiran “an”, yang berarti perihal (keadaan) harmonis; keselarasan dan keserasian. rumah tangga yaitu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah (seperti hal belanja rumah); berkenaan dengan keluarga. Sedangkan keluarga adalah ibu dan bapak serta anak-anaknya.⁴⁵ Ada yang mengatakan rumah tangga adalah unit terkecil dari suatu masyarakat.⁴⁶ Jadi, keharmonisan rumah tangga yang didalamnya terdapat sebuah keluarga yang terdiri dari ibu, bapak beserta anak-anaknya.

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga

Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, dalam pelaksanaannya tidak semudah mengatakannya. Banyak ayat Al-Qur'an maupun As-Sunnah mengenai rumah tangga yang sebenarnya ditujukan untuk mewujudkan keharmonisan hidup suami istri berikut anggota keluarganya. Berkaitan dengan terwujudnya keharmonisan rumah tangga, Islam memberikan ketentuan peraturan hidup bermasyarakat dengan mensyariatkan pernikahan yang mengatur hubungan individu dengan individu lain yang berlainan jenis kelamin. Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur pergaulan manusia, baik sebelum memasuki masa

⁴⁵ Depdikbud; *Loc.Cit*

⁴⁶ NJ. Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jamunu, Jakarta, 1969), h. 17

pernikahannya, saat berlangsungnya pernikahan, maupun setelah terwujudnya pernikahan.

a. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Memasuki Jenjang Perkawinan

1) Penentuan calon atas dasar agama

Dalam kenyataan hidup sehari-hari, sering dijumpai bahwa pengambilan keputusan untuk menikah dimotivasi oleh faktor lain diluar agama, misalnya menikahi seseorang karena faktor kekayaan, keturunan dan kecantikan/ketampanan. Ketiga faktor tersebut tidak dapat diingkari sebagai sesuatu yang penting untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Tetapi mengabaikan sama sekali faktor terpenting merupakan sebuah kekeliruan. Karena agamalah yang seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam menentukan calon pasangan hidup.

2) Pemilihan calon atas dasar keturunan

Diantara kaidah yang diletakkan Islam untuk mendukung keharmonisan rumah tangga yang akan dibangun adalah memilih pasangan hidup dari keluarga yang telah dikenal kesalehannya, akhlaknya, dan kemuliaan keturunannya.

3) Bukan keluarga atau kerabat dekat

Diantara pengajaran Islam dalam memilih istri atau suami adalah mengutamakan orang “asing” dari pada calon yang memiliki hubungan nasab atau famili yang masih terlalu dekat. Hal ini penting demi menjaga kecerdasan anak, menjamin

keselamatan jasmaninya dari penyakit menurun, cacat karena faktor keturunan, memperluas tali silaturahmi dan mempererat jalinan sosial.

4) Mengutamakan wanita yang subur

Islam menganjurkan seseorang yang akan menikah untuk memilih calon istri yang subur. Sehingga memungkinkan untuk cepat memperoleh keturunan. Karena diantara tujuan pernikahan yaitu memperoleh keturunan yang sah. Wanita yang subur antara lain dapat dikenali dari dua hal, yaitu: pertama, kebersihan jasmani dari berbagai penyakit yang dapat menghalanginya untuk memperoleh keturunan. Hal ini dapat diketahui melalui konsultasi dengan dokter ahli. Kedua, dengan memperhatikan secara cermat ibu dan saudara-saudara perempuannya yang telah menikah. Jika mereka tergolong wanita yang subur biasanya dia juga demikian.

5) Melihat calon pasangan

b. Kewajiban dan Hak Suami Istri

c. Bersikap Realistis dalam Menyikapi Keadaan

1) Realistis dalam soal mahar dan pernikahan

Tidak baik jika pihak calon istri mengajukan tuntutan mahar yang berlebihan dan penyelenggaraan resepsi perkawinan serta pemberian hadiah diluar kesanggupan calon suami. Semua itu harus melihat kemampuan pihak calon suami dapat memenuhi atau tidak.

- 2) Realistis dalam pemberian nafkah
Sikap paling baik yang harus dimiliki seorang wanita adalah memperhatikan kadar kemampuan dan kekuatannya dalam memberikan nafkah. Tidak selayaknya seorang istri menuntut nafkah berlebihan manakala suaminya dalam keadaan sulit. Dan juga tidak patut bersikap rakus ketika nafkah dari suami dalam keadaan lapang. Setiap keadaan harus disesuaikan dengan kelayakan.
- 3) Realistis dalam menghadapi sifat masing-masing pasangan
Setiap pasangan harus siap menerima kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri pasangan.
- 4) Bersikap realistis dalam menuntut hak dan melaksanakan kewajiban
Masing-masing pasangan harus berbuat menurut kadar kemampuan dirinya dan memahami kemampuan pasangan. Apabila salah satu pihak banyak menuntut untuk melaksanakan kewajiban maka pertengkaran sulit untuk dihindari. Yang satu bersikeras dengan tuntutananya, sedangkan yang lain terpojok karena ketidakmampuannya.

2. Indikator Keharmonisan Rumah Tangga

Menurut Dadang Hawari mengemukakan bahwa ada enam aspek sebagai suatu pegangan hubungan perkawinan itu bahagia, yaitu:

- a. Menciptakan kehidupan beragama dalam rumah tangga;
Keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Hal ini

penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika.

- b. Mempunyai waktu untuk bersama keluarga;
Keluarga yang harmonis selalu menyediakan waktu untuk bersama keluarganya.
- c. Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga;
Komunikasi merupakan dasar bagi terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga. Komunikasi akan menjadikan seseorang mampu mengemukakan pendapat dan pandangannya, sehingga mudah untuk memahami orang lain dan sebaliknya tanpa adanya komunikasi kemungkinan besar dapat menyebabkan terjadinya kesalahpahaman yang memicu terjadinya konflik.
- d. Saling menghargai antar sesama anggota keluarga;
- e. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim;
- f. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga; hubungan yang erat antara anggota keluarga dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai.⁴⁷

Aisjah Dachlan mengemukakan bahwa untuk mencapai kebahagiaan keluarga terdapat 10 aspek, yaitu:

- a. Hubungan antar-inter keluarga; maksudnya adalah hubungan baik dan harmonis antara satu keluarga

⁴⁷ <http://teori-psikologi-blogspot/2008/05/keharmonisan-rumah-tangga.html>, diakses pada sabtu, 30 Juli 2011 ; Lihat, Dadang Hawari, *Majalah Warta Bumi Putra*, Edisi 24, Juli 1994, hlm. 26

dengan para anggota keluarga lainnya atau dengan anggota masyarakat;

- b. Membimbing anak atau mendidik anak;
- c. Pakaian;
- d. Makanan;
- e. Kesehatan;
- f. Perumahan;
- g. Keuangan;
- h. Tata laksana rumah tangga;
- i. Keamanan lahir batin;
- j. Perencanaan sehat (matang), artinya mengatur dan membuat rencana hidup keluarga dengan mempertimbangkan kemauan, kesanggupan dan kemampuan masing-masing anggota keluarga.⁴⁸

Keluarga dikatakan harmonis atau keluarga bahagia menurut Sarlito Wirawan yang apabila dalam kehidupannya telah memperlihatkan faktor-faktor berikut:

- a. Faktor kesejahteraan jiwa. Yaitu redahnya frekwensi pertengkaran dan percekocokan di rumah, saling mengasihi, saling membutuhkan, saling tolong-menolong antar sesama keluarga, kepuasan dalam pekerjaan dan pelajaran masing-masing dan sebagainya yang merupakan indikator-indikator dari adanya jiwa yang bahagia, sejahtera dan sehat.
- b. Faktor kesejahteraan fisik. Seringnya anggota keluarga yang sakit, banyak pengeluaran untuk kedokter, untuk obat-obatan, dan rumah sakit tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga.

⁴⁸ NJ. Aisjah Dachlan, *Loc. Cit.*

- c. Faktor pertimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga. Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga. Misalnya; Banyak keluarga yang kaya namun mengeluh kekurangan.⁴⁹

Ciri-ciri keluarga harmonis menurut Islam adalah:

- a. Pembentukan keluarga yang di dasari harapan keridhaan Allah tanpa yang lain. Kedua belah pihak saling melengkapi dan menyempurnakan, memenuhi panggilan fitrah dan sunnah, menjalin persahabatan dan kasih sayang, serta meraih ketentraman dan ketenangan jasmani. Dalam menentukan standar jodoh keduanya hanya bertolak pada keimanan dan ketaqwan.
- b. Tujuan pembentukan keluarga. Keharmonisan rumah tangga akan terwujud apabila kedua pasangan saling konsisten terhadap perjanjian yang mereka tetapkan bersama. Tujuan utama mereka adalah menuju jalan yang telah digariskan Allah dan mengharap ridha-Nya. Dalam segala tindakan mereka yang tertuju hanyalah Allah semata.
- c. Lingkungan. Dalam keluarga yang harmonis upaya yang selalu dipelihara adalah suasana yang penuh kasih sayang dan masing-masing anggotanya menjalankan peran secara sempurna. Lingkungan keluarga merupakan tempat untuk

⁴⁹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 2*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), h. 79)

berteduh dan berlindung, tempat dimana perkembangan dan susah-senang dilalui bersama.

- d. Hubungan antara kedua pasangan. Dalam hubungan rumah tangga yang harmonis dan seimbang suami istri berupaya saling melengkapi dan menyempurmakan. Mereka menyatu dan ikut merasakan apa yang dirasakan anggota keluarga yang lain. Mereka saling mengobati, saling membahagiakan dan menyatukan langkah dan tujuan, keduanya menyiapkan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah.
- e. Hubungan dengan anak. Keluarga harmonis menganggap anak sebagai bagian darinya mereka membangun hubungan atas dasar penghormatan, penjagaan hak, pendidikan, bimbingan yang layak, pemurnian kasih sayang serta pengawasan akhlak dan perilaku anak.
- f. Duduk bersama. Keluarga harmonis selalu siap duduk bersama dan berbincang dengan para anggota keluarganya, mereka berupaya saling memahami dan menciptakan hubungan mesra. Islam mengajarkan agar yang tua menyayangi dan membimbing yang muda, dan yang muda menghormati dan mematuhi nasehat yang tua.
- g. Kerjasama saling membantu. Dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis setiap anggota rumah tangga memiliki tugas tertentu. mereka bersatu untuk memikul beban bersama. Dalam bangunan ini tampak jelas persahabatan, saling tolong-menolong, kejujuran, saling mendukung dalam kebaikan, saling menjaga sisi jasmani dan rohani masing-masing.

- h. Upaya untuk kepelembagaan bersama. Dalam kehidupan keluarga yang harmonis mereka berusaha saling membahagiakan. Mereka saling berupaya untuk memenuhi keinginan dan memperhatikan selera pasangannya. Saling menjaga dan memperhatikan cara berhias dan berpakaian. Untuk kepelembagaan bersama mereka selalu bermusyawarah dan berkomunikasi untuk meminta pendapat, pada waktu anak telah mampu memahami masalah tersebut ia diikutkan dalam musyawarah tadi.⁵⁰

3. Faktor yang Mempengaruhi Ketidak Harmonisan Rumah Tangga

- a. Faktor ekonomi
- b. Faktor kekerasan dan penganiayaan
- c. Faktor tidak ada kejujuran dan cemburu
- d. Faktor perselingkuhan
- e. Faktor judi dan minuman keras
- f. Faktor istri tidak patuh pada suami dan tidak akur dengan mertua
- g. Faktor suami atau istri pergi tanpa pamit
- h. Poligami tidak sehat.⁵¹

⁵⁰ <http://2. Blogspot.com>, Novita BossFamily On: Senin, Keluarga Harmonis, Akses 05 Mei 2016

⁵¹ Laporan tahunan PA Tanjungkarang, tahun 2010; Lihat, Firdaweri dkk., *Perceraian Akibat Tidak Ada Keharmonisan Rumah Tangga (Analisis Tentang Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjungkarang)*, Pusat Penelitian IAIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2010, h. 119

Keadaan krisis rumah tangga tersebut adakalanya disebabkan oleh satu faktor, dua faktor bahkan tiga faktor sekaligus yang mengakibatkan tidak ada keharmonisan dalam pergaulan hidup suami istri dan tidak menutup kemungkinan faktor-faktor tersebut muncul didorong oleh pengaruh lain seperti pengaruh lingkungan, social dan budaya serta rendahnya pemahaman agama dan pendidikan yang mengakibatkan semakin memburuknya keadaan rumah tangga.

Mengawali kehidupan rumah tangga tidak semudah yang dibayangkan. Dibutuhkan ketulusan hati serta kesabaran agar permasalahan yang sedang dihadapi dapat segera diselesaikan. Namun, ketika benih-benih ketidakharmonisan mulai muncul diharapkan setiap pasangan segera peka dan melakukan tindakan pencegahan demi menjaga keutuhan rumah tangga. Berikut ini adalah ciri-ciri rumah tangga tidak bahagia yang harus segera ditangani:

a. Sering terjadi perdebatan

Di awal kehidupan berumah tangga perdebatan yang dilakukan oleh sepasang suami-istri bisa dikatakan wajar karena satu sama lain masih berusaha memahami karakter masing-masing. Namun, bila setelah sekian lama hidup bersama tapi masih belum bisa menemukan titik temu, bagaimana mengatasi percekcoakan yang sering terjadi,

maka Anda perlu berhati-hati bisa jadi selama ini hubungan Anda dengan pasangan memang tidak bahagia.

b. Komunikasi berkurang

Komunikasi yang baik bertujuan untuk menyamakan persepsi serta cara paling ampuh untuk menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, Anda perlu mengavaluasi kembali bagaimana komunikasi Anda dengan pasangan selama ini berlangsung, jika komunikasi tiba-tiba berkurang jangan biarkan itu berlarut-larut, sehingga membahayakan pernikahan Anda.

c. Saling berbohong

Kejujuran adalah hal terpenting dalam kehidupan berumah tangga, tapi jika masing-masing pasangan sudah tidak lagi bisa saling memercayai dan cenderung lebih suka berbohong, maka Anda harus segera mengatasinya jika masih ingin mempertahankan pernikahan dengannya.

d. Tidak memiliki waktu baik untuk keluarga maupun pasangan

Anda dan pasangan sudah tidak lagi merasa nyaman berada di rumah. Karena itu, Anda lebih suka menghabiskan waktu di tempat kerja atau keluar bersama teman-teman, akibatnya Anda sering tidak memiliki waktu baik untuk anak-anak maupun untuk pasangan Anda.

e. Hilangnya keakraban

Di dalam keluarga tidak hanya terdiri dari suami dan istri, tapi juga melibatkan anak-anak, orangtua dan mungkin sanak saudara yang lain. Ketika tidak ada lagi keakraban di antara anggota keluarga, maka hal ini bisa menjadi indikasi bahwa rumah tangga tersebut sedang bermasalah.

f. Mengonsumsi zat-zat berbahaya

Rumah tangga tidak bahagia penuh dengan tekanan. Tidak jarang mereka yang terlibat di dalamnya berusaha melarikan diri dari permasalahan yang sedang dihadapi dengan cara mengonsumsi zat-zat berbahaya, seperti alkohol atau narkoba, agar dapat melupakan sejenak permasalahan hidup yang sedang dihadapi.

g. Terjadi perselingkuhan

Masing-masing pasangan sudah tidak lagi memiliki respek terhadap satu sama lain. Tidak jarang untuk mendapatkan kembali kasih sayang ataupun dukungan, suami atau istri melakukan perselingkuhan dengan orang lain.

h. Gesture atau bahasa tubuh

Bahasa tubuh seseorang tidak dapat menyembunyikan suasana hatinya. Karena itu, ketika dalam rumah tangga tidak ada lagi kebahagiaan, maka tanpa disadari apa yang

sedang dialami akan terbawa ke dalam pergaulan sehari-hari.

i. Tidak lagi mempedulikan keluarga

Tidak ada lagi kepedulian di antara suami istri, bahkan kepedulian terhadap anak-anak, dan setiap orang berusaha mencari sendiri kesenangan hidup sesuai dengan apa yang disukainya.

j. Muncul depresi

Rumah tangga yang tidak bahagia jika dibiarkan terus berlarut-larut mampu membuat seluruh anggota keluarga hidup di dalam tekanan. Oleh karena itu, tidak jarang salah satu ataupun beberapa anggota keluarga akhirnya mengalami depresi, dalam skala yang lebih berat dapat membuat seseorang mengalami hilang ingatan.

k. Tidak lagi memiliki tujuan hidup

Di dalam rumah tangga yang tidak bahagia fungsi-fungsi penting keluarga tidak lagi bisa bekerja dengan semestinya. Karena itu, setiap orang akhirnya tidak lagi memiliki tujuan hidup dan melakukan segala sesuatu sekehendak hatinya.

l. Terjadi kemerosotan akhlak dan prestasi

Imbas rumah tangga tidak bahagia sangat luas, salah satunya adalah berkaitan dengan kemerosotan akhlak dan

prestasi baik di dalam masyarakat, di tempat kerja ataupun di sekolah.⁵²

Berdasarkan uraian mengenai aspek-aspek terciptanya keharmonisan rumah tangga, dapat terwujud dengan memperhatikan hal yang berkaitan dengan proses sebelum dilaksanakan perkawinan, saat perkawinan berlangsung dan setelah terwujudnya perkawinan. Tidak semua aspek dapat dipenuhi dalam sebuah rumah tangga, tetapi minimal setengah dari aspek-aspek tersebut ada dalam kehidupan rumah tangga.

D. Tanggungjawab dalam Rumah Tangga

Perkawinan pada hakikatnya adalah sebuah ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup berumah tangga. Tujuan perkawinan sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Rahman Ghozali bahwa tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁵³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keharmonisan artinya perihal (keadaan)

⁵² [http://keluarga.com/authors/Intan Lolitasari](http://keluarga.com/authors/IntanLolitasari), dikutip dari majalah Wanita berbahasa Inggris, Akses 10 juni 2016

⁵³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Ketiga, Kencana, Jakarta, 2008, h. 22

harmonis, keselarasan dan keserasian dalam rumah tangga yang perlu dijaga.⁵⁴

Definisi keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak atau suami, istri dan anak-anaknya. Disebutkan bahwasanya keluarga ialah orang seisi rumah atau masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak dan anggota keluarga lainnya yang memiliki hubungan nasab.⁵⁵

Salah satu perhatian (*atensi*) Islam terhadap kehidupan keluarga adalah diciptakannya aturan dan syariat yang luwes, adil, dan bijaksana. Andai kata aturan ini dijalankan dengan jujur dan setia, maka tidak akan ditemukan adanya pertikaian. Kehidupan akan berjalan damai dan sentosa. Kedamaian ini tidak saja dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi juga dapat dinikmati oleh anggota masyarakat sekitarnya.⁵⁶ Keharmonisan keluarga berarti situasi dan kondisi dalam keluarga dimana didalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian dan memberikan rasa aman dan tentram bagi setiap anggota keluarganya; dengan menjalankan kewajiban masing-masing, baik kewajiban terhadap isteri, kewajiban terhadap suami, dan kewajiban terhadap anak.

⁵⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, h. 484

⁵⁵ Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah*, Terbit Terang, Surabaya, 1998, h. 7

⁵⁶ Haikal Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, h. 7

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman bin Ahmad al-Iji, *Syarah al-'Adhl ala Mukhtashar al-Muntaha*, Juz 2, ttp.: al-Amiriyah, tt.
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* Jilid 4, Pustaka Baru Van Hoeve, (Jakarta, 1996).
- , *Ensiklopedi di Islam*, (Jakarta:PT. Baru Van Hoeve,t.t, 2006),
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Khitbah, Nikah, dan Talak),(Jakarta: Amzah, 2009).
- Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994).
- Abdul hamid Hakim, Mabâdi' Awwaliyah, juz I, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.
- Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufaṣṣal fî ahkâmi al-mar`ah wa al-bait al-muslim fî al-Syari`ah al-islamiyyah*, Jilid VIII: Muassasah Risalah Beirut,tt.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. I, cet. I (Jakarta: Kencana, 2006).
- , *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2005.
- , *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2006), cet, 4.

- , *Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*, dalam Jurnal Mimbar Hukum, Al-Hikmah dan Ditbinbapera, Jakarta No. 52 Th. XII 2001.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Ketiga, Kencana, Jakarta, 2008,
- , *Fiqh Munakahat*. (Jakarta:Prenada Media Grup. 2010).
- , *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003)
- Abdullah Kelib, *Hukum Islam*, Penerbit PT Tugu Muda Indonesia, Semarang, 1990.
- Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996).
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah*, (Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyyah, 1969),
- , *al-Fiqh 'Ala Madzâhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Juz 4.
- Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001),
- Abi Muhammad 'Abdillah bin Ahmad bin Qudâmah, *Al-Mughni asy-Syarh al-Kabîr*, edisi I (Beirût, Dâr Al-Fikr, 1404/1984), VII.
- Abi Zakariya al Anshari, *Fathul Wahhab, Syarah minhajut tulhab*, Syirkah Izamatuddin, juz II, tt .
- Abi Zakariya Yahya al-Nawawi, edisi Syaikh 'Adil Ahmad Abd al-Maujud, *Rauḍah at-Ṭâlibîn*, cat.I, Beirut, Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1412/1992.
- Abraham Maslow. (2006), *On Dominace, Self Esteen and Self Actualization*. Ann Kaplan: Maurice Basset.

- Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwainy, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1995),
- Abu Al-Farij Ibn al-Jauzi, *al-‘Ilalu al-Mutanâhiyah*, al-Mausū‘ah, Arabiah, Juz 3.
- Abu as-Sa’ādât ibn Asir, *Jâmi’u al-Uṣul min Ahâdiṣ ar-Rasûl*, Juz I, Multaqa ahlu al- hadis.
- Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, *Kifayah al-Akhyar*.
- Abū Dâud, “*Kitab an-Nikâh*”, hadîs no. 1784, nat-Tirmîzî, “*Kitab an-Nikâh*”, hadîs no. 1021
- A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006);
- Ahmad al-Hashariy, *al-Wilâyah al-Washâyah, al-Thalâq fi al-Fiqh al-Islâmiy li Ahwâl al-Syakhshiyyah*, (Beirut: Dar al-Jil, 1992), cet. Ke-2.
- Ahmad Multazam, *Batalnya Perkawinan dan Larangan Pernikahan*, Blogspot.Com/2013/12/ Batalnya-Perkawinan-Dan-Larangan.Html, Akses, 06 Feb 2015
- Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2*, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), Cet, II).
- Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya:Gita Media Press, 2006).
- Ahmad Warson Al-Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 1985),
- Al Lu-lu-u wal Marjân 2.*
- al Qurthubi, *Jami’ Ahkamil Qur’an*, Dar Syi’ib (5/130-131).
- Al- Syatiby, *al-Muafaqat fi Ushul al- Syari’ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.).

- 'Ala al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasaniy, *Bada'i' wa al-Shana'i'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), Juz 3.
- Alhamdani, *Risalah Nikah*, Pustaka Amani, Jakarta, 1980.
- Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam)*, Penerjemah: Hadi Mulyo dan Sobahus Surur, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992).
- Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006).
- Ali Trigiyatno, *Penyelesaian problema Syiqaq Menurut Hukum Islam*, [http://ali3g.blogspot.com/2010/10/ penyelesaian-problematika-syiqaq.html](http://ali3g.blogspot.com/2010/10/penyelesaian-problematika-syiqaq.html), Akses 19 Nop 2014
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, dari Sosial Ungkungan Asuransi Sehingga Ukhuwah, Bandung: Mizan, Juni 1994.
- Al-Imâm Sahnûn, bin Sâ'id, al-Tanûkhî, *Al-Mudawwanah al-Kubrâ*, (Beirût, Dâr Şadr, 1323.H), III.
- al-Maktabah Asy-Syâmilah, *Faidh al-Qadir*, Juz 6 .
- , *Tuhfah al-Ahwaði*, Bab Pernikahan Tanpa Saksi, juz III.
- Al-maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Jilid Pertama (Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1382/1963),
- Al-Mut'ah Wa Atsaruha Fil-Ishlahil Ijtima'I*,
- Al-Sayyid Abi Bakr (al-Sayyid al-Bakr), *I'ânât al-Thâlibîn*, (Beirut: Dar Ihya` al-Turats al-'Arabiy, t.th.), Jilid 4.
- Al-Syatibi, *al-Muafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Musthafa Muhammad), jilid 2.
- Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo 2004).

- , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- , *Ushui Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2011.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003).
- , *Ushul Fikih*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, Cet 5, 2009 M) Vol. 2.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, Undang-Unang Nomor 1 tahun 1974 sampai KHI)*, cet. I (Jakarta: Kencana, 2004).
- Amr Abdul Fatah, *As-Siyasah asy-Syar'iyyah fil Ahwan Syakhsyiyyah*.
- Anik Farida, *Menimbang Dalil Poligami, antara Teks, Konteks, dan Praktek*, balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Kementerian Agama, jakarta, 2008.
- Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978).
- Asafri Jaya dalam kitab *lisan al- 'Arab* kepunyaan Ibnu Mansur al-Afriqi, (Bairut: Dar al-Sadr, t.th), VIII, h. 175
- Asevy Sobari**, -----, Advokat & Konsultan Hukum, <https://www.blogger.com/profile/09735696252797569363>, Akses 14 Februari 2015
- , Advokat & Konsultan Hukum, <http://asevysobari.blogspot.com/2014/11/alasan-perceraian.html>, Akses 12 Februari 2015
- Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Terjemaha Farid Wajidi dan Assegaf, Cici Farkha, (Yogyakarta: LSPPA dan CUSO, 1994),

- Ash Shan'ani, *Subulus Salam*, Darul Kutub Ilmiyah (3/243);
- Asy Syatibi, *Al Muwafaqat fi Uşul Asy Syari'ah*, (Beirut: Dâr Ibnu Affan, Cet 1, 1997 M/1417 H) Vol. 2.
- Azmi Mamduh, *Al- 'Aqdu Al- 'Urf*.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) .
- Bhader Johan dan Sri Warjiyati, dalam bukunya *Hukum Perdata Islam*, Mandar Maju, Bandung, 1997, h. 33;
- Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*,
- Burhan al-Din Abi al-Hasan 'Ali Ibn Abi Bakr 'Abd al-Jalil al-Rasyidaniy al-Marghinaniy, *al-Hidayah Syarh Bidayat al-Mubtadi'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), Juz 1, h. 247;
- C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. II (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Chaerul Umam, *Ushul Fiqih 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2000;
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Dadang Hawari, *Majalah Warta Bumi Putra*, Edisi 24, Juli 1994,
- Darul Hadis Al-Qahira, Juz 4,
- Dasrizal Dahlan, *Putusnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Perdata Barat (BW); Tinjauan Hukum Islam*. (Jakarta : PT. Kartika Insan Lestari, 2003).

- Daud Bahransyaf, *Cerai Gugat Mendominasi Perceraian di Indonesia*, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Volume 33 Nomor 1 Maret 2009, Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS), Yogyakarta;
- Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah menurut al-Qur'an dan al-Sunnah*, Cet.1, Akademika Presindo, Jakarta, 2000.
- Departemen Agama RI, Dirjen Bimas Islam dan Pembinaan Syari'ah, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (PT. Tehazed, Jakarta,, -----, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, 1984/1985), cet,2.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008),
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan per Undang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, 2004.
- Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010.
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Dina Utama Semarang, Cet. I, 1993.
- Djamal Latiief, H.M, *Aneka Hukum Percerian di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982.
- Emilia Renita AZ, dalam “40 Masalah Syiah”. Bandung: IJABI. Cet ke 2. 2009.
- Esiklopedi Hukum Islam* (editor: Abdul Aziz Dahlan), PT. Ichtiar Baru Van Hove, jilid 4, Jakarta. cet. I, 1966.

F.X. Suhardana, *Hukum Perdata I*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.

Fathi al-daraini, al-manahij al-Ushuliyyah fi Ijtihadi bi al-Ra'yi fi al-Tasyri', (Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadist, 1975).

Fathu al-Bâri.19, 200, *Kitabun- Nikah*, bab Nahyu an-Nabi saw. 'an Nikah al-Mut'ah Akhiran (bab tentang larangan Nabi saw. akan nikah mut'ah pada akhirnya).

Fathul Mu'in Bisarkhi Qurrotul 'Ain, Bilma'na 'Ala Fesanteren.

Fathurrahman Djamil, *Perkawinan Bawah Tangan dan Konsekuennya Terhadap Anak dan Harta*, Jakarta, GT2 dan GG Pas, Mei 2007.

Fatwa MUI Jatim dan Sampang *tentang Ajaran Tajul Muluk* di Sampang, tanggal: 8 shafar 1433/ 1 Januari 2012.

-----, 1 Juni 1980, dalam Himpunan Fatwa MUI.

Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa: Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1994).

Firdaweri dkk, *Perceraian Akibat Tidak Ada Keharmonisan Rumah Tangga (Analisis Tentang Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjungkarang)*, Pusat Penelitian IAIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2010,

Hafizh Dasuki, "dkk", *Ensiklopedi Islam*, Cetakan Pertama, Jilid 4, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1993.

Harian *Lampung Post*, Kamis, 02 Mei 2013, h. 07.

-----, Kamis , 5 januari 2012, h. 22

Harian *Republika* (10/11/2012)

-----, 02 Nopember 2012.

-----, Rabu, 5 Desember 2012.

Harian *Tribun*, Sabtu, 01 Desember 2012.

-----, Sabtu, 01 Desember 2012.

Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadis 5*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2003).

-----, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Buian Bintang, 1967.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1977.

-----, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, cet I* (Bandung: Mandar Maju, 1990),

Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, Penerbit Erlangga.

[ht://www. pa-tanggamus. go.id/ index.php/rekap - perkara-diterima](http://www.pa-tanggamus.go.id/index.php/rekap-perkara-diterima), Akses 25 Oktober 2014

[http://Nanang Soehendar.blogspot.com/](http://Nanang%20Soehendar.blogspot.com/), Nikah Mut`ah, diposkan Selasa, 17 Januari 2012, Akses 20 Desember 2013

[http:/ /yotnoali.blogspot.com/ 2011/07/ Menimbang -Manfaat-Mudharat-Poligami.html](http://yotnoali.blogspot.com/2011/07/Menimbang-Manfaat-Mudharat-Poligami.html).? m=1,9/6/2014, 10:38 WIB

[http:// daud bahransyaf. blogspot.com/ 2009/08/ intisari-cerai-gugat-di-indonesia.html](http://daud%20bahransyaf.blogspot.com/2009/08/intisari-cerai-gugat-di-indonesia.html), Akses, 28 Okt 2014.

[http:// keluarga.com/ authors /**Intan Lolitasari**](http://keluarga.com/authors/Intan%20Lolitasari), dikutip dari majalah Wanita berbahasa Inggris, Akses 10 juni 2016

[http:// lampost.co/ berita/pns-di-metro - dan-lamtim - banyak-yang-bercerai](http://lampost.co/berita/pns-di-metro-dan-lamtim-banyak-yang-bercerai), Akses 25 Oktober 2014

[http:// mbainayah.blogspot.com /2014/11/ fasakh-lian-ila- dan-dzihar.html](http://mbainayah.blogspot.com/2014/11/fasakh-lian-ila-dan-dzihar.html), Akses 18 feb 2015

[http:// www.pa- sungguminasa.go.id/ peraturan-dan-kebijakan/ 116-daftar-hasil-pene litian](http://www.pa-sungguminasa.go.id/peraturan-dan-kebijakan/116-daftar-hasil-penelitian), Akses 28 Okt 2014

[http://fikihonline.blogspot.com/ 2010/ 04 /rukun-dan-syarat-talak.html](http://fikihonline.blogspot.com/2010/04/rukun-dan-syarat-talak.html), Akses 12 feb 2015

[http://lampost.co/ berita/ angka-perceraian-di-lampung-barat-tinggi](http://lampost.co/berita/angka-perceraian-di-lampung-barat-tinggi), Akses 07 Januari 2014

[http://teori-psikologi-blogspot/2008/05/keharmonisan -rumah-tangga.html](http://teori-psikologi.blogspot/2008/05/keharmonisan-rumah-tangga.html), diakses pada sabtu, 30 Juli 2011 ;

[http://www.hidayatullah.com/ read/ 20495/03/01/2012](http://www.hidayatullah.com/read/20495/03/01/2012).

[http://www.voa islam. com/ islamia/aqidah/ 2010/04/06/4744/ haramkah-nikah-mutah-yang-diagungkan-syah/](http://www.voa-islam.com/islam/aqidah/2010/04/06/4744/haramkah-nikah-mutah-yang-diagungkan-syah) Posted by Ummu Hanif at 9:52 AM

<http://www.youtube.com/user/dedikusmayadi>/Published on Dec 1, 2012

[http://2. Blogspot.com](http://2.blogspot.com), Novita BossFamily On: Senin, Keluarga Harmonis, Akses 05 Mei 2016

<https://www.google.com>, Akses 25 Nopember 2013

[https://www.pa.plaihari.go,id/index.php? conten=mod-artikel](https://www.pa.plaihari.go.id/index.php?content=mod-artikel), Akses 24 Nopember 2013

Huzaemah Tahido Yanggo, *Perkawinan Yang Tidak Dicatat Pemerintah: Pandangan Hukum Islam*, Jakarta GT2 dan GG Pas.

Ibn Qayyim, *I'lam al-Muaqi'in Rabb al- 'Alamin*, (Beirut: Dar al-Jayl, t.t.), Jilid III.

Ibnu Abi Al-'Izz , *Al- 'Aqidah Al-Thahawiyah dan Syarahnya*, tt.

Ibnu Faris, *Al-Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*, Cet. I, (Bairut: Dar al-Fikr, 1415/ 1994).

- Ibnu Hajar *Fathul Bari*, (9/173).
- Ibnu Mushtofa Muhammad Imarah, *Jawahiru Al-Bukhari*, Al-Hidayah, Surabaya, 1371;
- Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, (Kairo: Daar al-Hadis, 1425 H/2004 M), juz IX.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Beirut, Dâr al- Fikr, tt, juz.2.
- , *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, IV;
- , *Bidayatul Mujtahid*, terj, Abdurrahman dkk, Juz 2, Asy-Syifa', Semarang, 1990;
- Ibrahim Anis dkk, *Al-Mu'jam al-Wasith*, Cet. II, (T.Tp.: T.Np, 1972), Juz I;
- Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th);
- Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Şahih Muslim*, (Beirut: Darul Kutub al-Alamiyah, tth);
- Imam Al-Nasa'iy, *Sunan al-Nasa'iy*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Jilid 3.
- Imam al-Qadhi Abu al-Walid Muhammad bi Ahmad ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz ke 2 (bairut: Dar al-Fikr, tt.).
- Imam An-Nawâwi, *Şahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011);
- Imam Bukhari, *Şahih Bukhari*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.);
- Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Bab La Nikah Illa Biwaliy, Juz V, Aplikasi Maktabah Syamilah;

Imam Jalaludin Abdurrahman Abi Bakar As Suyuti, *Al Misbah Wa An-Nazair*, (Beirut: Dar Al Fakir, 1995 M./1415H

Imam Malik bin Anas, *Al-Mudawanah Al-Kubra* (II/130);

Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), Jilid 2;

Imam Nawawi, *Al-Majmu'* (XVII/356);

Instruksi Presiden RI no. 1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Dirjen Binbaga Islam, Kemenag RI tahun 2001

Islamid. blogspot.com. *Nikah Mut'ah Menurut Kacamata Islam*,.Diposkan Sabtu, 17 Desember 2011, Akses, Desember 2013;

Isni Bustami, *Perkawinan dan Perceraian dalam Islam*, (Padang : IAIN IB Press, 1999);

Izzuddin Ibn Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Bairut: Dar al-Jail, t.t), jilid II;

J.N.D, *Hukum Islam di Dunia Modern*, (1994) Yogyakarta,Tiara Wacana.

Jalaluddin al-Mahalli, *Al-Mahalli*, juz III (Indonesia: Nur Asia, tt);

-----, dalam artikel di *Buletin at-Tanwir*, Yayasan Muṭahhari, Edisi Khusus No. 298. 10 Muharram 1431 H.

Jalaluddin as-Suyuṭi, *al-Asybah wa an-Nazāir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt);

-----, *Jamî'u al-Hadis*, al-Mausu'ah al-arabiyah;

Jalaluddin Rakhmat, “*Meraih Cinta Ilahi*”, Depok: Pustaka IIMaN, 2008;

-----, dalam “*Al Mushthafa (Manusia Pilihan yang Disucikan)*”, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008.

- , dalam “*Sahabat Dalam Timbangan Al-Quran, Sunnah dan Ilmu Pengetahuan*”, PPs UIN Alauddin, 2009;
- James H. Donnelly, James L. Gibson dan John M. Ivancevich, *Fundamentals of Management*, (New York: Irwin McGraw-Hill, 1998);
- Jami' Ahkamu Nisaa`* (3/169-170),
- Jess; Gregory J. Feist (2010). *Teori Kepribadian: Theories of Personality*. Salemba Humanika.
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974;
- Khattabi, *Aunul Ma'bud*, Darul Kutub Ilmiyah (6/59).
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer, edisi revisi, ACAdEMIA, TAZZAFA, Yogyakarta, 2005;
- , *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, ACAdEMIA, Tazzafa, Yogyakarta, 2009.
- , *Hukum Perkawinan I*, ACAdEMIA, Yogyakarta, 2005;
- , *Islam: Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Dengan Perbandingan UU Negara Muslim* (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2004);
- Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI* Red: Cholis Akbar/hidayatullah.com, Rabu,
- Labib MZ, *Rahasia Poligami Rasulullah SAW*, (Jakarta: Darul Falah, 2005)
- Laporan Utama “Bukan Legalkan Zina” dalam *Majalah Konstitusi*, No. 61, Februari 2012.

- Leli Nurrohmah, *Poligami Saatnya Melihat Realitas*, dalam Jurnal Perempuan no.31, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991);
- Lina Nurhayanti, *Faktor yang Mempengaruhi Cerai Gugat di PA Yogyakarta*, Yogyakarta, 2010
- Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah*, Terbit Terang, Surabaya, 1998,
- M. Alfatih Suryadilaga, *Sejarah Poligami dalam Islam cet.1*, (Bandung: Citra Umbara 2002),
- M. Bukhori, *Hubungan Seks Menurut Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994);
- M. Fahim Khan, *Shatibi's Objectives of Shari'ah and Some Implications for Consumer Theory*, dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (ed), *Reading in Islamic Economic Thought*.
- M. Najib al-Muti'i, *Al-Majmu' Syarh al-Muḥaḍḍab li al-Syairozi* (Jeddah: Maktabah al-Irṣad, tt) .
- M. Quraisy Syihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i, atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet.k6, Mizan, Bandung, 1997;
- M. Damrah Khair dalam Laporan Hasil Penelitian Individu dengan judul *Cerai di Kota Bandar Lampung, Studi Tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klas IA Tanjungkarang 2008-2012*;
- Mahmud Mathrajiy, *al-Majmû' Syarh al-Muḥadzdzab al-Imâm al-Nawawiy*, (Beirut: dar al-Fikr, 2000), Juz 18;
- Mahmud Syukri al-Alusi, *Mukhtashar Itsna Asy'ari`ah*;

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996),

Majalah Nova, NO. 1294/XXIV, 10-16 Desember 2012.

Majallah *al-Buhus al-Fiqhiyyah*, edisi 36, Th. 9/ RAjab-Sya`ban-Ramaḍan 1428.H;

Majmu' Fatawa 32/131

Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th.), Jilid 1.

Manaarus Sabiil (II/226),

Mandzur, *Lisanul Arab*, (Kairo: Darul Ma'arif);

Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, , (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989

Moh. Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, (Bandung: Pustaka Dahlan, 1987), jilid 3;

Moh. Mukri, *Benarkah Imam Syafi'l Menolak Maslahah?*, Yogyakarta: Pesantren Nawaesea Press, 2010;

Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996;

-----, *Hukum Perkawinan Islam* (Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), Cet. 2;

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: lentera, 2001).

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, 1958);

Muhammad al-Zarqa`, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus, Dar al-Qalam, 1996), cet. Ke-4;

- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004);
- Muhammad Asy Syaarif, *Poligami itu Wajib?*, (Yogyakarta: Mumtaz, 2012),
- Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqih Praktis Menurut Al-qur'an , As-sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Mizan, Bandung, Cetakan Pertama, 2002;
- Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Authar*, Juz ke 6 (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, tt.).
- Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy al-Maliki, *Qawânin al-Ahkâm al-Syar'iyah*, Beirut, Dâr al-'ilm li al-Malâyîn, 1974;
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Marâm*, (Jakarta: Dârus Sunnah Press, 2013);
- Muhammad bin Muhammad Abi Hamid al-Ghazaliy, *al-Wajiz fi Fiqh Madzhab al-Imâm al-Syâfi'iy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994);
- Muhammad Bin Thohir Ibnu Asyur, *Maqasid Asy Syariah Al Islamiyah*, (Kairo: Darus Salam, 2006 M/1427 H);
- Muhammad Fu`ad 'Abd al-Baqiy, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut:)
- Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlaniy, *Subul al-Salâm; Syarh Bulûgh al-Marâm min Adillâh al-Ahkâm*, (Bandung: Dahlan, t.th.);
- Muhammad Idris Asy- Syafi'î, *al-Um*, edisi al-Muznî, (ttp, tt), V, h
- Muhammad 'Iz ad-Din Abdul Aziz bin Abd as-Salam, *Qawa'id al-Ahkamfl Mashalih al-Anam*, Juz 1, t.t.p.: al-Istiqomah, t.t;
- Muhammad Jawad Mughiniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Penerjemah Masykur AB, Lentera 1996,)

- , *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: lentera, 2001);
- Muhammad Kamaluddin Imam, *Ushulul Fiqh Al Islamy*, (Iskandariyah: Darul Matnu'at Al Jami'ah;
- Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophiy*, (Islamabad; Islamic Research Institute, 1977);
- Muhammad Malullah, *asy Syi'ah wal Mut'ah*, Maktabah Ibnu Taimiyah;
- Muhammad Said Romdhon Al Buthi, *Dhowabitul Maslahah fis Syariah Al Islamiyah*, (Muassasah Risalah);
- Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Terjemah Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, (Yogyakarta: Elsaq, 2004),
- Musthafa Dib al-Bagha, *al-Tawzhīb fi Adillāh min al-Ghâyah wa al-Taqrīb*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), cet. Ke-2;
- NJ. Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jamunu, Jakarta, 1969),
- Panduan Keluarga Sakinah* (hal. 297), *Terj. Al-Wajiz* (hal. 637), dan *Ensiklopedi Fiqh Wanita* (II/422).
- Pengadilan Agama, Laporan tahunan PA Tanjungkarang, tahun 2010;
- Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1990
- Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim
- PP No 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan,
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000;
- Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, cet.2, Penamadani, Jakarta, 2005;

- Said Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Pustaka Al-Husna, Jakarta, 1994;
- Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974);
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 2*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982),
- Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam dan Kontemporer*, (Kencana, Jakarta. 2004)
- , dan M. Zein, *Ushul fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009;
- Sayyid al-Khuri al-Syarnubi al-Banani, *Aqrab al-Mawarid*, Juz 1, Beirut: al-Suyu'iyah, t.t;
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, (Kairo: Dâr al-fatah. 1995).
- , *Fikih Sunnah*, jilid 3;
- , *Fikih Sunnah*, jilid 6, PT. Alma'arif, Bandung, 1980;
- , *Fiqh al-Sunnah*, Jld. II, Cet. Ke 4 (Bairut: Dar al-Fikr li al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1403 H./1983 M).
- , *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa oleh Moh. Thalib. (Bandung: al-Ma'arif, 1998), jilid 8;
- Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004),
- Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Cet. I;
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: PT. Liberti, 2004);
- Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1989.

- Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005),
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012),
- Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001);
- Suyono, *Faktor-faktor Penyebab Cerai Gugat dan Akibat Hukumnya* (Studi pada Pengadilan Agama Metro Klas I B), Tesis, STAIN Metro, 2013;
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, penerjmh. M. Abdul Ghoffar, E.M, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2004;
- Syaikh Kamil Muhammad ‘uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: pustaka al-kautsar, 1998);
- Syamsyu Addin As-Sarakhsi, *Al- Mabsūt*, (Beirūt: Dâr al-Ma‘rûfah, 1409/1989), V;
- Syarh Ma’anil Atsar (3/27).
- Syukri Fathudin AW, Vita Fitria, *Problematisa Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan*. (Ringkasan dan Summary), <https://www.google.com>, Akses 25 Nopember 2013
- Tafsir Fathu al-Qadir*.1, 449.
- Tafsir Ibnu Katsir*.1, 474.
- Tafsir Khazin (Lubab at-Ta’wil)*.1, 506.
- Tahdzibul Ahkam* 7/254.
- Taqiuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Imam, 1993), juz. 11;
- , *Kifayatul Akhyar fie Hilli Ghayah al-Ikhtishar*, Dar al-Kutub al-Islamy, tt;

- Tarsi, (Ketua Pengadilan Agama Pelaihari) *Problematika Nikah di bawah tangan kaitannya Dengan Pengesahan Nikah*, www.pa.plaihari.go.id/index.php?content=mod-artikel, Akses 24 Nopember 2013
- Tihami, dan Sohari Sahrani , *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),
- , *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, Raja Grapindo, 2009;
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta, Kencana: 2010), cet.ke-2;
- Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang telah di amandemen
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974, *tentang Perkawinan*,
- Undang-undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan sekarang diganti dengan Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004
- Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 66 ayat (1).
- Undang-undang No.23 tahun 2004 *tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*,.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 57 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum* ,Cetakan Pertama (Bandung: Citra Umbara, 2012),
- Usamah al-Asyqor, *Mustajaddat Fiqhiyyah fî Qodhoya Zawaj wa Tholaq*;
- Wahbah al-Zuhaily, *Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, (Damsyik, Dar al-Fikr, 1989), juz. VII;
- , *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*. Juz IX. Beirut: Dâr al-Fikr. 2002;

- , *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Jilid II;
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007),
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, PT. Tehazed, 2010;
- Yusuf bin Ahmad Ad-Daryuwisy, *Az-Zawaj Al-'Urfi*, Darul Ashimah, KSA, cet pertama, 1426 H.
- Yusuf Hamid Alim, *Al Maqosid Al 'Ammah Lissyariah Al Islamiyah*, (Riyadh: Ma'had Ali Al Fikri Al Islami, Cet-2, 1994 M/1415 H);
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007;
- Zainuddin bin 'Abd al-'Aziz al-Malibâri, *Fathu al-Mu'in bi Syarh Qurratu al-'Ain* (Cirebon, al-Maktabah al-Mișrîyah, t.t;
- Zainuddin Hamidy, dkk, Shahih Bukhari, *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari*, Jilid IV, Widjaya, Jakarta;
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* Jilid II, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995);
- Zurinal & Aminuddin, *Ciputat*, Lembaga penelitian UIN, Jakarta, 2008.

